



# Masyarakat Pesisir di Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Laporan untuk  
Arafura Timor Seas Ecosystem Action Programme

Hermien L. Soselisa - December, 2011



2011



**MASYARAKAT PESISIR**  
**DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT**  
**(potret aspek sosio-budaya dan ekonomi)**

**Suatu Implementasi Awal *Pilot Project* pada *ATS Region***

**Laporan untuk**  
**Arafura Timor Seas Ecosystem Action Programme**  
**(ATSEA Programme)**

**Desember 2011**

oleh:  
**Hermien L. Soselisa**  
**Wellem R. Sihasale**  
**Pieter Sammy Soselisa**  
**Simona Ch. H. Litaay**

## **Ucapan Terima Kasih**

Para penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak atas bantuan dan masukan yang diberikan mulai dari persiapan, penelitian di lapangan, sampai dengan penyelesaian laporan ini.

Terimakasih kami sampaikan kepada ATSEA Program Manager Dr. Tonny Wagey, kepada Bapak Ir. Duto Nugroho dan Prof. Dr. Subhat Nurhakim dari Balitbang KP, kepada Ibu Ivonne Rawis dan staff dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, dan kepada UNOPS sebagai penyandang dana.

Di Saumlaki, kami sampaikan terima kasih kepada Bupati Maluku Tenggara Barat, Bapak Bitzael S. Temmar, kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan MTB, Ir. Alo Batkorbawa dan staff Bpk. Poly Rahandekut, Kepala Dinas Kehutanan MTB, Ir. Rein Matatula, Sekretaris (Plt Kepala) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa MTB, Bpk. Yongky Souisa, Kepala Badan Pengelola Perbatasan MTB, Drs. D. Batmomolin dan staff Bpk. E.Andityaman Falikres, Kepala Bappeda MTB, Drs. H. Matrutty dan staff, Kepala Dinas Perindagkop MTB dan staff, staff Dinas Kesehatan MTB, Kepala Bank Maluku MTB Bpk. N. de Fretes, kepada Ibu Bitu Temmar, kepada Bpk. N. Lobloby, dan kepada Bpk. Ferry Uren serta Angky.

Di desa, kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Lermatang, Bpk. Jantje Rangkoly dan staff serta masyarakat Lermatang, kepada Kepala Desa Luran, Bpk. Yakobus Laratmase dan staff serta masyarakat Luran, dan kepada staff dan masyarakat Matakus di Pulau Matakus.

## **Executive Summary**

As part of the ATSEA Program in the implementation of pilot project on some villages around ATS region, this study existed as an early implementation of the pilot project. A portrait of local socio-cultural and economic conditions will help to provide some sense of the existing situation on the field.

This study reports on findings and recommendations of a preliminary assessment of available social and economic statistical compilations, along with the results of a 2 week fact-finding of the field visit to three villages in Tanimbar Selatan subdistrict and the capital town of MTB district of the ATS Maluku region. During that time, the study team, comprised of four social scientists, had series of discussions with representatives of village communities and local government officials, and interviews member of communities on the current local socio-cultural and economic situations.

The report presents findings of demographic data, education, health, infrastructure and access, people's livelihoods on resource-based activities include agriculture, fishery, and forestry, and some key issues related to coastal economic development in the area.

Some key recommendations include the need of further analysis of statistical data provided by government, especially on some aspects; improve infrastructure and services related to health, education, economic, information and knowledge; improve local management system to control environment; improve policies on local food security; develop mariculture based on local prime commodity; improve post-harvest technology on fisheries and agriculture; develop deep sea fishery technology for local fishers to reduce burden on intertidal area and strengthen local control over the sea from outside exploitation; and consider local culture in community development programs.

## DAFTAR ISI

Executive Summary	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
1. PENDAHULUAN DAN LINGKUP STUDI	1
2. GAMBARAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT	2
2.1. Letak dan Batas Wilayah	2
2.2. Luas wilayah dan Administrasi Pemerintahan	3
2.3. Topografi dan Musim	4
3. DEMOGRAFI	5
3.1. Jumlah dan Distribusi Penduduk	5
3.2. Agama	6
3.3. Bahasa	7
4. PENDIDIKAN	7
5. KESEHATAN	8
6. INFRASTRUKTUR	11
7. MATA PENCAHARIAN HIDUP	14
7.1. Pertanian	15
7.2. Kehutanan: Kayu dan Non-Kayu	19
7.3. Perikanan	21
7.4. Akses ke Pasar dan Rantai Pasar	26
7.5. Situasi Pendapatan	31
8. LERMATANG DAN LAURAN: GAMBARAN MASYARAKAT PESISIR DI MTB	34
8.1. Identifikasi	34
8.2. Profil Kependudukan dan Infrastruktur	35
8.2.1. Desa Lermatang	35
8.2.2. Desa Lauran	41
8.3. Aktivitas Ekonomi	46
8.4. Pekerjaan Petani dan Nelayan	60
8.5. Prioritas Penggunaan Uang	61
9. BEBERAPA ISU DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI PESISIR DI YAMDENA BAGIAN SELATAN	63
10. REKOMENDASI	65
Kepustakaan	67

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Luas Wilayah menurut Kecamatan (km <sup>2</sup> )	3
Tabel 2.	Jumlah desa menurut Kecamatan	4
Tabel 3.	Jumlah Penduduk menurut Kecamatan, 2009	5
Tabel 4.	Penduduk MTB menurut Agama, 2008	6
Tabel 5.	Infrastuktur Sekolah, Rasio Murid/Sekolah dan Murid/Guru, 2008/2009	8
Tabel 6.	Kematian Neonatal dan Ibu di MTB (2008-2010)	9
Tabel 7.	Persentase Hasil Monitoring Status Gizi Balita, 2009	9
Tabel 8.	Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Puskesmas, Pustu, Polindes, 2009	10
Tabel 9.	Tenaga Kesehatan di Kabupaten MTB menurut Kecamatan, 2009	11
Tabel 10.	Rumahtangga Petani , Luas Areal dan Produksi Kelapa, 2009	18
Tabel 11.	Luas Hutan dan Penggunaannya di Kabupaten MTB	21
Tabel 12.	Jumlah Rumahtangga Nelayan dan Nelayan, 2009	21
Tabel 13.	Potensi dan Jumlah Tangkapan beberapa Kelompok Sumberdaya, 2010	22
Tabel 14.	Harga pertanian dan hasil laut di Saumlaki, Agustus 2011	31
Tabel 15.	Pendapatan Rata-rata Rumahtangga per Tahun dari Beberapa Jenis Usaha, 2003-2004	33
Tabel 16.	Jumlah Penduduk Lermatang, 2010	36
Tabel 17.	Jenis Bahan Bangunan Rumah Desa Lermatang, 2010	36
Tabel 18.	Tingkat Pendidikan Penduduk Lermatang	38
Tabel 19.	Mata Pencaharian Penduduk Desa Lermatang	41
Tabel 20.	Jenis Bahan Bangunan Rumah Desa Lauran, 2010	42
Tabel 21.	Tingkat Pendidikan Penduduk Lauran	44
Tabel 22.	Mata Pencaharian Penduduk Desa Lauran	45
Tabel 23.	Beberapa Isu terkait Pengembangan Ekonomi Pesisir di Yamdena bagian Selatan	63

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	2
Gambar 2.	Kota Saumlaki	3
Gambar 3.	Populasi MTB menurut Kecamatan, 2009	5
Gambar 4.	Persentase Gizi Kurang dan Gizi Buruk di MTB, 2007-2011	10
Gambar 5.	Menangkap ikan di kali untuk acara panen pertama kebun baru dipimpin oleh <i>mangsompe</i>	16
Gambar 6.	Seorang ibu berusia 84 tahun dari Selaru menunggu jualanannya di pasar Saumlaki.	17
Gambar 7.	Penjual umbi-umbian asal pesisir timur laut Yamdena di Kota Tual	17
Gambar 8.	Produk hutan non-kayu	20
Gambar 9.	Jumlah Alat Penangkapan Ikan menurut Jenisnya, 2010	22
Gambar 10.	Mengambil kayu bakar di pantai	23
Gambar 11.	Budidaya rumput laut di Tanimbar Utara.	26
Gambar 12.	Rantai pasar beberapa produk pertanian	27
Gambar 13.	Rantai pasar beberapa produk perikanan	27
Gambar 14.	Ikan tiba dari Seira di Pelabuhan Saumlaki	28
Gambar 15.	Pengambilan di perahu; Penjualan di pasar Saumlaki	28
Gambar 16.	Kios-kios pedagang pengumpul asal Buton dan Bugis di wilayah pelabuhan Saumlaki	29
Gambar 17.	Kapal dan perahu di pelabuhan Saumlaki	30
Gambar 18.	Menenun kain di Matakus	34
Gambar 19.	Jalan dari Lermatang ke Saumlaki	35
Gambar 20.	Desa Lermatang	37
Gambar 21.	Jalan ke sumur air minum	37
Gambar 22.	Denah Desa Lermatang	39
Gambar 23.	Pantai Lermatang	40
Gambar 24.	Denah Desa Lauran	43
Gambar 25.	Jasal aspal membelah desa Lauran	44
Gambar 26.	Nelayan Lauran memperbaiki jaring	46
Gambar 27.	Petani Lauran sedang menunggu angkutan	47
Gambar 28.	Petani Lermatang pulang bersama	47
Gambar 29.	Membersihkan kembili di samping rumah kebun	48
Gambar 30.	Proses penyadapan dan rumah masak tuak di Lauran	49
Gambar 31.	Penyulingan tuak di desa Lauran	50
Gambar 32.	Kegiatan Perempuan di wilayah <i>meti</i>	51
Gambar 33.	Ikan pari tertangkap di sungai	52
Gambar 34.	Sketsa Zonasi Laut pada Masyarakat Lermatang	53
Gambar 35.	Sketsa Zonasi Laut pada Masyarakat Lauran	54
Gambar 36.	Pemanfaatan <i>marine debris</i>	57
Gambar 37.	Menangkap ikan di sungai	58
Gambar 38.	Pepaya dan kembili di sebuah kebun Lermatang	59
Gambar 39.	Kerja Nelayan	60
Gambar 40.	Menunggu pergerakan ikan	61
Gambar 41.	Nelayan Matakus	62

## 1. Pendahuluan dan Lingkup Studi

Studi ini mendeskripsikan masyarakat pesisir di wilayah Laut Arafura dan Timor, dengan pengkhususan pada studi kasus dari komunitas pesisir dan mata pencahariannya di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) Provinsi Maluku, di Indonesia bagian Timur.

Secara umum diakui bahwa Laut Arafura dan Timor kaya akan sumberdaya laut. Eksploitasi kekayaan laut ini tidak hanya oleh nelayan lokal *artisanal small-scale*, tetapi juga oleh perikanan skala besar dengan tujuan pasar regional dan global untuk komoditi perikanan tropis dan bagi produk konsumen. Sudah ratusan tahun masyarakat-masyarakat pesisir yang hidup di sepanjang Laut Arafura dan Timor terlibat dalam pasar dunia lewat produk-produk laut mereka yang berharga tinggi, seperti juga hasil-hasil bumi mereka dari daratan. Walaupun demikian, mereka tetap miskin dan tertinggal. Badan Pusat Statistik nasional mencatat Provinsi Maluku sebagai provinsi termiskin ketiga di Indonesia untuk tahun 2010 berdasarkan *basic needs approach* (Badan Pusat Statistik 2010:7).

Maluku bagian selatan dan tenggara terletak di perairan Laut Arafura dan Timor, dan terdiri dari banyak pulau-pulau kecil dan sangat kecil. Lebih dari 95% populasi terkonsentrasi di wilayah pesisir. Walaupun demikian, hambatan teknologi dan karakteristik *moonsoonal seasons* di region ini membuat komunitas pesisir lokal tidak dapat bergantung dan terlibat dalam *full-time year fishing*, walau penduduk pada pulau-pulau sangat kecil tidak memiliki alternatif selain sebagai nelayan karena akses yang terbatas pada daratan.

Pemerintah di level provinsi maupun nasional telah bersepakat untuk mendorong dan mempromosi program-program yang *sustainable* dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat, namun dalam prakteknya banyak program dengan pendekatan tradisi maupun “modern” tidak *sustainable* secara jangka panjang. Banyak disain dan implementasi kebijakan tidak sesuai dan sulit dioperasikan atau diterapkan karena tingginya diversitas pada aspek geografi, ekologi, sosial and budaya di wilayah ini, serta kurangnya pengetahuan pada kondisi-kondisi lokal.

Studi ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran atau potret masyarakat pesisir di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), khususnya dalam aspek demografi, ekonomi dan sosial-budaya. Studi ini dirancang untuk mengumpulkan informasi demografi dan data statistik yang relevan dan informasi tentang karakteristik mata pencaharian lokal yang berkaitan dengan pengelolaan dan penggunaan sumberdaya darat, pesisir, dan laut. Pendekatan pengumpulan data ini membantu untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang aspek sosial-ekonomi dan budaya di region ini sehingga dapat memfasilitasi pendekatan-pendekatan yang lebih efektif untuk pembangunan masyarakat.

Fokus dari studi ini mencakup bagian selatan dari Pulau Yamdena, yaitu pulau terbesar di Kepulauan Tanimbar dimana terletak Kabupaten MTB, dan memilih desa Lermatang dan Lauran di Kecamatan Tanimbar Selatan sebagai desa sampel. Desa Matakus di kecamatan yang sama yang terletak di sebuah pulau kecil (Pulau Matakus) juga dikunjungi demi mendapat gambaran situasi pulau kecil dan pulau besar, sementara situasi Kepulauan Tanimbar secara umum dipelajari pula.

Tim peneliti terdiri dari empat peneliti sosial dari Universitas Pattimura di Ambon. Metode antropologi umum yang digunakan meliputi observasi, wawancara, diskusi kelompok, dan



riset data sekunder. Di area studi, tim melakukan serangkaian wawancara dan diskusi dengan pemimpin-pemimpin desa dan staff, nelayan dan petani (laki-laki dan perempuan) baik di desa maupun di lokasi-lokasi kebun, sungai, dan wilayah pantai/laut. Diskusi-diskusi juga dilakukan dengan Camat Tanimbar Selatan, dan di tingkat kabupaten, diskusi dilakukan dengan Bupati, kepala-kepala dinas dan staff (Dinas Perikanan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bappeda, Kehutanan, Badan Pengelola Perbatasan, Perindagkop), staff Dinas Kesehatan, dan Kepala Bank Maluku. Tim juga melakukan observasi dan wawancara di pasar kabupaten dan di pelabuhan Saumlaki. Data Statistik tentang kabupaten dan kecamatan diperoleh dari Kantor Statistik Provinsi Maluku di Ambon.

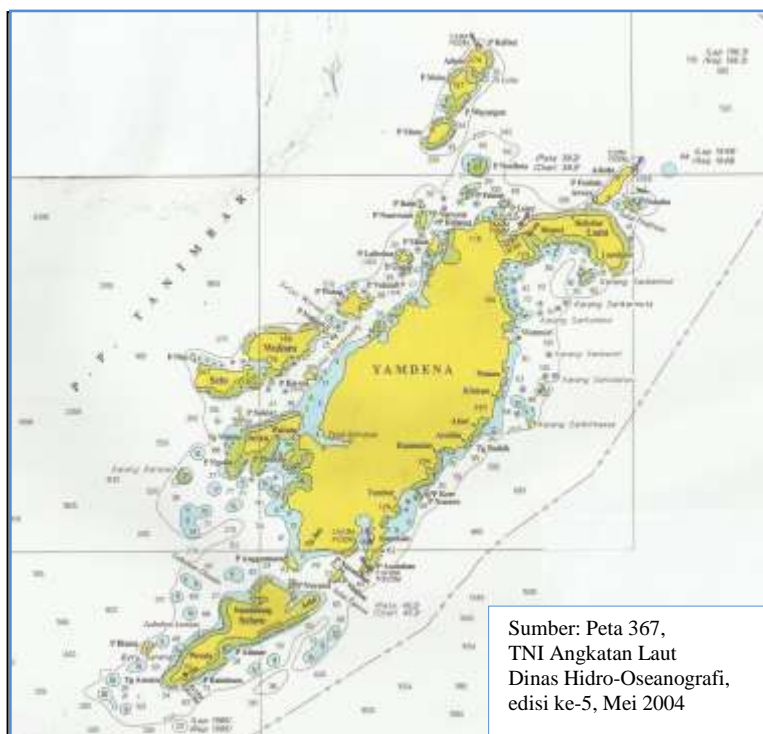
## 2. Gambaran Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat

### 2.1. Letak dan Batas Wilayah

Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) terletak pada  $6^{\circ} - 8^{\circ}30$  Lintang Selatan dan  $125^{\circ}45 - 133^{\circ}$  Bujur Timur, pada posisi Provinsi Maluku bagian selatan. Kabupaten ini berbatasan di sebelah timur dengan Laut Arafura, sebelah selatan dengan Laut Timor dan Negara Australia, sebelah barat dengan Kabupaten Maluku Barat Daya (Gugus Pulau Babar dan Sermata), dan sebelah utara dengan Laut Banda.

Kabupaten MTB merupakan daerah kepulauan yang meliputi seluruh Kepulauan Tanimbar. Kepulauan ini terbentang kurang lebih 135 mil utara ke selatan, berjarak kurang lebih 300 mil ke tenggara dari ibukota provinsi Maluku (Ambon) dan sekitar 300 mil dari Darwin dan pesisir barat laut Australia.

**Gambar 1. Kabupaten Maluku Tenggara Barat**



Terdapat sebanyak 85 buah pulau pada kabupaten ini (BPS Kabupaten MTB 2010a:12) dimana 28 di antaranya tidak dihuni. Sumber lain mencantumkan terdapat sekitar 174 buah

pulau, dengan panjang garis pantai 1623.2695 km (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten MTB 2010). Pulau Yamdena merupakan pulau terbesar dengan panjang kira-kira 75 mil dan lebar 30 mil. Beberapa pulau berukuran lebih kecil, seperti Pulau Selaru, Pulau Larat, Pulau Fordata, Pulau Seira, Pulau Wuliaru, Pulau Selu, Pulau Molu, dan Pulau Maru, serta sejumlah pulau-pulau kecil lainnya. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005, tercatat empat buah pulau di Kabupaten MTB yang merupakan pulau terluar yang berbatasan dengan Negara Australia, yaitu Pulau Selaru, Batarkusu, Asutubun, dan Larat.

## 2.2. Luas wilayah dan Administrasi Pemerintahan

Kabupaten MTB dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara. Ibukota kabupaten adalah Saumlaki. Pada tahun 2008 sebagian wilayah MTB dimekarkan menjadi Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).



**Gambar 2. Kota Saumlaki**

[Photo: H.L. Sospelisa, Aug.2011]

Luas Kabupaten MTB adalah 52,995.20 km<sup>2</sup>, yang terdiri dari wilayah daratan seluas 10,102.92 km<sup>2</sup> (19.06%) dan wilayah laut seluas 42,892.28 km<sup>2</sup> (80.94%). Kabupaten MTB kini memiliki 10 kecamatan, yaitu Kecamatan Tanimbar Selatan, Wertamrian, Wermaktian, Selaru, Tanimbar Utara, Yaru, Wuarlaborar, Nirunmas, dan Molo Maru. Kecamatan kesepuluh, yaitu Kecamatan Molo Maru baru terbentuk tahun 2011, dimekarkan dari Kecamatan Wuarlaborar.

**Tabel 1. Luas Wilayah menurut Kecamatan (km<sup>2</sup>)**

Kecamatan	Darat	Laut	Total Luas Wilayah
Tanimbar Selatan	825,69	3.505,48	4.331,17
Wertamrian	1.298,45	5.512,62	6.811,07
Wermaktian	2.941,16	12.486,79	15.427,05
Selaru	826,26	3.507,90	4.334,16
Tanimbar Utara	1.075,74	4.567,10	5.642,84
Yaru	79,42	337,20	416,62
Wuarlabobar*	1.468,30	6.233,70	7.702,00
Nirunmas	654,74	2.779,71	3.434,45
Kormomolin	933,16	3.961,77	4.894,93
<b>Total</b>	<b>10.102,92</b>	<b>42.892,28</b>	<b>52.995,20</b>

\* termasuk Molo Maru

Sumber: Kabupaten MTB 2009.

Jumlah keseluruhan *settlement* di MTB adalah 86, yang terdiri dari 74 desa, 11 anak desa dan 1 kelurahan. Seluruh pemukiman terletak di pesisir pantai, baik pada pulau kecil maupun pulau besar. Sebagian besar pemukiman berada di pesisir timur Pulau Yamdena.

**Tabel 2. Jumlah desa menurut Kecamatan**

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Desa Induk	Anak Desa	Kelurahan	Total Pemukiman
Tanimbar Selatan	Saumlaki	10	1	1	12
Wertamrian	Lorulun	8	1	-	9
Wermaktian	Seira	9	1	-	10
Selaru	Adaut	6	1	-	7
Tanimbar Utara	Larat	8	1	-	9
Yaru	Romean	6	-	-	6
Wuarlabobar*	Wunlah	13	6	-	19
Nirunmas	Tutukembong	5	-	-	5
Kormomolin	Alusi Kelaan	9	-	-	9
<b>Total</b>		<b>74</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>86</b>

\* termasuk Molo Maru

Sumber: BPS Kabupaten MTB 2010a.

### 2.3. Topografi dan Musim

Bentuk lahan makro di wilayah ini adalah dataran, berbukit, dan bergunung. Kepulauan ini terdiri dari pulau-pulau *lime-stone* dan karang yang umumnya tidak lebih dari 150-250 meter di atas permukaan laut, walaupun Pulau Labobar memiliki gunung setinggi 400 meter (Bezemer in McKinnon 1983). Pulau-pulau kecil terhampar di bagian barat dan utara, dengan ketinggian kurang dari 100 meter. Pulau-pulau ini terpisah oleh selat dengan kedalaman tidak lebih dari 20 meter. Yamdena utara umumnya datar dengan ketinggian kurang dari 50 meter, sedangkan daerah perbukitan di bagian selatan tingginya melebihi 200 meter (BPS Kabupaten MTB 2010a).

Pada pesisir timur Pulau Yamdena yang berhadapan langsung dengan Laut Arafura, tekanan gelombang dan angin musim timur sangat dominan, sehingga deposisi pasir terjadi dan tingkat abrasi pun cukup signifikan pada beberapa tempat. Wilayah pasang surut cukup luas di beberapa wilayah, nampak pada musim barat, terutama bulan Oktober, dimana terjadi “*meti kei*” yg besar. Hutan bakau sebagai salah satu habitat dari ekosistem pesisir dan laut Kepulauan Tanimbar tersebar di pesisir barat dan timur.

Seperti umumnya Kepulauan Maluku, maka Kepulauan Tanimbar mengalami musim timur dan musim barat yang diselingi oleh musim pancaroba. Musim timur berlangsung dari bulan April sampai September, dan merupakan musim kemarau. Musim barat berlangsung pada bulan Oktober sampai Maret, dan memiliki banyak hari hujan. Curah hujan cukup tinggi terjadi pada bulan Desember-Maret. Musim pancaroba terjadi pada bulan Maret/April dan Oktober/November. Suhu rata-rata di MTB adalah 27,6<sup>0</sup>Celcius, dengan suhu minimum 22,4<sup>0</sup>C dan maximum 33,1<sup>0</sup>C (BPS Kabupaten MTB 2010a).

### 3. Demografi

#### 3.1. Jumlah dan Distribusi Penduduk

Jumlah penduduk di Kabupaten MTB menurut data terakhir (tahun 2009) adalah 94.370 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 46.604 jiwa (49,4%) dan perempuan 47.766 jiwa (50,6%). Perempuan sedikit lebih banyak di semua kecamatan.

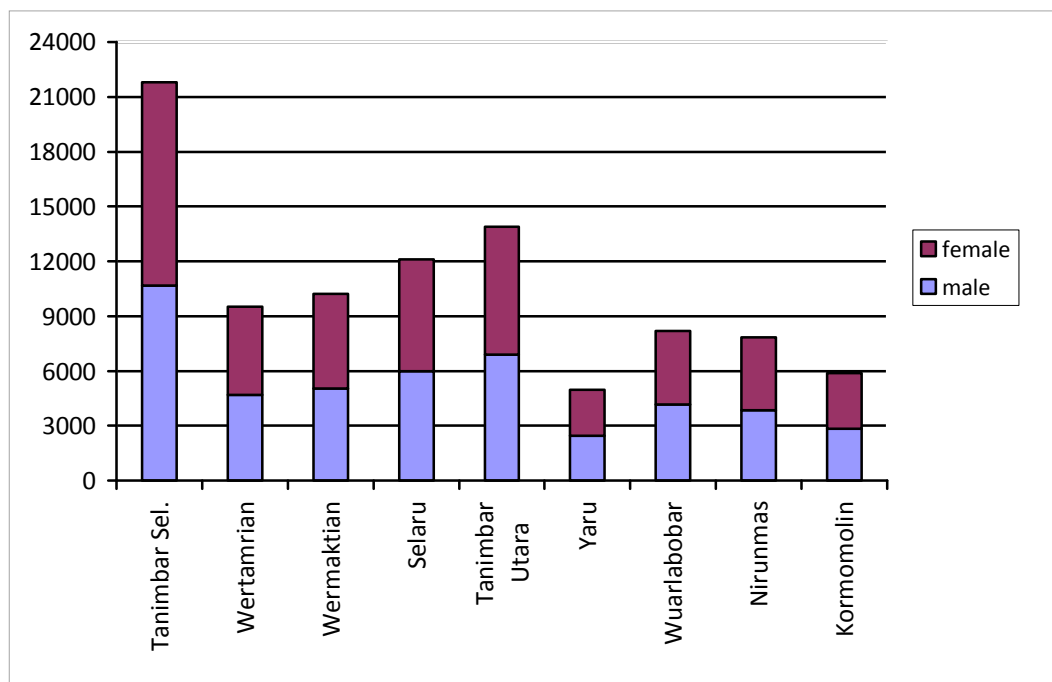
**Tabel 3. Jumlah Penduduk menurut Kecamatan, 2009**

Kecamatan	Pop. menurut gender		Total (2009)	Wilayah Darat (km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk
	Laki-laki	perempuan			
Tanimbar Selatan	10.680	11.123	21.803	825,69	26,4
Wertamrian	4.678	4.830	9.508	1.298,45	7,3
Wermaktian	5.054	5.148	10.202	2.941,16	3,5
Selaru	5.998	6.109	12.107	826,26	14,7
Tanimbar Utara	6.895	7.006	13.901	1.075,74	12,9
Yaru	2.443	2.519	4.962	79,42	62,5
Wuarlabobar*	4.163	4.014	8.177	1.468,30	5,6
Nirunmas	3.854	3.987	7.841	654,74	12,0
Kormomolin	2.838	3.030	5.868	933,16	6,3
<b>Tahun 2009</b>	<b>46.604</b>	<b>47.766</b>	<b>94.370</b>	<b>10.102,92</b>	<b>9,3</b>
Tahun 2008			93.621		9,3
Tahun 2007			93.264		9,2
Tahun 2006			92.523		9,1
Tahun 2005			91.787		9,1

\* termasuk Molo Maru

Sumber: BPS Kabupaten MTB 2010a.

**Gambar 3. Populasi MTB menurut Kecamatan, 2009**



Sebaran penduduk tidak merata. Penduduk terkonsentrasi pada wilayah-wilayah perkotaan dan wilayah yang dekat dengan pusat pemerintahan dan ekonomi, seperti pada kota

kabupaten dan beberapa kota kecamatan. Kecamatan Tanimbar Selatan memiliki jumlah populasi tertinggi, diikuti oleh Kecamatan Tanimbar Utara. Hal ini dikarenakan kedua kecamatan ini merupakan pusat/ibukota kecamatan awal di Tanimbar (sebelum dimekarkan hanya ada dua kecamatan di kepulauan ini, yaitu Kecamatan Tanimbar Selatan dan Tanimbar Utara). Tingkat kepadatan penduduk Kota Saumlaki sebagai ibukota kabupaten dan ibukota Kecamatan Tanimbar Selatan sangat tinggi, yaitu mencapai 283,1 pada tahun 2009 (BPS Kabupaten MTB 2010b:25).

Walaupun jumlah penduduk Kecamatan Yaru merupakan yang terkecil, namun tingkat kepadatan penduduk tertinggi berada pada kecamatan ini (lihat Tabel 3). Hal ini dikarenakan wilayah Kecamatan Yaru hanya terdiri dari sebuah pulau induk berukuran relatif kecil (Fordata) dimana terletak desa-desa pemukiman dan dua pulau sangat kecil, salah satu tidak berpenghuni. Sedangkan kepadatan terendah berada pada Kecamatan Wermaktian yang memang memiliki luas wilayah terbesar yang meliputi sebagian Pulau Yamdena dan rangkaian pulau-pulau di sebelah barat Yamdena. Namun secara rata-rata kabupaten, angka kepadatan penduduk MTB relatif rendah (9,3) dibandingkan dengan angka kepadatan provinsi Maluku (27 orang per km<sup>2</sup>). Pertambahan penduduk dalam lima tahun terakhir pun relatif rendah.

### 3.2. Agama

Tabel 4 menunjukkan bahwa penduduk MTB mayoritas menganut agama Kristen, baik Kristen Protestan maupun Katolik. Agama Katolik terkonsentrasi di tiga kecamatan di pesisir timur (Kormomolin, Wertamrian, dan Tanimbar Selatan), sedangkan penganut Protestan banyak ditemui di Kecamatan Nirunmas, Selaru, dan Wermaktian. Adapun agama Islam yang umumnya dianut penduduk pendatang, ditemui di wilayah Pulau Labobar (Kecamatan Wuarlabobar) dan di dua kota kecamatan awal sebelum pemekaran (Saumlaki di Tanimbar Selatan dan Larat di Tanimbar Utara). Saumlaki dan Larat merupakan dua kota di kepulauan ini yang lebih dari seratus tahun telah menjadi kota yang memberikan pelayanan sebagai pusat pemerintahan dan pusat perdagangan; memiliki penduduk campuran yang terdiri dari penduduk setempat, pegawai pemerintah, para pedagang Cina dan Makassar serta Bugis. Sedangkan penduduk Pulau Labobar didominasi oleh percampuran pendatang yang berasal dari Maluku Utara atau Bugis dan Makassar (McKinnon 1983).

**Tabel 4. Penduduk MTB menurut Agama, 2008**

Kecamatan	Penduduk menurut Agama (%)			Tempat Ibadah		
	Muslim	Protestan	Katolik	Mesjid	Gereja Protestan	Gereja Katolik
Tanimbar Selatan	5,97	40,08	53,95	4	14	18
Wertamrian	0,04	1,27	98,69	-	-	22
Wermaktian	-	83,91	16,09	-	7	1
Selaru	-	91,54	8,46	-	8	2
Tanimbar Utara	2,39	49,96	47,66	1	12	9
Yaru	0,09	79,60	20,31	-	8	3
Wuarlabobar*	29,02	68,70	2,28	4	4	1
Nirunmas	-	92,48	7,52	-	6	2
Kormomolin	-	3,84	96,16	-	2	8
	<b>4,13</b>	<b>47,75</b>	<b>48,13</b>	<b>9</b>	<b>61</b>	<b>66</b>

\* termasuk Molo Maru

Sumber: BPS Kabupaten MTB 2010a.

### 3.3. Bahasa

Terdapat beberapa bahasa lokal dari rumpun Austronesia yang dipakai di Kepulauan Tanimbar, yaitu bahasa Yamdena, Fordata, Selaru, dan Seluwasan (McKinnon 1983; Pusat Pengkajian dan Pengembangan Maluku, Universitas Pattimura & Summer Institute of Linguistics 1996). Bahasa Yamdena memiliki jumlah penutur terbanyak karena dipakai oleh seluruh desa di pesisir timur Pulau Yamdena, dan sebagian orang Adaut dari Pulau Selaru. Bahasa ini terdiri dari dua dialek, yaitu dialek Nus Das di utara dan dialek Nus Bab di selatan (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Maluku, Universitas Pattimura & Summer Institute of Linguistics 1996).

Bahasa Fordata digunakan di Tanimbar sebelah utara, yang meliputi Pulau Fordata, Larat, Molo, Maru, sepanjang bagian barat laut pantai Yamdena dan pulau Sera. Bahasa ini memiliki empat dialek, yaitu dialek Molo-Maru, Fordata-Larat I, Fordata-Larat II, dan dialek Sera (McKinnon 1983:20). Bahasa Fordata merupakan bahasa yang lazim dipakai dalam acara-acara ritual atau adat.

Bahasa Selaru dituturkan di Pulau Selaru, serta sebagian penduduk Latdalam, dan penduduk Lingada di Pulau Wotar di bagian barat Pulau Yamdena, dimana penduduk di desa tersebut berasal dari desa Lingat dan Adaut di Pulau Selaru (McKinnon 1983:19).

Bahasa Seluwasan terdapat di wilayah yang relatif kecil, secara tradisional meliputi desa Makatian, Wermatang, Otemer (Batu Putih dan Marantutul) di Pulau Yamdena bagian barat daya, di Kecamatan Wermaktian. Perbedaan dialek memisahkan Makatian dari ketiga desa lainnya; begitu berbedanya dialek itu sehingga diakui sebagai bahasa tersendiri oleh penduduk setempat (McKinnon 1983; Pusat Pengkajian dan Pengembangan Maluku, Universitas Pattimura & Summer Institute of Linguistics 1996).

Bahasa lain yang digunakan di Kepulauan Tanimbar adalah yang penuturnya berasal dari luar Tanimbar, seperti Jawa, Bugis, Makassar, dan pulau-pulau lain di Maluku (pulau-pulau di Maluku Barat Daya, Kei, Aru, Banda, Ambon, Lease, Seram, dll). Melayu-Ambon atau bahasa Indonesia merupakan bahasa umum yang dipakai dalam komunikasi antar penduduk berbeda etnik.

## 4. Pendidikan

Capaian di bidang pendidikan terkait erat dengan ketersediaan fasilitas pendidikan. Tabel 5. menunjukkan bahwa jumlah Sekolah Dasar (SD) sebagai jenjang pendidikan formal yang terendah jauh lebih besar dari kedua jenjang di atasnya, dan tersebar di banyak pulau sehingga akses untuk anak usia sekolah pada tingkat ini dapat dijangkau. Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin sedikit jumlah sekolah, dan berlokasi pada pusat-pusat pemerintahan dan ekonomi dimana penduduk terkonsentrasi. Hal ini mengakibatkan terjadi migrasi keluar anak usia sekolah menengah atas dan atau mengakibatkan ada yang berhenti sekolah karena ketiadaan akses dan biaya, yang berakibat pada jumlah murid yang lebih sedikit pada jenjang yang lebih tinggi (BPS Kabupaten MTB 2010a:68,71,74). Dengan demikian, semakin tinggi jenjang pendidikan, maka angka partisipasi sekolah semakin rendah, dan semakin tinggi jenjang pendidikan, murid terkonsentrasi pada kota-kota di pusat

pemerintahan dan perdagangan (seperti Saumlaki dan Larat). Hal ini didukung oleh karakteristik region berupa kepulauan dengan sarana pendidikan dan transportasi yang relatif terbatas.

Rasio murid terhadap sekolah dan rasio murid terhadap guru tergolong baik pada kabupaten ini. Walaupun dalam kenyataannya, ketersediaan guru tidak terdistribusi secara merata pada setiap jenis mata pelajaran, dan sering ditemukan bahwa guru tidak betah di wilayah terpencil sehingga sering meninggalkan tempat pekerjaannya.

**Tabel 5. Infrastruktur Sekolah, Rasio Murid/Sekolah dan Murid/Guru, 2008/2009**

Kecamatan	Jumlah Sekolah			Ratio Murid/Sekolah			Ratio Murid/Guru		
	SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA
Tanimbar Selatan	23	14	13	189	101	245	13	6	11
Wertamrian	12	6	2	143	107	104	19	11	9
Wermaktian	12	4	2	166	144	145	20	20	17
Selaru	15	6	1	145	107	186	16	8	8
Tanimbar Utara	17	8	7	147	103	180	17	11	12
Yaru	10	3	1	95	105	74	12	17	4
Wuarlabobar*	17	8	2	116	89	125	15	17	10
Nirunmas	11	5	2	141	88	107	19	9	10
Kormomolin	10	5	1	104	88	139	17	14	13
<b>Total MTB</b>	<b>127</b>	<b>59</b>	<b>31</b>	<b>144</b>	<b>102</b>	<b>187</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>11</b>

Catatan: SD = Sekolah Dasar, SMP = Sekolah Menengah Pertama, SMA = Sekolah Menengah Atas

\* termasuk Molo Maru

Sumber: BPS Kabupaten MTB 2010a.

Selain jenjang pendidikan di atas, di Saumlaki terdapat pula Sekolah Tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Saumlaki (STIAS) dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Saumlaki (STIESA).

Salah satu infrastruktur penunjang pendidikan adalah sebuah perpustakaan kabupaten yang terletak di kota Saumlaki. Perpustakaan ini memiliki koleksi kurang lebih 5000 buku. Pembangunan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan dan kesehatan merupakan salah satu fokus penting dalam pemerintahan Bupati yang sekarang.

## 5. Kesehatan

Derajat kesehatan masyarakat walaupun mulai cenderung meningkat, tetapi belum mencapai standar pelayanan minimal. Misalnya, tingkat kematian bayi (IMR) di kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk tahun 2009 masih cukup tinggi (17,6), di atas IMR rata-rata Provinsi Maluku (8,4) (BPS Provinsi Maluku 2010). Kematian neonatal dalam 3 tahun terakhir meningkat, dan penyebab kematian adalah BBLR, asfiksia, infeksi, serta penyebab lainnya. Sebaliknya, kematian ibu melahirkan menurun; penyebab kematian terbesar adalah perdarahan (Dinas Kesehatan MTB 2011). Dalam tahun 2011 sampai pada bulan Agustus belum ada laporan tentang adanya kematian ibu hamil. Pada tahun-tahun sebelumnya, angka kematian ibu hamil dan bayi di MTB termasuk tinggi, bahkan pernah tercatat pada peringkat nomor dua untuk tingkat provinsi (setelah Pulau Buru).

**Tabel 6. Kematian Neonatal dan Ibu di MTB (2008-2010)**

	<b>2008</b> <b>[orang]</b>	<b>2009</b> <b>[orang]</b>	<b>2010</b> <b>[orang]</b>
Kematian neonatal	20	23	30
Kematian ibu	17	14	10

Sumber: Dinas Kesehatan MTB, 2011

Dari catatan statistik, rata-rata persalinan ditolong oleh bidan (82,6%) dan dukun terlatih (17,4%) (BPS Kabupaten MTB 2010a:88). Walaupun peranan bidan dalam persalinan tinggi, tetapi peranan dukun beranak juga cukup signifikan dalam masyarakat lokal, terutama dengan kondisi geografis kepulauan, di mana fasilitas dan paramedis kesehatan modern terbatas jumlahnya, demikian juga sarana dan prasarana transportasi. Bahkan dari wawancara di desa, ada kecenderungan untuk lebih memilih dukun tidak terlatih daripada dukun terlatih, walaupun pembayarannya lebih tinggi. Hal ini disebabkan pelayanan dukun tidak terlatih terhadap ibu melahirkan dan bayi lebih menyeluruh. Dengan demikian, sistem pengobatan tradisional masih memainkan peranan di wilayah ini, dan dapat mengatasi masalah akses pada pusat-pusat pelayanan kesehatan.

Terhadap masalah akses transportasi dan pelayanan kesehatan, Pemerintah MTB mulai memperkenalkan program ‘rumah tunggu’ dan ‘tabulim’ (tabungan ibu hamil). Program ‘rumah tunggu’ baru mulai dilaksanakan pada tahun 2010 di ibukota kecamatan Selaru (Adaut). Tujuan rumah tunggu ini adalah untuk membantu para ibu melahirkan yang berasal dari desa-desa yang jauh dari fasilitas kesehatan. Penanganan persalinan dilakukan di Puskesmas, dan perawatan dilanjutkan di rumah tunggu yang memakai rumah-rumah penduduk setempat sampai kondisi ibu dan bayi sehat, baru kembali ke desa asal. Adapun program ‘tabulim’ dimaksudkan sebagai program swadaya masyarakat untuk menabung sebanyak Rp.1000/KK/bulan (Pemerintah memberikan modal Rp.1 juta per desa) untuk penyediaan dana bagi transportasi ibu yang hendak melahirkan menuju fasilitas kesehatan terdekat dari desanya. Nampaknya, untuk desa-desa yang dekat dengan perkotaan, program ‘tabulim’ kurang dirasakan manfaatnya, tetapi sebaliknya akan sangat bermanfaat bagi mereka di wilayah yang jauh dari pelayanan kesehatan.

Kematian bayi akibat BBLR sangat berkaitan dengan status gizi anak. Hasil monitoring status gizi balita tahun 2009, menunjukkan masih ada persentase status gizi kurang dan status gizi buruk di MTB, walaupun kecil untuk semua kecamatan. Status gizi anak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan ke arah baik (Gambar 4).

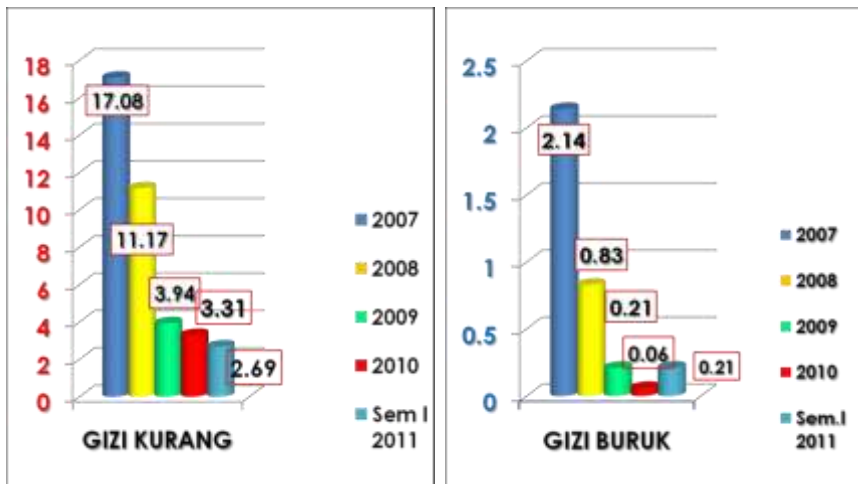
**Tabel 7. Persentase Hasil Monitoring Status Gizi Balita, 2009**

<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Desa yang dimonitoring</b>	<b>Status Gizi (%)</b>		
		Baik	Kurang	Buruk
Tanimbar Selatan	11	97,3	2,7	0
Wertamrian	8	95,7	4,0	0,3
Wermaktian	8	94,8	4,7	0,5
Selaru	6	93,6	6,0	0,4
Tanimbar Utara	8	95,4	4,2	0,4
Yaru	6	96,7	3,0	0,3
Wuarlabobar*	12	94,0	5,9	0,1
Nirunmas	5	95,6	4,1	0,3
Kormomolin	8	97,0	2,7	0,3
<b>Rata-rata</b>	<b>72</b>	<b>95,8</b>	<b>4,0</b>	<b>0,2</b>

Sumber: BPS Kabupaten MTB 2010a (diolah)



**Gambar 4. Persentase Gizi Kurang dan Gizi Buruk di MTB, 2007-2011**



Sumber: Dinas Kesehatan MTB, 2011

Jenis-jenis penyakit yang dialami masyarakat di Kabupaten MTB bervariasi. Ada beberapa penyakit yang menduduki persentase teratas, yaitu infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), penyakit kulit, reumatik, dan malaria (BPS Kabupaten MTB 2010a). Namun dari hasil wawancara, disebutkan bahwa malaria merupakan penyakit yang menonjol di seluruh MTB, di samping tuberkulosis (TB) untuk beberapa wilayah tertentu.

Ketersediaan/akses sarana dan tenaga kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Rumah sakit hanya berada di ibukota kabupaten; rumah bersalin terdapat di Larat. Bila dilihat dari jumlah *settlements*, maka nampak bahwa ada desa dan anak desa (dusun) yang tidak memiliki puskesmas maupun puskesmas pembantu.

**Tabel 8. Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Puskesmas, Pustu, Polindes, 2009**

Sub-District	Rumah Sakit	Rumah Bersalin	Puskesmas	Puskemas Pembantu	Poliklinik Desa
Tanimbar Selatan	1	-	1	7	1
Wertamrian	-	-	1	4	2
Wermaktian	-	-	1	3	-
Selaru	-	-	2	4	-
Tanimbar Utara	-	1	1	3	2
Yaru	-	-	1	2	3
Wuarlabobar*	-	-	1	6	-
Nirunmas	-	-	1	3	1
Kormomolin	-	-	1	3	1
<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>35</b>	<b>10</b>

Sumber: BPS Kabupaten MTB 2010a.

Pelayanan kesehatan yang kurang optimal di kepulauan ini juga dipengaruhi oleh terbatasnya tenaga kesehatan. Selain jumlahnya kurang, distribusi tenaga kesehatan pun menjadi permasalahan besar. Umumnya tenaga dokter hanya tersedia di ibukota kabupaten dan tidak semua ibukota kecamatan memiliki dokter, sehingga sebagian besar penduduk sangat

tergantung pada pelayanan paramedis non-dokter bilamana tersedia (mantri, perawat, bidan, dukun beranak), atau pada sistem medis tradisional.

**Tabel 9. Tenaga Kesehatan di Kabupaten MTB menurut Kecamatan, 2009**

Kecamatan	Petugas Kesehatan				Penduduk		
	dokter	Dokter gigi	Perawat umum	Mama biang	Per 1 dokter	Per 1 <i>dentist</i>	Per 1 perawat
Tanimbar Selatan	6	1	84	32	3.634	21.803	260
Wertamrian	-	-	27	7			352
Wermaktian	1	-	13	2	10.202		785
Selaru	1	-	15	7	12.107		807
Tanimbar Utara	2	-	13	3	6.950		1.069
Yaru	-	-	12	6			414
Wuarlabobar*	-	-	7	1			1.168
Nirunmas	-	-	8	3			980
Kormomolin	-	-	17	1			345
<b>Total MTB</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>196</b>	<b>62</b>	<b>9.437</b>	<b>94.370</b>	<b>481</b>

\* termasuk Molo Maru

Sumber: BPS Kabupaten MTB 2010a (diolah)

Sejalan dengan fasilitas kesehatan, ketersediaan air bersih bagi masyarakat merupakan suatu hal yang penting. Banyak desa di MTB menghadapi masalah ketersediaan air, terutama pada musim kemarau, walaupun ada desa-desa yang melimpah sumber air. Sistem *reservoir* dan pipanisasi untuk melayani masyarakat dilakukan di desa-desa dekat kota Saumlaki dan desa-desa yang memiliki kelimpahan sumber air. Sedangkan desa-desa lainnya tergantung pada sumur-sumur umum maupun pribadi dan air hutan (*air abad*). Umumnya tidak semua sumur di desa dapat dijadikan sumber air minum karena kualitas air yang rendah sehingga hanya dapat dipakai untuk mandi dan mencuci. Sumber air minum kebanyakan terletak cukup jauh dari pemukiman, ke arah interior. Pada musim kemarau, sumur-sumur pada beberapa desa mengalami kekurangan air sehingga masyarakat harus menunggu air naik dan antri untuk mengambil air. Untuk mengatasi masalah air pada beberapa tempat, Pemerintah mulai membangun kolam-kolam penampung air hujan (*embung*).

## 6. Infrastruktur

Terbukanya akses wilayah kepulauan sangat tergantung pada dukungan infrastruktur perhubungan dan komunikasi, dan yang menjadi permasalahan umum di wilayah kepulauan Maluku, termasuk MTB, adalah permasalahan ketersediaan infrastruktur ini dan pelayanannya. Keterbatasan infrastruktur bidang ini diperlemah dengan keterbatasan distribusi infrastruktur ekonomi dan sosial (misalnya pasar, sarana kesehatan dan pendidikan), terutama di wilayah-wilayah desa yang jauh dari pusat-pusat ekonomi dan pemerintahan. Hal ini sangat mempengaruhi pembangunan dan perkembangan ekonomi dan sosial di wilayah-wilayah ini. Pemekaran kabupaten-kabupaten dan kecamatan-kecamatan di wilayah Maluku salah satu tujuan utamanya untuk mengatasi masalah ini.

Transportasi publik yang difasilitasi Pemerintah ke luar Kabupaten MTB dilayani dari Saumlaki (di bagian selatan) dan Larat (di bagian utara), baik melalui udara maupun laut.

Transportasi udara dari dan ke Saumlaki -melalui bandara Saumlaki yang memiliki fasilitas *runway* sepanjang 900 meter dan lebar 30 meter- dilayani oleh tiga maskapai penerbangan,

yaitu Merpati Nusantara Airlines (MNA), Trigana Air, dan Ekspres Air. Pesawat MNA dengan kapasitas penumpang 19 orang melayani route Saumlaki-Tual-Ambon dan Saumlaki-Wonoreli-Ambon masing-masing 2 kali seminggu. Pesawat Trigana dengan jatah penumpang 18 orang melayani route Saumlaki-Tual-Ambon 3 kali seminggu; Saumlaki-Tual ditempuh dalam waktu 50 menit, dan Tual-Ambon dalam waktu 85 menit. Pesawat Ekspres dengan kapasitas 30 penumpang melayani route Saumlaki-Ambon, ditempuh dalam waktu 1 jam 15 menit, dengan jadwal 6 kali seminggu. Route sebaliknya dengan jumlah penerbangan yang sama dilayani untuk masuk Saumlaki. Sedangkan dari dan ke Larat dilayani hanya oleh MNA dengan route Larat-Saumlaki sebanyak 2 kali seminggu, dan Larat-Tual sebanyak 1 kali seminggu. Lapangan terbang Saumlaki yang baru sedang dibangun sekitar 17 km dari Kota Saumlaki, dengan *runway* sepanjang 1700 meter dan lebar 30 meter.

Harga tiket pesawat Saumlaki-Ambon sekali jalan sekitar Rp.1.250.000, dan dapat mencapai Rp.1.600.000 pada *high season*; setiap penumpang hanya diperbolehkan membawa bagasi seberat 15 kg. Dengan harga ini, transportasi udara umumnya melayani kelompok pegawai negeri dan pedagang yang memiliki *income* rata-rata lebih besar daripada masyarakat yang bekerja sebagai petani dan nelayan. Walaupun intensitas penerbangan cukup banyak dibandingkan kabupaten-kabupaten pemekaran lainnya, namun arus penumpang juga cukup tinggi. Petani dan nelayan mengambil jalur laut yang harga tiketnya jauh lebih murah dan dapat membawa bagasi lebih berat, walaupun perjalanan yang ditempuh lebih lama dan tidak nyaman.

Pelabuhan laut Saumlaki memiliki luas jembatan 900 meter x 8 meter dengan luas dermaga 100 m x 8 m. Dermaga sedang dalam pengerjaan perluasan sebesar 50 x 8 m. Pelabuhan ini melayani kapal “Pelni”, kapal “Perintis”, dan kapal penyeberangan (ferry).

Kapal milik PT. Pelni (Pelayaran Nasional Indonesia) yang singgah di pelabuhan Saumlaki sebanyak 2 buah kapal “putih” (karena berwarna putih), yaitu KM Pangrango dengan jadwal 2 minggu sekali dan KM Kelimutu dengan jadwal 4 minggu sekali. Trayek kapal Pangrango menghubungkan Saumlaki dengan Tapa dan Kisar (di Kabupaten Maluku Barat Daya), Kupang (Provinsi NTT), Ambon (ibukota Provinsi Maluku) dan Geser (di Kabupaten Seram Bagian Timur). KM Kelimutu menghubungkan Saumlaki dengan beberapa kabupaten di Provinsi Maluku, seperti Kabupaten Maluku Tenggara (menyingsgahi Tual), Kepulauan Aru (Dobo), Maluku Tengah (Banda), dengan ibukota provinsi (Ambon), dan dengan beberapa provinsi lain, seperti Papua (Timika), Sulawesi Tenggara (Bau-Bau), dan Jawa Timur (Surabaya).

Kapal Perintis yang melayani pelayaran rakyat dalam provinsi Maluku, tidak hanya menghubungkan Saumlaki dengan kota kabupaten dan kecamatan-kecamatan di dalam provinsi Maluku dan dengan ibukota provinsi (Ambon), tetapi juga dengan provinsi lain, yakni NTT (menyingsgahi Kupang), Sulawesi Selatan (Makassar), dan Jawa Timur (Surabaya). Ada 6 buah kapal perintis yang menyingsgahi Saumlaki dengan route yang bervariasi, dua di antaranya menyingsgahi Makassar dan Surabaya melalui Tual tetapi tidak melalui Ambon. Sedangkan sisanya ada yang menghubungkan Saumlaki dan Larat dengan rangkaian pulau-pulau di Kabupaten Maluku Barat Daya (seperti Masela, Dai, Daweloor, Babar, Sermata, Lakor, Moa, Leti, Kisar) dan dengan Tual dan Ambon, serta ada yang menghubungkan ke bagian lain di Maluku bagian tengah seperti Banda dan Geser di Seram timur, bahkan sampai ke provinsi tetangga (Kupang). Semua kapal perintis ini singgah di Saumlaki kira-kira sekali dalam sebulan dengan jadwal yang terkadang tidak menentu,

terutama pada musim laut berombak yang biasanya menjadi penyebab pergeseran atau ketidaktepatan jadwal.

Harga tiket kapal Perintis lebih murah daripada kapal Pelni yang berukuran lebih besar. Kapal “putih” Pelni memberi pilihan beberapa harga kelas, dari kelas 1 sampai kelas ekonomi. Untuk kelas ekonomi, dari Saumlaki ke Ambon orang membayar sekitar Rp.200.000 (dewasa) atau Rp.150.000 (anak-anak) untuk perjalanan 1 siang 1 malam. Sedangkan kapal Perintis dengan harga yang lebih murah (Rp.60.000/orang dewasa, anak-anak tidak membayar) menempuh waktu yang cukup lama, sekitar 3 hari, dengan resiko ketidaknyamanan yang tinggi di dalam kapal karena penumpang penuh sesak. Banyaknya penumpang, terutama yang bertujuan ke kota provinsi karena banyaknya pelabuhan yang disinggahi sebelum menuju Ambon dan harga tiket yang dapat dijangkau masyarakat. Kapal bukan saja mengangkut penumpang, tetapi juga hasil pertanian dan peternakan.

Adapun pelayaran penyeberangan dilayani oleh dua ferry. KMP Egron setiap minggu melayani wilayah MTB bagian barat dengan route Saumlaki-Tepa-Saumlaki-Seira-Wunlah-Larat-Adodo (Pulau Molu) pp, sedangkan KM Kormomolin melayari Larat-Tual seminggu sekali.

Selain itu, pergerakan penduduk melalui laut dari satu pulau ke pulau lain di dalam MTB, atau dari satu desa ke desa lainnya dalam satu pulau untuk berbagai keperluan, dilakukan melalui layanan perahu-perahu motor besar maupun kecil milik pengusaha setempat; biasanya jenis angkutan ini selain membawa penumpang, juga membawa hasil bumi dari pulau-pulau ke Saumlaki, dan kembali membawa sembilan bahan pokok dari Saumlaki ke toko atau kios di pulau. Misalnya, perahu besar (kapasitas 7-8 ton) dari Pulau Seira datang ke Saumlaki dua kali dalam seminggu. Selain dengan perahu-perahu motor besar, penduduk juga menggunakan *speedboat* dengan motor tempel atau perahu dengan motor *ketinting* milik perorangan, maupun perahu layar untuk melayari jarak yang pendek.

Selain melalui laut, desa-desa di MTB dihubungkan dengan jalan darat. Belum semua jalan lingkar pulau atau melintas pulau untuk menghubungkan desa-desa di pulau-pulau selesai dibuat, termasuk di Pulau Yamdena yang merupakan pulau terbesar di MTB dimana ibukota kabupaten dan ibukota beberapa kecamatan terletak. Misalnya, jalan yang menghubungkan desa Lermatang dengan Saumlaki yang berjarak kurang lebih 9 km belum seluruhnya diaspal, sebagian masih melalui jalan tanah yang tidak mulus. Dari data panjang jalan di MTB (Pemerintah Daerah Kabupaten MTB 2011), baru sekitar 25% yang diaspal, sisanya masih berupa jalan kerikil (*sirtu*) dan tanah. Sebagian bahkan dalam kondisi rusak, demikian juga jembatan-jembatan, sehingga sulit dilalui, terutama pada musim hujan. Dengan demikian, transportasi laut masih merupakan alternatif penting, walaupun pada musim-musim laut berombak keras dan angin kencang, menjadi sulit dijalani dan berbahaya, mengingat transportasi laut yang digunakan tidak memadai dalam kondisi laut dan cuaca yang demikian.

Keadaan aksesibilitas transportasi yang demikian ini sangat mempengaruhi aksesibilitas pasar yang merupakan aspek penting untuk menunjang aktivitas ekonomi. Posisi pasar berpusat di Saumlaki dan Larat. Di desa hanya ada kios yang umumnya menyediakan sembilan bahan pokok dan keperluan sehari-hari lainnya dengan pilihan yang terbatas, serta beberapa pedagang perantara (*middlemen*) untuk hasil bumi dan laut bagi pedagang-pedagang yang lebih besar di Saumlaki dan Larat. Masalah aksesibilitas ini menyebabkan ekonomi lokal kurang berkembang. Hal ini diperlemah dengan akses pada pelayanan

komunikasi dan informasi yang terbatas. Pelayanan telekomunikasi SLJJ oleh PT. Telkom tidak menjangkau semua desa. Beberapa rumah di beberapa desa menggunakan satelit penerima, tetapi ada juga yang tidak dapat difungsikan. Jaringan telepon selular yang telah masuk beberapa tahun lalu juga belum dapat dinikmati oleh semua desa secara lancar. Akses informasi yang disediakan oleh televisi nasional maupun swasta pun terkendala oleh belum tersedianya listrik oleh PLN di semua desa. Tidak semua rumah mampu memakai mesin generator (*genset*). Ketersediaan BBM (Bahan Bakar Minyak) di desa terbatas sehingga harganya tinggi. Kendala ketersediaan listrik ini juga berakibat pada pengolahan pasca panen untuk komoditi-komoditi tertentu, seperti ikan.

Infrastruktur penjamin kegiatan ekonomi lainnya seperti bank berada di Saumlaki, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Maluku, dan Bank Danamon. Bank Danamon baru dibuka tahun 2010 khusus untuk Simpan Pinjam. Di Larat terdapat BRI dan Bank Maluku. Bank-bank ini menawari kredit untuk usaha petani dan nelayan di desa-desa. Nasabah untuk tabungan masih didominasi oleh pengusaha dan pegawai negeri. Petani dan nelayan lebih menggunakan jasa bank untuk permintaan kredit bagi aktivitas ekonominya.

Keterbatasan akses, infrastruktur dan informasi yang dihadapi wilayah kepulauan seperti MTB mempengaruhi baik pembangunan ekonomi maupun pembangunan sosial. *High cost economy* menyebabkan barang-barang menjadi mahal; tingkat kemahalan di MTB cukup tinggi. Keterbatasan akses menyebabkan harga hasil bumi dan laut lokal dikontrol oleh pedagang yang lebih memiliki akses. Dari aspek pembangunan sosial, keterbatasan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan seperti yang didiskusikan di bagian terdahulu menyebabkan sebagian masyarakat berada pada posisi *less-developed*.

## 7. Mata Pencaharian Hidup

Sebagian besar pendapatan masyarakat di pedesaan MTB diperoleh dari *resource-based activities*, dalam hal ini aktivitas pertanian, perikanan, dan aktivitas di hutan yang bersifat subsisten. Hidup di wilayah pesisir dengan akses ke darat maupun laut membuat satu rumahtangga tidak mutlak hanya melakukan satu aktivitas matapencaharian, tetapi dapat terlibat dalam lebih dari satu aktivitas. Secara umum, *cash crop* (kopra) dan hasil perikanan merupakan penyumbang utama kebutuhan *cash*, sementara *food crop* walaupun juga menyumbang *cash*, lebih diperuntukkan bagi kebutuhan konsumsi keluarga. Di beberapa desa, sumbangan dari hasil hutan baik kayu maupun non-kayu cukup signifikan bagi pendapatan keluarga, demikian juga peternakan yang dapat berperan sebagai *saving* keluarga, terutama ternak babi.

Data terakhir yang tersedia (2007) menunjukkan bahwa penduduk MTB di atas usia 10 tahun yang bekerja pada sektor pertama (pertanian, kehutanan, perburuan, perikanan) berjumlah 73,1% (BPS Kabupaten MTB 2010a:55). Dari sumber Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten MTB (2010) tercatat bahwa KK tani berjumlah 18.318 KK (76,5%) dari total 23.928 KK.

Sebagian masyarakat MTB juga terlibat dalam produksi industri kecil, seperti sebagai pengrajin patung, anyam-anyaman, kain tenun, dan penghasil kacang botol. Desa yang terkenal dengan produksi patung adalah desa Tumbur. Kain tenun merupakan kerajinan rumahtangga secara turun-temurun, dilakukan oleh kaum perempuan, dan dahulu dilakukan

di semua rumah; masing-masing klen memiliki motifnya sendiri-sendiri. Kain hasil tenunan digunakan sebagai busana adat dalam acara ritual, pesta rakyat, perkawinan, kematian, dan sebagai materi adat dalam perkawinan dan kematian. Saat ini kain tenun juga dibuat untuk buah tangan atau cinderamata kepada orang luar. Sebagian rumahtangga memproduksi kacang tanah yang dimasukkan dalam kemasan botol (kacang botol) untuk dipasarkan di Saumlaki sebagai ole-ole. Industri kecil rumahtangga ini merupakan potensi untuk peluang pengembangan pariwisata demi peningkatan pendapatan masyarakat. Banyak obyek wisata di MTB yang dapat dinikmati, seperti obyek wisata budaya, wisata prasejarah, wisata pantai dan laut, wisata tirta, hutan, goa, serta wisata buatan. Di Saumlaki terdapat kurang lebih 4 hotel sebagai penunjang sektor pariwisata.

Pekerjaan lainnya di masyarakat adalah sebagai pegawai negeri (pegawai pemerintah di kantor dan guru) yang kebanyakan terkonsentrasi di daerah perkotaan, dengan *income* reguler (gaji per bulan) lebih besar dari rata-rata pendapatan per bulan masyarakat desa dari hasil berdasarkan musim. Pendapatan yang reguler bersifat lebih menjamin tujuan ke depan daripada pendapatan yang tidak reguler (sesuai musim) seperti pada aktivitas pertanian dan perikanan. Walaupun demikian, kehadiran pegawai negeri memberi keuntungan bagi petani dan nelayan karena turut berkontribusi pada pendapatan mereka dalam kaitannya dengan peran pegawai sebagai konsumen, terutama untuk bahan pangan.

Dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya, masyarakat MTB juga memberlakukan sistem *sasi*. *Sasi* merupakan salah satu sistem lokal dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam, baik di darat maupun di laut, yang dikenal di seluruh Maluku. *Sasi* didefinisikan sebagai suatu larangan untuk mengambil sumberdaya alam tertentu dalam daerah tertentu dan untuk suatu jangka waktu tertentu demi menjamin hasil panen yang lebih baik (lihat Soselisa 2001). *Sasi* diberlakukan pada sumberdaya – tumbuhan dan hewan – di darat (seperti kelapa, nenas, pinang, kuskus, rusa dan kemiri) dan di laut (seperti ikan, lola, teripang). Pada masa kini banyak desa di Maluku sudah tidak mempraktikkan sistem *sasi* ini lagi. Sebagian desa-desa di MTB masih memberlakukan *sasi*, baik di darat maupun di laut, seperti pada kelapa, teripang, dan lola. Lamanya tutup *sasi* bervariasi sesuai dengan jenis sumberdaya yang *disasi* dan kesepakatan di masyarakat.

## 7.1. Pertanian

Sebagai masyarakat pesisir, ekonomi lokal didominasi oleh sektor pertanian dan perikanan. Di sektor pertanian, tanaman pangan, khususnya umbi-umbian, kacang-kacangan, jagung, sayur-sayuran, dan padi ladang ditemui di semua kecamatan. Di Maluku, Kepulauan Tanimbar dikenal dengan umbi-umbian, seperti kembang ( *Dioscorea esculenta* ), ubi ( *Dioscorea lata* ), dan keladi ( *Xanthosoma esculentum* ). Sebagian besar rumahtangga mengusahakan kebun, baik kebun umur pendek maupun umur panjang.

Metode pembukaan lahan untuk ladang/kebun dengan sistem *slash and burn*, menggunakan teknik dan teknologi lokal tradisional, dan umumnya masih dipengaruhi oleh adat-istiadat yang mengatur hubungan antara manusia dengan tanah/lahan yang akan diusahakan. Pembukaan kebun baru pada beberapa desa masih menggunakan prosedur yang ditetapkan dalam adat walaupun telah mengalami beberapa perubahan. Ketika kebun baru akan dibuka, upacara dan *pameri* (penebasan dan pembersihan) serta penebangan dipimpin oleh seorang *mangfaluru* (tuan kebun), yaitu seseorang yang memiliki hak atas wilayah yang dibuka, sehingga harus seijinnya. Ia juga akan berperan dalam pengambilan panen pertama dari

kebun pertama dimana dilakukan acara makan bersama. Di samping itu, seorang *mangsompe* (pendeta adat/pembawa doa) juga berperanan dalam ritual pertanian, dimana ia berfungsi sebagai penghubung tanah, manusia dengan para leluhur dan dunia supernatural, untuk meminta ijin dan perlindungan serta berkat dari mereka bagi kegiatan perladangan yang dilakukan.



**Gambar 5. Menangkap ikan di kali untuk acara panen pertama kebun baru dipimpin oleh *mangsompe*** [Photo: H.L. Sospelisa, Aug.2011]

Dalam sistem *shifting cultivation* ini, hutan (*alas/alis*) dibuka, dan setelah ditanami selama kurang lebih tiga tahun, akan ditinggalkan untuk diistirahatkan selama 10-20 tahun. Pada kebun tahun pertama (*let beberi*) tanaman yang mendominasi adalah ubi (*Dioscorea lata*), sedangkan kebun tahun kedua (*let lolobar*) didominasi oleh kumbili (*Dioscorea esculenta*), dan kebun tahun ketiga (*let wasi*) didominasi oleh ubi kayu (*Manihot esculenta*). Setelah itu *let wasi* diistirahatkan sebagai bekas kebun. Setelah masa bero, tanah tersebut akan dibuka kembali sebagai kebun, sebagai *let beberi*. Namun bila pada kebun tahun pertama telah ditanami tanaman umur panjang, seperti kelapa (dengan jarak tanam kurang lebih 8-10 meter), maka setelah tahun ketiga lahan itu dibiarkan sebagai kebun umur panjang (*ampat werain*).

Pada masa kini, periode masa bero semakin pendek karena orang cenderung mencari lahan kebun yang dekat dengan pemukiman, sementara hutan primer berada sangat jauh dari desa. Walaupun demikian, dengan pembukaan jalan-jalan raya baru, jarak tempuh petani ke kebun-kebun mereka dapat diperpendek dengan menelusuri jalan-jalan raya yang bebas rintangan semak belukar atau dengan menumpang ojek. Dahulu kebun dibuka dari hutan primer, kini umumnya dari hutan sekunder hasil masa bero yang panjang atau bekas pembukaan hutan untuk pengambilan kayu. Dengan penambahan penduduk, maka di masa depan dapat terjadi konflik atas tanah, ketika bekas-bekas kebun umur pendek menjadi kebun-kebun kelapa yang merupakan sumber penting pendapatan dari *cash crop*, dan orang harus membuka kebun-kebun pangan baru atau melakukan rotasi di dalam satu lahan kebun yang menyebabkan ukuran kebun menjadi kecil sehingga berakibat pada kuantitas panen, ataupun mengintensifikasikannya yang dapat berakibat pada menurunnya kesuburan tanah dan kualitas panen.

Sistem kultivasi yang dilakukan petani lokal meliputi penebasan, penebangan, pembakaran, pengolahan tanah, penanaman dengan jarak tanam sesuai jenis tanaman, penyiangan, panen, dan pasca panen. Waktu tanam di kebun dipengaruhi oleh musim. Pembukaan kebun baru biasanya dilakukan pada bulan Oktober, dan pembakaran dilakukan pada bulan November. Pada bulan Desember ketika hujan pertama musim barat, orang mulai menanam jagung, dan diikuti dengan menanam ubi dan lainnya. Panen umbi-umbian pada bulan Agustus, diikuti dengan penanaman baru untuk nanti dipanen pada tahun berikutnya. Tugal (*sayal*) dipakai lelaki untuk menggali lubang, sedangkan perempuan memasukkan bibit ubi atau kembili ke lubang tersebut. Alat lain yang dipakai dalam penanaman adalah parang, pacul, dan linggis. Tanaman semusim yang dapat ditemui di kebun adalah antara lain umbi-umbian (ubi, kembili, keladi, ubi jalar, ubi kayu), sayur-sayuran, kacang-kacangan (kacang tanah, kacang hijau, kacang merah), jagung, dan padi, serta beberapa tanaman buah. Pisang biasanya ditanam di sekeliling kebun sekaligus sebagai pagar. Pada kebun dengan tanah yang berbatu, pepaya merupakan pilihan yang baik.

Hasil kebun/ladang yang beraneka jenis ini diperuntukkan bagi konsumsi keluarga dan untuk dijual. Kebun dengan sistem ladang yang *policrop* ini dimana waktu panen tanaman berbeda-beda menjamin keamanan pangan (*food security*) rumahtangga untuk konsumsi harian, di samping dapat dipasarkan untuk menyokong kebutuhan sehari-hari akan *cash* walaupun tidak dalam jumlah besar. Perempuan-perempuan penjual umbi-umbian dan sayur-sayuran di pasar Saumlaki yang datang dari desa-desa yang relatif jauh, seperti dari Adaut di Pulau Selaru, ada yang menginap di tempat jualan mereka di pasar sampai barang jualan mereka habis; biasanya bisa dua atau tiga minggu lamanya. Mereka tidur berkelompok di satu stan jualan yang disewa bersama dan mandi di kamar mandi umum yang ada di pasar. Selain di pasar lokal, umbi-umbian juga sampai ke luar kabupaten; misalnya orang Yamdena bagian utara menjualnya di Kota Tual (Kabupaten Maluku Tenggara). Di sana mereka pun tinggal berminggu-minggu sampai karung-karung berisi jualan mereka habis.



**Gambar 6. Seorang ibu berusia 84 tahun dari Selaru menunggu jualan di pasar Saumlaki.** [Photo: H.L.Soselisa, Aug.2011]



**Gambar 7. Penjual umbi-umbian asal pesisir timur laut Yamdena di Kota Tual** [Photo: H.L.Soselisa, Oct. 2007]



Dahulu babi hutan merupakan salah satu hama, tetapi masa kini dengan pembukaan jalan-jalan raya, hama ini mulai berkurang. Babi hutan merupakan salah satu sumber pangan daging yang digemari penduduk dan laku dijual di kota.

Tanaman perkebunan atau *cash crop* yang diusahakan petani MTB adalah kelapa, jambu mete, kemiri, kopi, dan *cacao*. Kelapa dalam bentuk kopra merupakan salah satu penyumbang utama *income* rumahtangga.

**Tabel 10. Rumahtangga Petani, Luas Areal dan Produksi Kelapa, 2009**

Kecamatan	Rumahtangga Petani Kelapa	Luas Areal Tanaman (ha)	Produksi (ton)
Tanimbar Selatan	3.551	2.730	3.543
Wertamrian	1.882	2.684	3.919
Wermaktian	1.593	2.999	4.119
Selaru	2.121	3.068	4.073
Tanimbar Utara	1.976	2.671	3.336
Yaru	899	2.204	3.304
Wuarlabobar*	1.208	2.039	2.878
Nirunmas	1.251	2.443	3.747
Kormomolin	1.229	2.052	3.504
<b>Total</b>	<b>15.710</b>	<b>22.890</b>	<b>32.423</b>

\* termasuk Molo Maru

Sumber: BPS Kabupaten MTB 2010a.

Data lain menunjukkan sedikit perbedaan dalam hal areal kelapa. Data pemerintah tahun 2011 (Pemerintah Daerah Kabupaten MTB, 2011), menunjukkan bahwa dari luas lahan potensial untuk kelapa sebesar 164.226 hektar di kepulauan ini, baru terpakai 2.296 (1,4%). Walaupun sedikit, kopra tetap merupakan hasil perkebunan yang terbanyak produksinya dan menjadi andalan *cash crop* di bidang pertanian, sehingga menjadi perhatian Pemerintah kabupaten untuk dikembangkan, misalnya adanya rencana pengadaan pabrik minyak kelapa.

Dalam setahun kelapa dipanen 3 kali untuk diproduksi menjadi kopra. Namun bila ada keperluan mendesak akan *cash* untuk kebutuhan harian, maka orang dapat membuat kopra setiap saat dalam jumlah yang tidak banyak, biasanya dengan mengumpulkan kelapa kering yang jatuh. Untuk mendapatkan kualitas dan kuantitas kopra yang baik, maka *sasi* ditutup untuk kelapa selama 4 bulan. Pengolahan kopra melibatkan tenaga kerja rumahtangga atau kelompok kerja, ataupun ada yang melibatkan tenaga yang disewa. Petani yang memiliki lahan kelapa yang besar dapat menghasilkan lebih dari satu ton kopra.

Kopra telah diusahakan sejak lama. Pada era penjajahan Belanda, usaha perkebunan kelapa (*onderneming*) dilakukan di beberapa pulau kecil, seperti Matakus, dan pulau-pulau di barat laut Yamdena, namun kini perkebunan kelapa peninggalan masa Belanda tidak beroperasi lagi.

Ada kecenderungan produksi kopra menurun pada masa kini; gerakan *replanting* juga kurang. Kemungkinan hal ini disebabkan oleh turunnya harga kopra, sehingga masyarakat berkonsentrasi pada komoditi dan usaha lain, misalnya pada rumput laut. Pada tahun belakangan ini harga kopra menurun drastis dari Rp.5000-Rp.6500/kg menjadi sekitar Rp.2.800-Rp.3000/kg di tingkat petani di desa (harga di Saumlaki Rp.4000/kg). Pada

beberapa desa, seperti Lauran, ditemukan konversi produksi kelapa dari kopra ke minuman keras lokal (tuak/*sopi*). Harga tuak cukup mahal, yaitu Rp.10.000/botol dan dalam 1 minggu kerja dapat menghasilkan 60 botol. Di samping itu pengolahan tuak lebih mudah dan cepat, tidak memerlukan tenaga kerja yang banyak, dapat dilakukan oleh hanya tenaga kerja rumahtangga, seperti suami-istri; istri dapat membantu suami menyuling tuak. Selain itu tanaman kelapa untuk tuak juga dapat ditanam di dalam desa, di halaman rumah, sehingga dapat dikerjakan dekat rumah, tidak memerlukan waktu untuk ke kebun yang jauh. Untuk produksi tuak, kelapa hibrida kini banyak ditanam menggantikan kelapa lokal karena dalam waktu 3 tahun sudah berproduksi, sudah dapat disadap, di samping mudah dan cepat dipanjat karena tidak terlalu tinggi.

Unit produksi dalam pekerjaan pertanian adalah keluarga. Semua terlibat dari mulai penanaman sampai pemanenan. Anak-anak sepulang sekolah sering mengikuti orangtuanya di kebun untuk membantu.

Pekerjaan petani sering dikombinasikan dengan pekerjaan beternak dan perikanan. Ketika musim kemarau panjang menyerang, petani tidak dapat bergantung kepada hasil pertanian karena gagal panen terjadi, sehingga kombinasi mata pencaharian diperlukan. Beternak merupakan strategi *saving* dikala diperlukan *cash*. Hewan yang dipelihara antara lain babi, kambing, ayam, anjing, dan juga sapi. Babi banyak dipelihara karena harga jualnya cukup tinggi, dapat mencapai 1 juta rupiah. Hewan ini merupakan materi penting dalam acara-acara adat, seperti perkawinan, kematian atau acara-acara adat lainnya sehingga permintaan akan hewan ini tinggi dan stabil. Babi peliharaan dikandangkan di pinggir kampung, baik ke arah hutan maupun laut. Pemeliharaan ternak dapat dilakukan oleh semua anggota keluarga, seperti ayah, ibu, atau anak-anak; mereka dapat bergantian memberi makan ternak.

Pada beberapa tahun belakangan ini di MTB menyebar penyakit rabies yang menimbulkan kematian warga, sehingga kini masyarakat kurang memelihara anjing. Selain untuk dikonsumsi, anjing berfungsi sebagai penjaga rumah dan binatang peliharaan. Selain itu anjing juga dilatih sebagai anjing pemburu di hutan.

## **7.2. Kehutanan: Kayu dan Non-Kayu**

Hutan MTB menyediakan sumberdaya kayu dan non-kayu yang dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan sendiri (rumah tangga dan desa) atau untuk dijual. Kayu ditebang untuk keperluan lokal, misalnya membangun rumah atau gedung ibadah dan fasilitas umum desa. Selain itu juga untuk dijual keluar desa, baik kepada pedagang-pedagang lokal keturunan Cina maupun untuk pedagang Bugis dan Buton di kota Saumlaki. Harga kayu bervariasi tergantung pada jenis kayu. Beberapa jenis yang biasanya diambil adalah kayu besi (*Intsia bijuga*), lenggua (*Pterocarpus indicus*), gofasa (*Vitex gofusus*), matoa (*Pometia pinnata*), eboni, kenari, *kanawa*, *weman*, *suriang*, kayu putih, dan *torem* (*Manilkara kanosiensis*). Yang disebut terakhir merupakan jenis kayu endemik, di Indonesia hanya terdapat di hutan MTB. Kayu-kayu ini ada yang diperuntukan sebagai material bangunan, *furniture*, dan untuk kerajinan patung (eboni, *kanawa*, *torem*). Di Maluku, kerajinan patung MTB sudah lama dikenal, konsumennya bukan saja di dalam Maluku, tetapi di nasional dan internasional. Kerajinan ini telah diusahakan secara turun-temurun sejak ribuan tahun lalu; motif patung menggambarkan kebudayaan masyarakat MTB. Desa yang terkenal dengan kerajinan patung ini adalah desa Tumbur, selain itu desa Wowonda, Amdasa dan Kilon juga merupakan lokasi pengrajin patung.

Beberapa desa memberlakukan *sasi* hutan untuk melindungi kayu-kayu tertentu dari ekstraksi yang berlebihan. Misalnya, ketika permintaan naik pada *akar kuning* beberapa tahun lalu untuk pewarnaan batik di Jawa, pemerintah desa mengatur pengambilan sumberdaya ini untuk mencegah over-ekstraksi pada tanaman ini. Pada desa-desa tertentu ada pengaturan-pengaturan dalam pengambilan kayu-kayu tertentu. Di desa Lermatang, lima jenis kayu dilarang untuk dijual keluar desa, hanya diperbolehkan untuk penggunaan dalam desa. Menurut mereka pengaturan ini telah berlangsung sejak lama sebagai “janji leluhur” yang harus dijalankan. Kelima jenis kayu tersebut adalah kayu *torem*, kayu besi, *gupasa*, *kanawa*, dan *weman*. Pada desa-desa dekat perkotaan Saumlaki, banyak hutan yang telah berkurang, karena over-ekstraksi atau dikonversi untuk kegunaan lain.

Produk hutan non kayu (NTFP) yang dimanfaatkan masyarakat adalah tumbuhan dan hewan. Penggunaannya sebagai bahan makanan (sagu, kemiri, kenari, sayuran hutan (seperti melinjo), pinang, kerbau liar, babi hutan, kuskus, *soa-soa*, musang), bahan bangunan (daun atap, rotan, bambu), bahan anyaman (bambu, daun tikar), obat-obatan (tanaman-tanaman obat), dan kegunaan *pleasure* (bunga anggrek, burung kakatua, burung nuri). Di antara produk-produk ini, sebagian untuk keperluan sendiri, sebagian untuk dijual. Anyam-anyaman menghasilkan keranjang, bakul, peralatan dapur, alat tangkap ikan, tas, maupun topi. Sebagian dijual di pasar lokal dan ada yang diproduksi berdasarkan pesanan. Kerbau liar, babi hutan, rotan dan burung, serta anggrek hutan ditangkap dan dicari untuk dijual. Mereka menjualnya di pasar lokal bagi yang berminat, tetapi untuk burung bahkan diperdagangkan sampai ke luar MTB. Beberapa di antara komoditi ini kini dilarang oleh Pemerintah untuk diperjualbelikan dan dibawa keluar MTB, seperti burung kakatua, burung nuri, dan bunga anggrek karena dikhawatirkan kelestariannya. Ketika permintaan akan kemiri melonjak pada beberapa tahun lalu, desa-desa tertentu memberlakukan *sasi* hutan untuk kemiri. Produk hutan non-kayu cukup memberikan sumbangan pendapatan bagi masyarakat.



[Photo: H.L.Soselisa, Aug.2011]



[Photo: P.S.Soselisa, Aug.2011]

**Gambar 8. Produk hutan non-kayu**

Pekerjaan di hutan sebagian besar dilakukan oleh laki-laki. Dalam budaya MTB dan Maluku pada umumnya, hutan yang jauh dari pemukiman (rumah) merupakan wilayah laki-laki dan pekerjaan berburu di hutan dilihat sebagai pekerjaan laki-laki. Namun demikian, kaum perempuan juga masuk hutan untuk mengambil sayuran, daun tikar, dan tumbuhan untuk obat-obatan.

Luas hutan di MTB tercatat sebesar 425.812,81 hektar (Pemerintah Daerah Kabupaten MTB 2011). Kawasan hutan ini dibagi menurut luas dan peruntukannya.

**Tabel 11. Luas Hutan dan Penggunaannya di Kabupaten MTB**

Penggunaan	Luas (ha)	%
Hutan lindung	10.445,73	2,45
Hutan suaka/wisata	75.093,05	17,64
Cagar alam	720,52	0,17
Hutan produksi	115.267,39	27,07
Hutan produksi terbatas	63.865,03	15,00
Hutan produksi konversi	155.530,61	36,52
Areal penggunaan lainnya	4.890,48	1,15
<b>Total</b>	<b>425.812,81</b>	<b>100</b>

Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten MTB 2011

### 7.3. Perikanan

Sebagai wilayah kepulauan dimana desa-desanya terletak di pesisir, maka masyarakat pedesaan MTB pun terlibat dalam kegiatan nelayan. Rumahtangga perikanan tercatat sebanyak 4411 KK (BPS Kabupaten MTB 2010a). Bila mengacu pada jumlah rumahtangga MTB sebanyak 23.928 KK (Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten MTB 2010), maka rumahtangga nelayan hanya sebanyak 18,4% dari total KK, dan persentasi nelayan hanya 13,4% dari total populasi MTB (lihat Tabel 12). Angka dan persentasi dari rumahtangga dan jumlah nelayan ini dapat dipertanyakan lebih lanjut, mengingat sebagai masyarakat kepulauan yang hidup di pesisir, masyarakat MTB umumnya melakukan pekerjaan ganda, yaitu kedua profesi (sebagai petani dan nelayan) dijalankan bersama-sama dengan memperhitungkan musim.

**Tabel 12. Jumlah Rumahtangga Nelayan dan Nelayan, 2009**

Kecamatan	Rumahtangga Nelayan	Nelayan	
		Jumlah Nelayan	% Nelayan dari Total Populasi
Tanimbar Selatan	975	2.935	13,5
Wertamrian	123	529	5,6
Wermaktian	821	1.942	19,0
Selaru	634	2.318	19,1
Tanimbar Utara	675	2.255	16,2
Yaru	164	418	8,4
Wuarlabobar*	843	1.808	22,1
Nirunmas	80	257	3,3
Kormomolin	96	201	3,4
<b>Total</b>	<b>4411</b>	<b>12.663</b>	<b>13,4</b>

\* termasuk Molo Maru

Sumber: BPS Kabupaten MTB 2010a; (Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Peternakan Kab. MTB 2010)

Pada wilayah pulau-pulau kecil di luar Pulau Yamdena, aktivitas perikanan menunjukkan intensitas yang cukup tinggi. Sebagian memiliki komoditi unggulan tertentu, misalnya di Pulau Sera dan sekitarnya merupakan penghasil ikan asin kering untuk pasar luar MTB terutama pada beberapa tahun yang lalu. Sektor perikanan merupakan penyumbang penting *income* keluarga. Dari perkiraan potensi perikanan tangkap di perairan MTB sebesar 90.979,99 ton/tahun, yang dimanfaatkan tercatat sebesar 36.353,98 ton (Pemerintah Daerah Kabupaten MTB 2011).

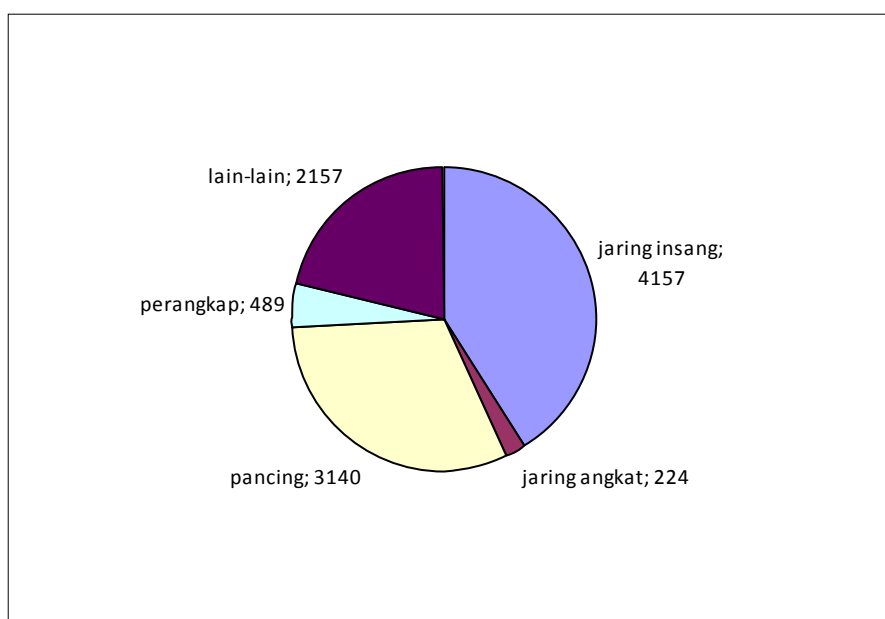
**Tabel 13. Potensi dan Jumlah Tangkapan beberapa Kelompok Sumberdaya, 2010**

Sumberdaya	Potensi (ton)	Jumlah tangkapan (ton)
Pelagis besar	33.117,54	13.247,01
Pelagis kecil	21.182,39	8.472,95
Demersal	36.010,06	14.404,02
Ikan karang	500	200
Udang	120	20
Cumi-cumi	50	10
<b>Jumlah</b>	<b>90.979,99</b>	<b>36.353,98</b>

Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten MTB 2011

Teknologi dan metode penangkapan ikan yang dipakai nelayan lokal MTB, antara lain pancing, tombak, *bubu*, *sero*, bagan, jala, dan jaring; menggunakan perahu, menyelam, dan berjalan di wilayah surut. Aktivitas penangkapan ikan sangat berkaitan dengan musim. Data alat penangkapan ikan menurut jenisnya dari Dinas Perikanan Kabupaten MTB untuk tahun 2010 dapat dilihat di bawah ini.

**Gambar 9. Jumlah Alat Penangkapan Ikan menurut Jenisnya, 2010**  
(Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten MTB).



Jenis sumberdaya tertentu dipanen pada waktu-waktu tertentu melalui sistem *sasi*, seperti teripang dan *lola* (*Trochus niloticus*). *Trochus* dan teripang merupakan komoditi pasar yang memiliki nilai tinggi. Waktu tutup *sasi* bervariasi pada desa-desa, sesuai dengan kesepakatan bersama; lamanya berkisar dari 1 sampai 5 tahun.

Seperti halnya *petuanan* di darat, masyarakat MTB juga mengenal *petuanan* laut (lihat Sospelisa 2005). Bila *petuanan* darat dibagi ke dalam tanah-tanah *soa* (kelompok yang terdiri dari beberapa matarumah/*fam*), maka wilayah laut dimiliki secara komunal oleh desa. Warga desa memegang hak mengelola dan hak pakai dimana di dalamnya terkandung kewajiban-kewajiban untuk menjaganya. Umumnya sebuah desa memperbolehkan masyarakat tetangga (masyarakat lokal MTB) untuk masuk ke wilayah lautnya untuk mengambil ikan. Hal ini disebabkan konsep bahwa ikan merupakan *mobile resources* yang bergerak dari satu desa ke desa lainnya sehingga satu desa tidak bisa mengklaim kepemilikannya. Namun bila menyangkut *immobile resources*, seperti teripang dan *lola*, maka warga luar tidak dapat mengambilnya tanpa seijin desa yang bersangkutan. Bahkan dalam pelaksanaan *sasi*, hak mengambil dari si pemegang hak juga diatur. Konflik yang timbul akibat pelanggaran suatu peraturan, akan diselesaikan di tingkat pimpinan desa. Bila pelanggaran dikategorikan sebagai pidana murni dapat dibawa kepada pihak berwajib di bawah hukum positif.

Masyarakat pesisir MTB membagi lautnya dalam zona-zona berdasarkan pengetahuan biofisik lokal, dan pembagian ini disertai dengan pengetahuan dan pengaturan tentang sumberdaya yang ditangkap, waktu dan lokasi penangkapan, teknologi dan teknik yang digunakan, serta siapa yang melakukan. Daerah pasang-surut merupakan zona laki-laki dan perempuan, zona orang dewasa dan anak-anak, sedangkan daerah laut dalam adalah zona laki-laki (dewasa). Pada waktu surut besar (*meti*), perempuan dan anak-anak mencari ikan dan siput. Siput juga dicari di daerah bakau, dan sebagian dipasarkan di pasar Saumlaki. Hutan bakau banyak ditemui di wilayah pantai MTB, dan salah satu pemanfaatan bakau oleh penduduk adalah sebagai kayu bakar. Bila dilakukan terus-menerus dan berlebihan, maka akan mempengaruhi kelangsungan sumberdaya ini.



**Gambar 10. Mengambil kayu bakar di pantai**

[Photo: H.L.Sospelisa, Aug.2011]

Aktivitas *destructive fishing* dan *illegal fishing* masih berlangsung di perairan MTB. Hasil wawancara menyatakan bahwa kegiatan menggunakan bahan peledak dilakukan oleh nelayan dari luar MTB. Nelayan lokal pada desa tertentu menggunakan akar tuba untuk menangkap ikan pada wilayah tertentu dan pada saat-saat tertentu, misalnya bila ada suatu perayaan di desa dan dibutuhkan ikan dalam jumlah yang cukup untuk disajikan dalam acara tersebut.

*Illegal fishing* dan *entry* banyak terjadi di perairan pulau-pulau di sepanjang pesisir barat, terutama di bagian barat laut. Aktivitas *illegal fishers* meningkat pada musim barat, sekitar bulan Agustus-November, ketika puncak panen perikanan terjadi di perairan tersebut. Target mereka adalah pada jenis-jenis ikan tertentu, seperti *karapu*, *mamin*, dan *napoleon*. Ikan hiu juga dikejar di sekitar Pulau Barasadi, di sebelah barat daya Pulau Seira.

Arah masuk nelayan luar ke perairan barat MTB umumnya melalui jalur selatan, yaitu dari arah Pulau Timor, Alor, Flores, dan Bali. Menurut informan, nelayan luar ini di antaranya berasal dari Bali, Banyuwangi, Alor. Di antara mereka, ada yang masuk dan tinggal di desa-desa pendatang Muslim di Pulau Labobar dan sekitarnya, seperti desa Kilon, Karatat, dan Labobar.

Selain itu, nelayan dari MTB juga terlibat dalam *cross-boundary fishing* ke wilayah Australia, terutama pada beberapa tahun lalu. Mereka biasanya merupakan anak buah kapal atau perahu nelayan milik pengusaha lokal keturunan China, pengusaha asal Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Di antara mereka bahkan ada yang tertangkap dan dibawa ke Darwin. Target yang dicari adalah sirip hiu. Harga sirip hiu di pasar Saumlaki berdasarkan ukuran dan jenis berkisar dari Rp.50.000/kg untuk ukuran terkecil (5 cm ke bawah) sampai dengan ukuran terbesar (50 cm ke atas) dari jenis termahal (*panru putih*) mencapai Rp.1.600.000/kg. Kekuatan pasar ini mendorong nelayan melaut lebih jauh untuk mengejar target tersebut. Menurut informan di Lermatang, nelayan tradisional di wilayah ini biasanya menandai perbatasan dengan Australia pada suatu kedalaman kira-kira 60m ketika air nampak kabur dan sedikit kemerahan.

Selain perikanan tangkap, aktivitas budidaya perikanan, terutama untuk rumput laut, di samping untuk ikan, udang, teripang dan kerang mutiara. Luas lahan budidaya di Kabupaten MTB sebesar 28.979,93 hektar, dan areal yang terpakai sebesar 1.896,5 hektar (Pemerintah Daerah Kabupaten MTB 2011). Usaha budidaya kerang mutiara yang berlokasi di wilayah pesisir barat dimiliki oleh pengusaha keturunan China dari Kepulauan Aru. Usaha budidaya pembesaran (keramba jaring apung untuk *groupers*) dijalankan oleh pengusaha lokal, sedangkan usaha budidaya perikanan lainnya dilakukan oleh masyarakat nelayan, seperti rumput laut mengikuti trend pasar global. Rumput laut merupakan budidaya perikanan unggulan Kabupaten MTB untuk tiga tahun terakhir ini.

## **Rumput Laut**

Budidaya rumput laut mulai diperkenalkan oleh Pemerintah MTB pada tahun 2007, dimulai dengan pembudidayaan oleh Dinas Perikanan di Teluk Saumlaki dengan memakai bibit dari Takalar. Selanjutnya masyarakat nelayan Seira memulainya, diikuti dengan masyarakat Pulau Selaru. Kini hampir seluruh masyarakat di wilayah pesisir barat dan utara MTB (terutama Seira, Larat, Molo-Maruru), Pulau Selaru, dan sebagian pesisir timur (seperti Arma, Watmuri, Tutukembong, Arui Bab) membudidayakan rumput laut. Terjadi *seaweed*

*booming* di MTB seperti halnya di banyak tempat di Indonesia. Usaha rumput laut berbasis keluarga.

Tahun 2008 produksi budidaya rumput laut di MTB sebesar 125 ton kering; tahun berikutnya meningkat menjadi 725 ton, dan tahun 2010 sebesar 2700 ton. Harga berfluktuasi, dimulai dari Rp.6000- Rp.8000/kg hingga Rp.12.000/kg. Harga dikontrol oleh pedagang, dalam hal ini pasar di Surabaya dan Makassar. Yang dibudidayakan hanya satu jenis, yaitu *Cotonni*, dan produksi hingga sekarang masih berupa bahan mentah saja. Karena hanya bahan mentah (*raw material*), maka harga komoditi ini dikontrol oleh pembeli (pedagang) di pasar Surabaya. Pemerintah Daerah MTB merencanakan pembangunan sebuah pabrik pengolahan rumput laut (dalam bentuk *chip*) di masa mendatang, dan sudah dimulai dengan membangun sebuah gedung di dekat desa Lermatang.

Seperti halnya di beberapa tempat lainnya di Indonesia, penerimaan terhadap rumput laut di kalangan masyarakat MTB didasarkan pada beberapa keuntungan yang diberikan oleh sumberdaya ini, yaitu (1) lahan budidaya tersedia, laut merupakan milik komunal; (2) metode pembudidayaan rumput laut yang relatif mudah untuk dilakukan; (3) dapat melibatkan tenaga kerja laki-laki maupun perempuan, orang dewasa maupun anak-anak, sehingga rumahtangga dapat menjadi suatu kesatuan unit produksi seperti halnya pada usaha pertanian; (4) waktu untuk panen relatif pendek, sekitar 45 hari tanam; (5) metode pengolahan pasca panen mudah, serta bila dibandingkan dengan ikan, hasil produksi tidak mudah rusak; dan (6) pasar tersedia serta harga relatif baik sehingga merupakan sumber *cash* setiap saat.

Di samping itu, kehadiran rumput laut memberi beberapa akibat sosial dan biofisik, baik positif maupun negatif, seperti (1) pengalihan atau kesibukan di lahan laut dapat mengurangi gesekan atau konflik atas lahan darat; (2) pengalihan atau kesibukan di usaha budidaya rumput laut dapat mengurangi perselisihan atau konflik atas wilayah mencari ikan dan sumberdaya lain di pasang surut; (3) perhatian di rumput laut mengurangi tekanan eksploitasi pada sumberdaya laut lain, seperti teripang, dan sumberdaya hutan, seperti kayu; (4) masa untuk panen yang cepat menyebabkan ketersediaan sumber *cash* lebih cepat bila dibandingkan dengan kopra yang merupakan sumber *cash* utama di pertanian atau dari komoditi laut lain, seperti teripang dan lola yang dikenakan sistem *sasi*; (5) *income* dari rumput laut membantu pendidikan anak dan pembangunan rumah, namun sebaliknya kesibukan budidaya rumput laut di *tnyafar* (rumah kebun atau pondok-pondok yang dibangun di luar kampung agar dekat dengan pekerjaan yang sedang dilakukan, misalnya berkebun atau mencari ikan, dan dipergunakan sebagai tempat tinggal selama melakukan pekerjaan tersebut; *tnyafar* dapat ditemukan di Pulau Selaru) menyebabkan perhatian pada sekolah anak terbengkalai karena anak mengikuti orangtua tinggal di *tnyafar* atau karena anak ditinggal di kampung sehingga kekurangan perhatian orangtua yang dapat berakibat pada masalah-masalah sosial lainnya; (6) kesibukan pada komoditi rumput laut dapat berakibat pengurangan perhatian pada aktivitas pertanian pangan sehingga dapat merupakan ancaman bagi *food security* lokal; dan (7) perolehan *income* yang cepat dari produksi rumput laut membawa dampak pada meningkatnya sifat konsumeristik masyarakat.





**Gambar 11. Budidaya rumput laut di Tanimbar Utara.  
Anak-anak ikut berpartisipasi.**



[Photo: H.L.Soselisa, June 2009]

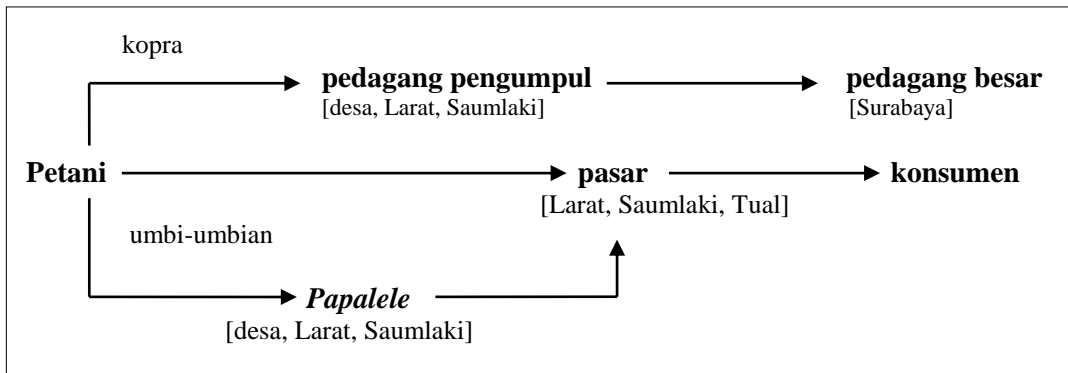
Pemerintah memanfaatkan produksi rumput laut sebagai sasaran antara untuk mengembangkan perikanan tangkap, dalam hal ini untuk menarik pasar luar masuk ke MTB, karena menurut Pemerintah walaupun hasil ikan melimpah, namun kapal-kapal pengumpul belum nampak. Dicontohkan bahwa produksi ikan asin di wilayah pulau-pulau sebelah pesisir barat mengalami kendala keterbatasan pasar. Dampak dari pengembangan usaha budidaya rumput laut di wilayah ini adalah penurunan produksi ikan asin (teri dan tengiri) yang dahulu merupakan komoditi unggulan, terutama dari Pulau Seira.

Walaupun memberi keuntungan *cash* ekonomi, namun pembudidaya rumput laut di MTB juga menghadapi beberapa masalah. Perubahan iklim yang membawa curah hujan yang banyak pada tahun 2010 mempengaruhi jumlah dan kualitas produksi komoditi ini, karena teknik pengolahan pasca panen masih terbatas pada cara penjemuran di bawah panas matahari. Keterlambatan panen selain karena cuaca, juga dikendalikan oleh ketersediaan tenaga kerja keluarga. Benih rumput laut di MTB juga dinilai menurun kualitasnya, dan penyakit mulai menyerang pemilihan *species* tunggal yang dibudidayakan ini. Di samping itu, harga rumput laut yang dikontrol pasar luar dan fluktuatif cenderung menurun akhir-akhir ini, dari Rp.12.000/kg menurun ke Rp.8000 dan Rp.7000/kg.

#### **7.4. Akses ke Pasar dan Rantai Pasar**

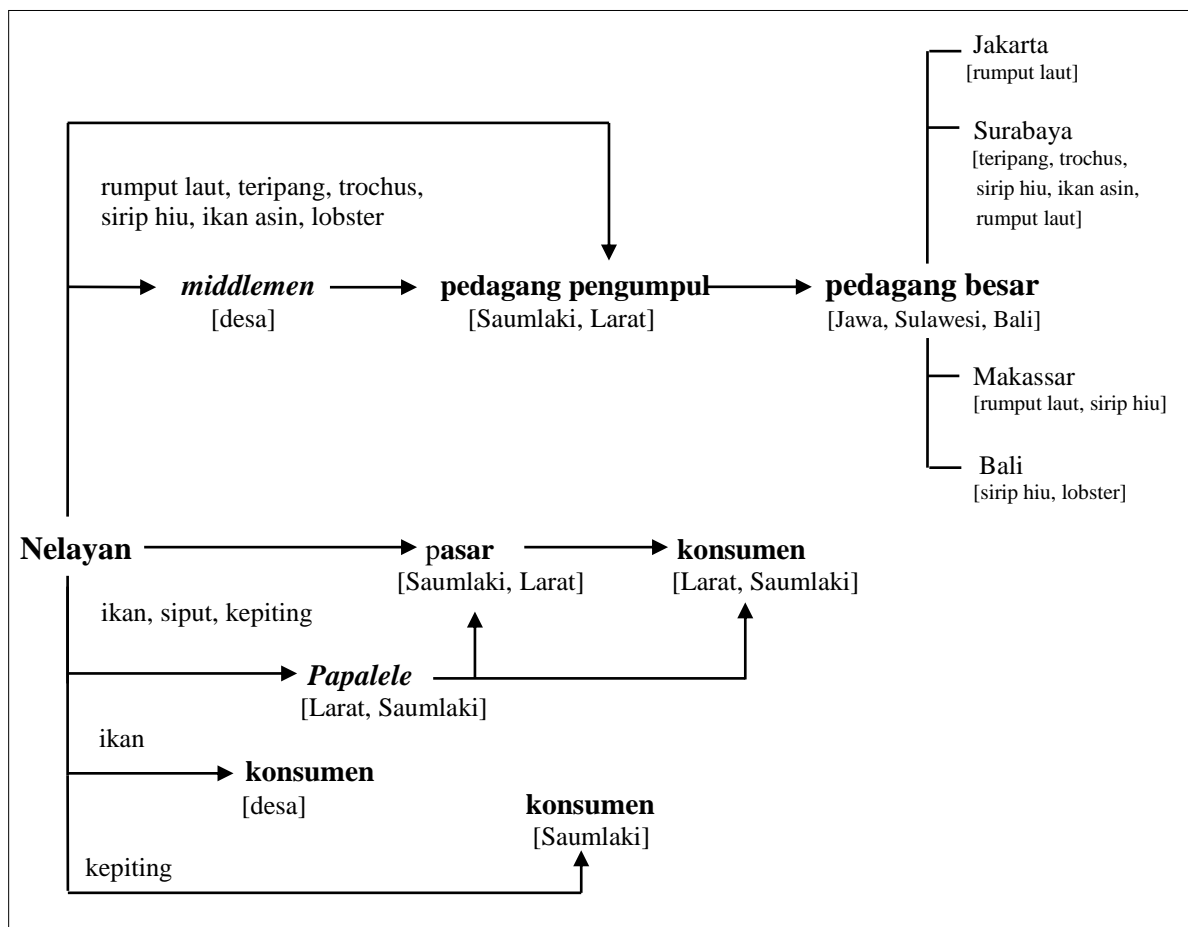
Perdagangan produksi *resource-based activities* dikomandai oleh pedagang lokal keturunan Cina yang mendominasi ekonomi lokal. Mereka membeli komoditi utama seperti kopra, hasil laut, hasil hutan kayu, dan mensuplai barang-barang kebutuhan masyarakat dari luar MTB. Belakangan ada juga pedagang-pedagang yang lebih kecil seperti orang Buton dan Bugis, sebagian dari mereka merupakan anak buah dari para pedagang etnik Cina, baik yang tinggal di MTB maupun yang ada di luar MTB.

**Gambar 12. Rantai pasar beberapa produk pertanian**



Produksi pertanian dan perikanan dijual di dalam desa, ke pasar kecamatan dan kabupaten, serta ke luar MTB. Komoditi pangan untuk konsumsi lokal seperti umbi-umbian, ikan segar, kima, siput, dan udang dijual langsung oleh produsen, walaupun ada yang melalui *papalele*, yaitu mereka yang membeli dari produsen dan menjualnya di pasar dengan harga yang lebih tinggi dari harga dasar, terutama untuk ikan. Sebagai contoh, ikan *samandar* [*Siganus sp.*] yang dibeli pedagang *papalele* dari nelayan Seira seharga Rp.15.000/tali, dijual di pasar Saumlaki seharga Rp.35.000/tali. Pedagang *papalele* di Saumlaki ada yang berasal dari orang lokal (MTB) dan ada yang merupakan para pendatang, seperti orang Buton dan Bugis. Siput biasanya dijual oleh nelayan yang mengumpulkannya, yaitu kaum perempuan.

**Gambar 13. Rantai pasar beberapa produk perikanan**





**Gambar 14. Ikan tiba dari Seira di Pelabuhan Saumlaki** [Photo: H.L.Soselisa, Aug.2011]



**Gambar 15.  
Pengambilan di perahu;  
Penjualan di pasar Saumlaki**

[Photo: P.S.Soselisa, Aug.2011]



Beberapa komoditi dikhususkan untuk dipasarkan, seperti kopra, rumput laut, teripang, dan *trochus*, serta *lobster*. Pemasaran komoditi ini adalah ke luar MTB melalui para pedagang pengumpul, sebagian besar dari mereka merupakan pedagang lokal keturunan Cina, pedagang asal Bugis dan Buton. Sebagian pedagang Bugis dan Buton juga merupakan pengumpul (“kaki-tangan dagang”) untuk para pedagang pengumpul lokal Cina atau bahkan ada yang untuk pedagang Cina yang berdomisili di Surabaya. Komoditi pasar ini dikirim dari Saumlaki ke Pulau Jawa (Surabaya, Jakarta), Sulawesi (Makassar), dan Bali. Yang dikirim ke Surabaya adalah teripang, *trochus* (lola), sirip hiu, ikan asin, dan rumput laut; ke Jakarta rumput laut; ke Makassar rumput laut dan sirip hiu, sedangkan ke Bali sirip hiu dan *lobster* (pengiriman *lobster* sekarang sementara terhenti). Beberapa dari komoditi ini kemudian dipasarkan juga ke luar Indonesia, seperti sirip hiu dan rumput laut ke Singapura.



**Gambar 16.**  
Kios-kios pedagang pengumpul asal Buton dan Bugis di wilayah pelabuhan Saumlaki.

[Photo: H.L.Soselisa, Aug.2011]

Produksi dan pasar dikontrol oleh pedagang atau pembeli karena akses ke pusat pasar dari sebagian besar desa-desa produsen relatif terbatas sehingga membutuhkan biaya lebih.

Akses ke pasar kecamatan dan kabupaten (Larat dan Saumlaki) melalui transportasi darat dengan menggunakan mobil angkutan umum dan melalui laut. Intensitas transportasi darat dan laut, terutama untuk desa-desa yang jauh dari pusat pasar kecamatan dan kabupaten, sangat rendah. Misalnya angkutan laut umum dengan route Seira-Saumlaki hanya sebanyak 2 kali seminggu; jadwal mobil umum dari desa-desa dengan jarak di atas 10 km dari Saumlaki hanya sekali sehari dengan menempuh jalan raya yang tidak mulus. Dengan keterbatasan ini, para pedagang pengumpul yang kebanyakan berpusat di ibukota kabupaten dan kecamatan (Saumlaki dan Larat) memiliki “kaki-tangan dagang”, yaitu para pedagang (pembeli) lokal yang tinggal di desa produsen atau mereka yang ditugaskan ke desa-desa produsen untuk membeli hasil produksi. Para pedagang lokal di desa biasanya memiliki kios untuk menjual barang kebutuhan sehari-hari yang diproduksi dari luar, seperti 9 bahan pokok. Produsen menjual kopra atau hasil laut ke pemilik kios dan membeli barang di kios. Produsen dapat juga mengambil barang kebutuhan sehari-hari (seperti gula, sabun, dll) dari kios dan akan membayarnya kelak dengan hasil kopra atau hasil laut.

Pemberian ijin dari Pemerintah pada pengusaha di bidang perikanan bukan saja terbatas sebagai pengumpul hasil perikanan, tetapi juga untuk jenis usaha melakukan penangkapan dan budidaya (mutiara, rumput laut), serta budidaya pembesaran (keramba jaring apung untuk *grouper* dan *lobster*).



**Gambar 17. Kapal dan perahu di pelabuhan Saumlaki**

[Photo: H.L.Soselisa, Aug.2011]

Pasar lokal Saumlaki dan Larat merupakan tujuan produsen dari desa-desa -dan juga para pedagang *papalele*- untuk memenuhi kebutuhan lokal terhadap bahan makanan. Kota Saumlaki menyediakan konsumen terbesar yang merupakan para pegawai dan pendatang serta pelaku usaha lainnya, seperti pemilik rumah makan dan hotel. Dengan demikian, keuntungan diperoleh dari produsen-produsen yang memiliki akses dan intensitas transportasi ke Saumlaki yang lebih tinggi, di antaranya desa-desa yang jaraknya dekat dengan kota Saumlaki. Beberapa strategi ekonomi dilakukan nelayan untuk produksi ikan

segar. Misalnya, nelayan Lermatang mengoptimalkan usaha melaut pada musim berombak demi mendapatkan pendapatan yang tinggi, karena pada saat itu produksi menurun sedangkan permintaan banyak mengakibatkan harga ikan di pasar Saumlaki naik. Seekor ikan dengan panjang Rp.40-50 cm berharga Rp.45.000-Rp.50.000/ekor, sementara dalam periode laut tenang dan berkelimpahan produksi, harga ikan dengan ukuran yang sama turun lebih dari setengah, mencapai Rp.15.000 - Rp.20.000/ekor, sehingga tidak sebanding dengan biaya transportasi (dan biaya pengawetan), bahkan ada yang tidak laku terjual. Lermatang dan Matakus yang berjarak kurang lebih 1 jam dari Saumlaki merupakan dua desa pensuplai ikan pada musim sulit ikan (ketika laut berombak dan angin kencang sehingga produksi ikan menurun). Sedangkan desa-desa lain di pinggiran Saumlaki, seperti Lauran yang berpenduduk banyak, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan lokal desa pada musim-musim tersebut. Tingkat konsumsi ikan sangat tinggi di wilayah MTB dan Maluku pada umumnya; ikan merupakan lauk utama yang dimakan dengan makanan pokok karbohidrat sebagai menu sehari-hari keluarga.

### 7.5. Situasi Pendapatan

Bila membandingkan pendapatan masyarakat yang berada di wilayah pesisir timur dengan di wilayah sebelah barat sampai utara, maka menurut informan dari unsur pemerintah, pendapatan masyarakat di bagian barat ke utara lebih tinggi. Hal ini dikarenakan di wilayah bagian ini terdiri dari banyak pulau-pulau kecil sehingga masyarakatnya lebih berkonsentrasi pada aktivitas perikanan, sedangkan pesisir timur yang berhadapan dengan Laut Arafura mengalami periode keadaan laut berombak lebih panjang daripada laut tenang sehingga dengan kendala musim dan keterbatasan teknologi perikanan, masyarakat pesisir timur lebih terkonsentrasi pada aktivitas pertanian di darat. Dengan kenyataan ini, maka dengan kata lain pekerjaan nelayan menyumbangkan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertanian. Tabel berikut mencoba memberikan suatu ilustrasi tentang situasi harga beberapa jenis hasil laut dan hasil pertanian di Saumlaki yang dicatat pada bulan Agustus 2011.

**Tabel 14. Harga pertanian dan hasil laut di Saumlaki, Agustus 2011**

Jenis Hasil Pertanian	Jenis Hasil Perikanan	Harga rata-rata [Rp.]	Ukuran satuan	Tujuan Pasar	Keterangan
ubi		10.000	1 tumpuk	pasar lokal	
kumbili		10.000	1 tumpuk	pasar lokal	
keladi		10.000	1 tumpuk	pasar lokal	
ubi jalar		10.000	1 tumpuk	pasar lokal	
ubi kayu		10.000	1 tumpuk	pasar lokal	
pisang		5000	1 sisir	pasar lokal	beberapa jenis
tomat		3000	1 tumpuk	pasar lokal	
cabe		3000	1 tumpuk	pasar lokal	
sayur		3000	1 ikat	pasar lokal	berbagai jenis
pepaya		3000	1 buah	pasar lokal	
bumbu		3000	1 tumpuk	pasar lokal	berbagai jenis
kopra		4000	1 kg	pasar luar	
Jambu mete		5000	1 kg	Pasar luar	
	<i>bia/siput</i>	10.000	1 tumpuk	pasar lokal	beberapa jenis
	<i>bia garu</i>	25.000	1 ikat	Pasar lokal	
	udang kecil	10.000	1 tumpuk	pasar lokal	
	ikan	25.000	1 tumpuk	pasar lokal	berbagai jenis

	ikan	30.000	1 ikat	pasar lokal	berbagai jenis
	ikan garopa	35.000	1 ekor	pasar lokal	
	sirip hiu	1.000.000	1 kg	pasar luar	tergantung jenis & ukuran
	teripang	500.000	1 kg	pasar luar	tergantung jenis dan ukuran
	<i>trochus</i>	35.000	1 kg	pasar luar	
	<i>abalone</i>	200.000	1 kg	pasar luar	
	rumput laut	8.000	1 kg	pasar luar	
	Puri halus	18.000	1 kg	Pasar luar	
	Puri sedang	12.000	1 kg	Pasar luar	
<b>Total:</b> <b>Rp. 79.000</b> <b>[4%]</b>	<b>Total:</b> <b>Rp.1.908.000</b> <b>[96%]</b>				

Sumber: data primer, Agustus 2011

Walaupun hasil pertanian nampaknya jauh lebih rendah daripada perikanan, namun ada beberapa keunggulan, seperti kontinuitas dalam produksi, sehingga merupakan sumber keamanan pangan keluarga produsen dan ketika dipasarkan, secara kontinu mensuplai *income* keluarga. Sedangkan kopra sebagai salah satu *cash crop*, diusahakan oleh sebagian besar masyarakat pedesaan, diproduksi dalam jumlah besar secara periodik 3 kali setahun, dan menyumbang *cash* untuk pemenuhan kebutuhan penting keluarga, seperti anak sekolah dan acara-acara dalam *life-cycle* anggota keluarga. Di sisi lain, karakteristik sumberdaya laut (dalam perikanan tangkap) yang tidak menentu karena bersifat *hunting* serta sangat ditentukan oleh musim dan sistem pengelolaan, menjadikan sumber *income* dari sektor ini pun tidak menentu. Budidaya rumput laut dengan waktu panen yang menentu mengatasi ketidak-reguleran *income* dari pertanian tangkap, sehingga dalam tahun-tahun belakangan ini rumput laut merupakan salah satu penyumbang utama dari perikanan terhadap pendapatan keluarga.

Menurut seorang informan pemerintah berdasarkan survei keluarga yang sedang berlangsung, maka pendapatan masyarakat dari hasil pertanian rata-rata diperkirakan berkisar antara Rp. 100.000 – Rp.500.000/bulan (Rp. 1.200.000 – Rp.6.000.000/tahun), bahkan ada yang kurang dari ini. Sedangkan pendapatan dari hasil perikanan berkisar antara Rp.500.000 – Rp.1.500.000/bulan (Rp.6.000.000 – Rp.18.000.000/tahun). Sumbangan pendapatan dari hasil laut pada tiga tahun belakangan berasal terutama dari budidaya rumput laut. Mengingat pengeluaran bukan hanya diperuntukkan bagi konsumsi rumahtangga semata, tetapi untuk memenuhi tuntutan pendidikan, kesehatan, hiburan, kebutuhan adat, dan sosial-budaya lainnya, serta diperhadapkan dengan tingkat kemahalan barang di MTB yang relatif tinggi, maka pengeluaran keluarga menjadi tinggi.

Sebagai perbandingan, data 2004 (Tao dkk. 2005:36) menunjukkan bahwa pendapatan rata-rata keluarga suatu desa sampel (Makatian) dari darat maupun laut sekitar Rp. 1.000.000 – Rp.5.000.000/tahun atau rata-rata sebesar Rp. 400.000/bulan (Rp.5.000.000/tahun).

Dari hasil survei ekonomi tahun 2003 dan 2004 dari beberapa desa sampel dan beberapa rumahtangga sampel yang dilakukan oleh Shantiko dkk (2004), diperoleh gambaran pendapatan per rumahtangga per tahun per jenis sumber usaha seperti nampak pada tabel 15.

**Tabel 15. Pendapatan Rata-rata Rumahtangga per Tahun dari Beberapa Jenis Usaha, 2003-2004**

Desa sampel	Pertanian (Rp/RT/thn)		Perikanan (Rp/RT/thn)	Kehutanan (Rp/RT/thn)		Peternakan (Rp/RT/thn)
	kopra	Food crop		Kayu	Non-Kayu	
Bomaki	458.524	784.345	1.626.667	375.033	263.433	260.417
Latdalam	850.957	418.021	1.903.158	36.667	418.500	517.857
Lermatang	594.338	268.926	4.059.038	139.400	440.917	276.250
Lorulun	545.200	546.595	1.855.944	124.900	316.833	731.000
Tumbur	790.655	739.350	1.347.800	198.000	121.133	966.429
Abat	1.366.760	67.083	780.897	3.333	510.000	48.167
Batuputih	1.307.517	57.213	965.850	191.667	1.020.000	142.167
Kilon	1.498.747	121.433	2.332.255	3.333	60.000	109.333
Makatian	991.037	-667	1.377.103	50.500	1.920.000	124.500
Wunlah	1.710.900	41.250	84.333	181.667	470.000	93.667
Alusi Krawain	813.353	585.883	638.533		1.669.000	652.000
Arma	1.516.027	758.500	827.567		1.612.000	
Kilmasa	1.437.733	313.050	546.200		1.527.000	
Lelingluan	2.803.927	1.063.300	3.027.800		4.651.000	135.000
Tutukembong	1.376.580	359.033	672.467		933.000	
<b>Total</b>	<b>18.062.255</b>	<b>6.123.315</b>	<b>22.045.612</b>	<b>1.109.500</b>	<b>15.932.816</b>	<b>4.056.787</b>
<b>%</b>	<b>26,8</b>	<b>9,1</b>	<b>32,7</b>	<b>1,7</b>	<b>23,7</b>	<b>6,0</b>

Sumber: Shantiko dkk 2004

Tabel 15 juga menunjukkan bahwa persentase pendapatan dari sektor perikanan yang tertinggi, diikuti oleh kopra, dan hasil hutan non-kayu (NTFP). NTFP didominasi oleh bahan pangan, yaitu babi hutan dan kerbau liar, dan pada desa-desa di pulau besar Yamdena sebelah timur hasil hutan non-kayu merupakan sumber *income* yang signifikan. Walau demikian, bila melihat sektor pertanian secara keseluruhan (kopra dan *food crop*), maka persentase dari sektor ini menjadi yang tertinggi melebihi perikanan. Pada beberapa desa, terutama di pesisir timur Pulau Yamdena, hasil dari kopra melebihi hasil laut.

Walaupun masyarakat pesisir mengkombinasi pekerjaan petani dan nelayan, namun tidak semua orang menjalani aktivitas ganda ini. Sebagian kecil ada yang hanya mengkhususkan di darat dan ada yang lebih berkonsentrasi di laut. Bila membandingkan pekerjaan di laut dan di darat, maka beberapa informan berpendapat bahwa harga hasil laut lebih tinggi dari hasil kebun, sehingga *income* dari laut lebih besar. Namun karena tidak ada investasi tenaga di laut sebelumnya, maka cenderung konsumtif (boros). Sebaliknya biaya pada peralatan nelayan (terutama pada budidaya) lebih besar daripada di usaha kebun. Keluarga petani lebih banyak yang menyekolahkan anak. Seorang informan menekankan bahwa filosofi dalam pekerjaan petani adalah harus kerja keras di kebun agar diperoleh hasil untuk makan secara kontinu. Dalam musim paceklik, nelayan sering datang meminta makanan (“isi kebun”) dari petani. Mengerjakan kebun membuat badan sehat karena banyak bergerak, peredaran darah lancar, sehingga jarang diserang penyakit. Orang laut lebih cepat sakit karena udara laut yang panas membuat mereka sering bertelanjang dada dan masuk angin.

Penggunaan uang bukan saja untuk kebutuhan makan. Prioritas penggunaan uang menurut beberapa informan, terutama informan perempuan, adalah untuk: (1) membeli bahan makanan, termasuk rokok, (2) keperluan anak sekolah. (3) keperluan adat. (4) membangun rumah, dan (5) membeli pakaian. Pengeluaran untuk keperluan adat walaupun cukup tinggi, namun harus dipenuhi karena berkaitan dengan kewajiban-kewajiban sosial-budaya dalam sistem kekerabatan orang Tanimbar. Dalam acara-acara adat tertentu, misalnya perkawinan atau kematian, ada kewajiban kerabat untuk menyediakan kain tenun, babi, beras, perkakas



rumah tangga, sopi, dan uang. Kain tenun (*tais fian*) harganya berkisar antara Rp.500.000 – Rp.900.000.



**Gambar 18. Menenun kain di Matakus**

[Photo: S.Litaay, Aug.2011]

## **8. Lermatang dan Luran: Gambaran Masyarakat Pesisir di MTB**

### **8.1. Identifikasi**

Desa Lermatang dan Luran merupakan dua desa di pesisir Pulau Yamdena bagian selatan. Lermatang terletak di ujung selatan pulau ini, sedangkan Luran berada di bagian timur. Secara administratif keduanya termasuk Kecamatan Tanimbar Selatan yang beribukota di Saumlaki.

Jarak Lermatang dengan ibukota kecamatan yang sekaligus ibukota kabupaten (Saumlaki) adalah 9 km, ditempuh dengan perjalanan darat sekitar 55 menit – 1 jam. Jalan yang menghubungkan Saumlaki dengan Lermatang belum seluruhnya diaspal, sebagian masih merupakan jalan tanah yang baru dibuka, sehingga pada musim hujan agak sulit dilalui. Mobil angkutan umum milik perorangan melayani route Lermatang-Saumlaki, sehari sekali dengan kapasitas 12 penumpang; biaya sekali jalan Rp.15.000/orang. Bila membawa hasil produksi maka biaya per karung dengan angkutan darat sebesar Rp.5000. Sebelum jalan darat dibuka, transportasi ke Saumlaki melalui laut. Walaupun jaraknya lebih dekat dibandingkan jalan darat, namun resiko keselamatan sering menjadi masalah karena laut yang menghubungkan Lermatang-Saumlaki sering berombak. Waktu tempuh dengan menggunakan mesin *ketinting* (5,5 pk) adalah sekitar 30 menit, dengan ongkos Rp.5.000/penumpang.

Adapun desa Luran hanya berjarak 2 km dari Saumlaki, dan ditempuh melalui jalan beraspal yang cukup mulus, selama kurang lebih 6 menit. Karena jaraknya yang dekat, maka mobilitas masyarakat desa Luran ke ibukota Saumlaki cukup tinggi.

Ada perbedaan informasi tentang luas desa dari dua sumber. Menurut Kecamatan Tanimbar Selatan Dalam Angka (BPS Kabupaten MTB 2010b), luas desa Lermatang adalah 120,22 km<sup>2</sup>, sedangkan desa Lauran 40,57 km<sup>2</sup>. Data desa Lermatang menyebutkan luas desa sekitar 275,148 km<sup>2</sup> (Data Potensi Desa Lermatang 2003), sedangkan data desa Lauran menunjukkan luas desa Lauran: 135.600m<sup>2</sup> (LPPD Desa Lauran Tahun 2010). Luas *petuanan* kedua desa meliputi pulau-pulau kecil di sekitar mereka yang menurut *folklore* atau sejarah desa diakui kepemilikannya. Misalnya *petuanan* desa Lauran meliputi Pulau Nuan, Pulau Nuskesse Timur, dan Nuskesse Barat.



**Gambar 19. Jalan dari Lermatang ke Saumlaki**  
[Photo: H.L.Soselisa, Aug.2011]



Desa Lermatang berbatasan dengan desa Bomaki (utara), Selat Jasi desa Wermatang (selatan), Selat Saumlaki (timur) dan desa Latdalam (barat). Desa Lauran berbatasan dengan Desa Kabiarat (utara), Desa Sifnana (selatan), Laut Arafura (timur), dan Desa Bomaki (barat).

Sejarah desa Lermatang tidak terlalu jelas diceritakan. Hanya dikatakan bahwa menurut folklore nenek moyang mereka berasal dari Pulau Barsadi, sebuah pulau kecil yang terkena tsunami sehingga masyarakatnya harus berpencar keluar untuk mencari daratan lain yang lebih besar. Sedangkan sejarah desa Lauran menceritakan bahwa kurang lebih 400 tahun yang lalu, yaitu tahun 1650 situs desa Lauran pertama terletak di *pnue* Batilet yang berada di sebelah timur dari situs sekarang. Tahun 1900 desa kedua pindah ke Ompak Mafutyar, dan pada tahun 1917 pindah ke situs sekarang dengan nama Lauran. Selama kurang lebih 400 tahun ini, desa Lauran telah diperintah oleh 13 pemimpin desa.

## **8.2. Profil Kependudukan dan Infrastruktur**

### **8.2.1. Desa Lermatang**

Jumlah penduduk desa Lermatang berdasarkan data yang diperoleh dari pemerintah desa untuk tahun 2010 adalah sebanyak 1045 jiwa yang terdiri dari 521 laki-laki (49,9%) dan perempuan 524 jiwa (50,1%). Jumlah rumah tangga sebanyak 258 KK, sehingga rata-rata jumlah jiwa dalam setiap rumah tangga sebanyak 4 orang. Jumlah rumah yang ditempati di Desa Lermatang adalah 175 unit, dengan demikian ada rumah yang ditempati oleh lebih dari satu keluarga. Komposisi penduduk Lermatang berdasarkan tingkatan umur dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 16. Jumlah Penduduk Lermatang, 2010**

Kelompok Umur (tahun)	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
0 - 5	133	12,73
6 - 13	137	13,11
14 - 19	127	12,15
20 - 29	189	18,09
30 - 39	229	21,91
40 - 54	144	13,78
55 tahun ke atas	86	8,23
<b>Total</b>	<b>1045</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Desa Lermatang 2010

Dahulu rumah-rumah penduduk dibuat dari papan dan atap rumbia serta bambu (*palupu*) namun sejak tahun 2009 mulai dibangun rumah-rumah berbahan semen, tegel, dan senk. Jenis lantai rumah yang terbanyak ditemui adalah lantai semen, diikuti dengan lantai tanah, dan lantai bertegel (lihat Tabel 17). Jenis dinding terbanyak yang ditemui adalah dinding semen (beton), sebagian belum diplester, kemudian rumah berdinding papan, dan hanya sedikit saja yang masih memakai dinding dari bambu. Lebih dari separuh rumah sudah beratap senk, dan sepertiga memakai atap daun rumbia (daun sagu). Beberapa rumah nampak belum selesai dikerjakan karena kesulitan biaya. Rumah-rumah berbahan semen kebanyakan dibangun dari hasil buka *sasi lola* dan teripang beberapa tahun lalu. Kini kebanyakan tergantung dari hasil budidaya rumput laut untuk melanjutkan membangun rumah.

**Tabel 17. Jenis Bahan Bangunan Rumah Desa Lermatang, 2010**

Jenis Lantai	%	Jenis Dinding	%	Jenis Atap	%
Lantai tanah	30,10	Bambu ( <i>palupu</i> )	1,46	Daun kelapa	2,20
Lantai semen	45,63	Papan	33,50	rumbia	30,77
Lantai semen & tanah	13,59	Papan dan beton	12,14	senk	56,04
Lantai tegel dan semen	8,25	Beton (tidak diplester)	23,79	Genteng cetak	10,99
Lantai tegel seluruh	2,43	Beton (sudah diplester)	29,13		
	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>

Sumber: Data Rekapitulasi Keluarga per Desa Kec. Tanimbar Selatan, Pemerintah Kab.MTB

Sebagian rumah penduduk belum dilengkapi dengan jamban (WC), baru sekitar 20% yang memiliki WC pribadi. Sisanya memakai WC yang berada di pantai/laut dan beberapa WC umum di dalam desa, atau membuang air di pantai walaupun Pemerintah Desa telah melarang.

Untuk sumber penerangan, sebagian besar rumahtangga masih memakai pelita (70%), sisanya memakai lampu gas dan mesin generator (*genset*). Tahun 2007 bantuan proyek pemerintah diberikan dalam bentuk pengadaan listrik tenaga surya sebanyak kurang lebih 115 unit, namun kini hampir seluruhnya tidak berfungsi lagi.

Untuk pemenuhan kebutuhan air minum, hampir 90% penduduk memperoleh dari sumur umum desa (sumur 'pusaka' yang bernama Wetutune Wempas Dalam) yang terletak di belakang desa sebelah barat, dan dari beberapa sumur di dalam desa. Ada 14 buah sumur di

dalam desa, namun hanya 6 yang airnya layak diminum, sisanya hanya untuk keperluan mandi dan mencuci saja. Kini sedang dilaksanakan instalasi pipa air minum di desa.



**Gambar 20. Desa Lermatang**

[Photo: H.L.Soselisa, Aug.2011]

Bahan bakar untuk memasak yang dipakai penduduk sebagian besar (96%) adalah kayu bakar yang diperoleh di sekitar kampung, baik di areal kebun, bekas kebun, dan hutan sekunder, maupun dari hutan bakau. Dengan demikian, pengambilan kayu untuk keperluan memasak setiap hari sangat sering dilakukan. Sisanya memakai minyak tanah.

Wajah desa Lermatang dihiasi dengan jalan-jalan setapak bersemen di seluruh desa, bahkan sampai ke belakang desa di antara hutan bakau, menuju sumur air minum karena ini jalan yang harus mereka lalui setiap hari untuk mengambil air minum. Hanya tertinggal beberapa meter saja ke arah pantai yang belum selesai. Jalan setapak ini terselesaikan melalui bantuan program PNPM Mandiri tahun 2010. Karena terpaan ombak, terutama pada musim timur, pantai sepanjang wilayah pemukiman dibangun talud penahan ombak.



**Gambar21. Jalan ke sumur air minum**

[Photo: H.L.Soselisa, Aug.2011]

Fasilitas pendidikan yang ada di desa Lermatang adalah 1 buah gedung PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), 1 buah SD, dan 1 buah SMP. SD di Lermatang adalah Sekolah Dasar Kristen yang dikelola Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen DR. J.B. Sitanala dibawah naungan Gereja Protestan Maluku (GPM). SD ini memiliki 8 ruangan kelas yang terdiri dari 4 ruangan berdinding semen yang dibangun pada tahun 2007 melalui dana PNPM Mandiri dan 4 ruangan lama yang berdinding papan yang direncanakan diperbaiki dalam waktu dekat. SD ini memiliki jumlah murid sebanyak 220 orang dengan tenaga guru 5 orang sehingga ratio antara guru dan murid 1:44. Untuk tingkat SMP, desa Lermatang memiliki sebuah SMP Negeri yang baru didirikan kurang lebih dua tahun lalu dengan empat ruang kelas. Jumlah murid saat ini sebanyak 70 orang. Terdapat satu buah rumah dinas guru SD dan 5 buah rumah dinas guru SMP. Untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang tinggi, anak-anak Lermatang pergi ke Saumlaki. Saat ini kurang lebih 10 anak Lermatang sedang melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi, baik di Saumlaki, Ambon, Papua, maupun Jakarta. Tabel 18 menunjukkan tingkat pendidikan masyarakat Lermatang.

**Tabel 18. Tingkat Pendidikan Penduduk Lermatang**

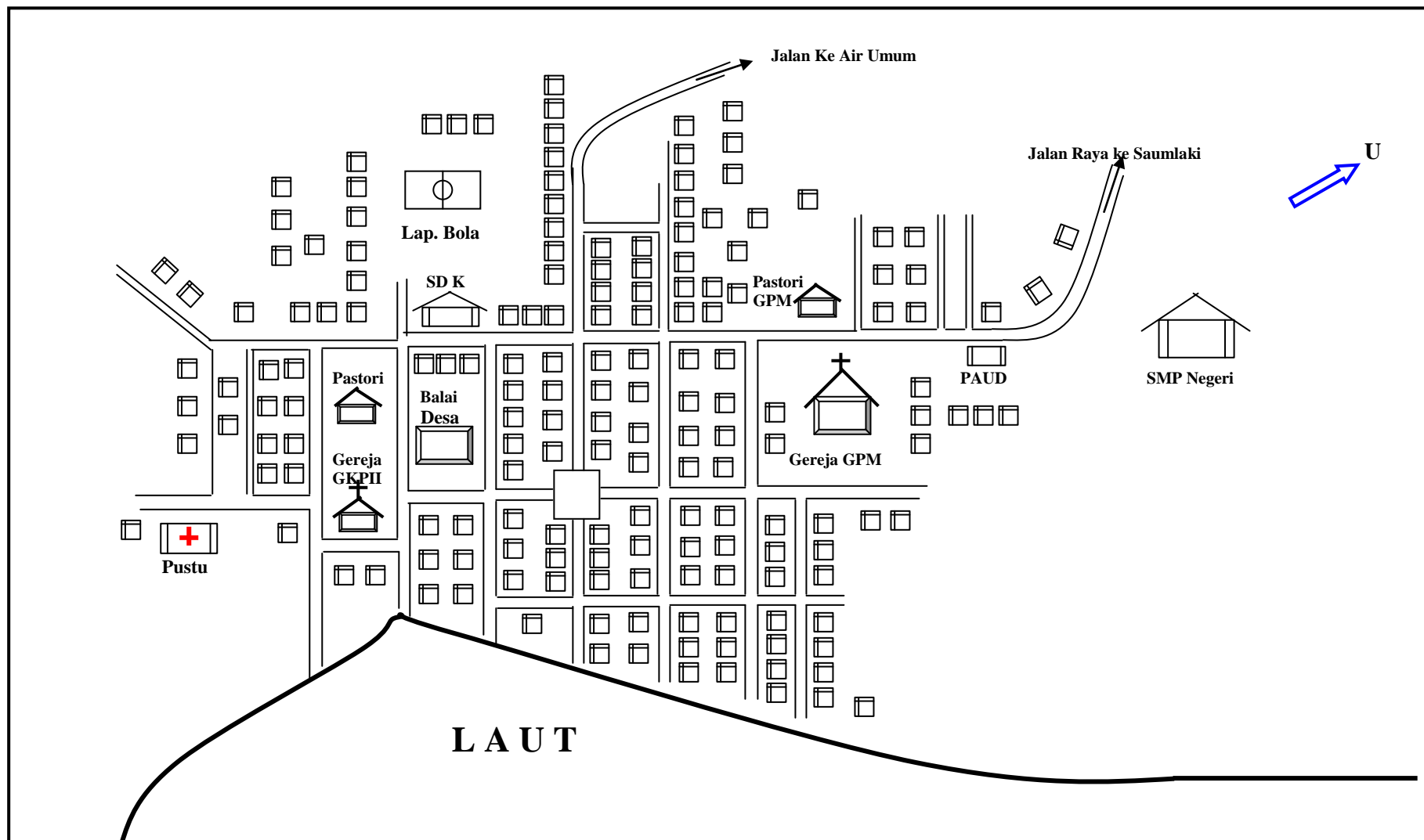
Tingkat Pendidikan	Jumlah
Sarjana (S1)	6
Tamat SMU/ sederajat	60
Tamat SMP	70
Tamat SD	190
	<b>326</b>

Sumber : Kantor Desa Lermatang 2010

Fasilitas kesehatan di Lermatang adalah sebuah Pustu (Puskesmas Pembantu), diperlengkapi dengan tenaga profesi, yaitu seorang mantri dan satu orang bidan, serta 3 orang dukun terlatih. Setiap tanggal 9 setiap bulan, bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan posyandu (pos pelayanan terpadu) dilakukan pelayanan kesehatan dan pengobatan masyarakat di Pustu. Penyakit yang sering diderita masyarakat adalah gangguan saluran pernapasan (ISPA), malaria, diare, penyakit kulit, batuk, bronchitis, flu, demam (*tulang-tulang sakit*). Selain dukun terlatih, di masyarakat juga terdapat sekitar 3 orang dukun kampung (*mama biang*) yang belum “terlatih”. Dalam dua tahun terakhir (2010-2011) angka kematian ibu hamil dan kematian bayi lahir di Lermatang 0%, hal ini menunjukkan kemajuan pelayanan kesehatan. Sebelumnya kematian ibu hamil disebabkan karena tetanus. Menurut seorang informan, ada kecenderungan para ibu memilih dukun beranak tidak terlatih untuk menolong dan menangani persalinan. Alasannya adalah -walaupun dibayar lebih mahal (Rp.100.000)- dukun ini menangani ibu dan bayi sampai tuntas, dalam arti sampai si bayi lepas tali pusarnya, dan termasuk juga membersihkan sisa-sisa darah yang disebabkan persalinan. Dukun terlatih dibayar Rp.50.000, sedangkan bidan tidak dibayar sebab telah menerima insentif dari pemerintah.

Pemerintah desa menjalankan pemerintahannya dari sebuah kantor desa yang menjadi satu dengan balai desa yang digunakan untuk rapat-rapat dengan warga desa. Namun kepala desa juga dapat menjalankan tugasnya dari rumahnya, misalnya dalam menerima tamu yang datang ke desa. Setiap tahun sebuah desa mendapatkan dana (Alokasi Dana Desa, ADD) yang diperuntukan bagi pembangunan (60%), keperluan ATK (20%), dan untuk PKK (20%). Besarnya ADD setiap desa tidak sama, misalnya untuk tahun ini Lermatang mendapat 41 juta rupiah.

Gambar 22. Denah Desa Lermatang



Sumber: Pemerintah Desa Lermatang

Dalam melaksanakan pemerintahan, Pemerintah desa juga menerbitkan beberapa aturan baru melalui musyawarah desa. Misalnya pada tahun 2011 ini Pemerintah Desa mengeluarkan aturan yang berkaitan dengan usia kawin, yaitu 20 tahun. Hal ini dimaksudkan untuk selain menaikkan usia kawin, juga agar anak-anak dapat berkesempatan melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi. Yang melanggar akan dikenai denda untuk desa. Bila anak yang menikah itu masih sekolah, akan dikenakan denda Rp.5 juta ke desa dan denda ke orangtua yang jumlahnya ditentukan pihak keluarga perempuan. Untuk yang sudah tidak sekolah, denda sebesar Rp. 3 juta. Struktur pemerintahan desa memberlakukan sistem nasional, yaitu dipimpin oleh kepala desa, memiliki sekretaris desa, kaur (kepala urusan) pemerintahan, kaur pembangunan, dan kaur umum. Di samping itu ada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang beranggotakan 5 orang (ketua, wakil, sekretaris, dan 2 anggota)..

Masyarakat desa Lermatang beragama Kristen Protestan. Sarana peribadatan di desa adalah dua buah gedung gereja, yaitu gereja milik GPM (Gereja Protestan Maluku) yang masuk ke Lermatang tahun 1905, dan gereja milik GKPII (Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia) yang masuk ke Lermatang tahun 1975. Kedua gereja ini masing-masing dilengkapi dengan 2 rumah pendeta (*pastori*).



**Gambar 23. Pantai Lermatang**

[Photo: H.L.Soselisa, Aug.2011]

Mata pencaharian penduduk Lermatang bervariasi antara petani, nelayan, pegawai negeri, peternak, pertukangan, penjaja kue, dan lainnya (lihat Tabel 19). Di Lermatang terdapat 5 (lima) buah kios yang menjual barang kebutuhan sehari-hari masyarakat (sembako/sembilan bahan pokok) dan juga kebutuhan hidup lainnya. Barang-barang yang dijual di kios-kios ini diperoleh atau dibeli dari Kota Saumlaki. Karena keterbatasan akses ke kota, maka keberadaan kios-kios ini sangat membantu masyarakat Lermatang dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

**Tabel 19. Mata Pencaharian Penduduk Desa Lermatang**

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	12
Wiraswasta	5
Nelayan	100
Peternak	10
Pertukangan	10
Petani	200
Penjaja Kue	10

Sumber : Kantor Desa Lermatang 2010

Dalam struktur adat, masyarakat Lermatang terbagi atas 8 *soa* kecil yang kemudian bergabung menjadi 4 *soa* besar, masing-masing: (1) *Soa* Olsuin Nggrease dengan kepala *soa* dari *fam* Batlajery, (2) *Soa* Ngoswain Tabora dengan kepala *soa* dari *fam* Yaran, (3) *Soa* Oibur Butulelempun dengan kepala *soa* dari *fam* Kelbulan, dan (4) *Soa* Olinger Otarempun dengan kepala *soa* dari *fam* Takdare. Satu kelompok *soa* yang dikepalai oleh satu kepala *soa*, terdiri dari beberapa matarumah atau *dasmatan* (*fam*).

Secara pemerintahan adat, sebuah desa (*pnue*) diatur oleh raja/*orang kay* sebagai pemimpin, tua-tua adat, dan kepala-kepala *soa*. Selain itu, beberapa peran yang dikenal dalam struktur adat adalah antara lain tuan tanah (*nurenruan*) yang dianggap sebagai orang pertama yang berada di *pnue* sebelum sebuah *pnue* terbentuk, dan *mangsompe* yang berperanan sebagai pendeta adat.

Setiap *pnue* (desa) memiliki pusat desa, tempat situs pertama desa berdiri, yang disebut *inarut*. Biasanya pada *inarut* ada batu yang menjadi tanda. Pusat desa merupakan tempat pelaksanaan upacara-upacara adat desa. Di pusat desa Lermatang, terdapat dua rumah berhadapan, yaitu rumah *mangsompe* dan rumah “tuan air”. Si tuan air berperanan sebagai penjaga sumber air desa dan beberapa hal yang berkaitan dengan air. Bila sumur pusaka desa (Wetutune Wempas Dalam) bermasalah, misalnya airnya keruh, maka penjaga air akan menanganinya secara adat.

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan dan sosial desa, terdapat pula sebuah sistem organisasi, yaitu *tubuh*. *Tubuh* adalah organisasi di desa Lermatang sejak jaman dahulu yang mengelompokkan warga dewasa berdasarkan tahun kelahiran (semacam kelompok satu “*dawar*”). Masing-masing *tubuh* memiliki nama sendiri-sendiri yang telah ada sejak dahulu. Bila satu *tubuh* anggotanya telah hampir habis (meninggal), maka nama tubuhnya akan dipakai oleh *tubuh* baru yang muncul, demikian seterusnya. Ada kurang lebih 9 nama *tubuh* sekarang di Lermatang, yaitu Edo, Fajar, Tunas, Harapan, Bintang, Cili Padi, Batu Biru, Biji Guntur, dan Mancing. Ada beberapa persyaratan untuk menjadi anggota *tubuh*, antara lain berpembawaan baik, sopan, dan bertanggungjawab. Seorang lelaki dapat menjadi anggota *tubuh* sekitar usia 20 tahun. Bila seorang perempuan menikah, maka ia akan masuk menjadi anggota *tubuh* suaminya.

### 8.2.2. Desa Lauran

Jumlah penduduk desa Lauran dua kali lipat banyak dari penduduk Lermatang, sehingga desa nampak padat. Berdasarkan data yang diperoleh dari pemerintah desa untuk tahun 2010 penduduk Lauran tercatat sebanyak 2277 jiwa yang terdiri dari 1118 laki-laki (49,1%) dan



perempuan 1159 jiwa (50,9%). Jumlah rumah tangga sebanyak 578 KK, sehingga rata-rata jumlah jiwa dalam setiap rumah tangga sebanyak 4 orang. Jumlah rumah yang berada di Desa Lauran adalah 495 unit, dengan demikian ada rumah yang ditempati oleh lebih dari satu keluarga.

Pandangan umum dalam desa Lauran menunjukkan banyak rumah-rumah berbahan semen, tegel, dan senk. Namun dari data yang nampak pada Tabel 20, masih ada rumah dengan bahan bambu (*palupu*), daun atap, dan berlantai tanah. Urutan persentasi jenis lantai rumah serupa dengan Lermatang, yaitu yang terbanyak adalah lantai semen, diikuti dengan lantai tanah, dan lantai bertegel. Jenis dinding terbanyak yang ditemui juga sama, yaitu dinding semen (beton), sebagian belum diplester, tetapi kemudian diikuti dengan berdinding bambu, baru kemudian berdinding papan. Persentase rumah beratap senk lebih banyak di Lauran daripada di Lermatang, dan seperempat beratap daun rumbia (daun sagu). Dibandingkan dengan Lermatang, nampak lebih banyak rumah bergaya modern di desa Lauran. Hal ini dikarenakan Lauran lebih dekat dengan kota, sehingga bahan bangunan lebih mudah didapat. Selain itu, banyak warga Lauran bekerja di kota sehingga pengaruh kota lebih tinggi.

**Tabel 20. Jenis Bahan Bangunan Rumah Desa Lauran, 2010**

Jenis Lantai	%	Jenis Dinding	%	Jenis Atap	%
Lantai tanah	28,76	Bambu ( <i>palupu</i> )	14,78	Daun kelapa	1,10
Lantai semen	29,84	Papan	9,14	rumbia	24,11
Lantai semen & tanah	8,33	Papan dan beton	4,57	senk	70,68
Lantai tegel dan semen	22,04	Beton (tidak diplester)	24,46	Genteng cetak	4,11
Lantai tegel seluruh	11,02	Beton (sudah diplester)	47,04		
	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>

Sumber: Data Rekapitulasi Keluarga per Desa Kec. Tanimbar Selatan, Pemerintah Kab.MTB

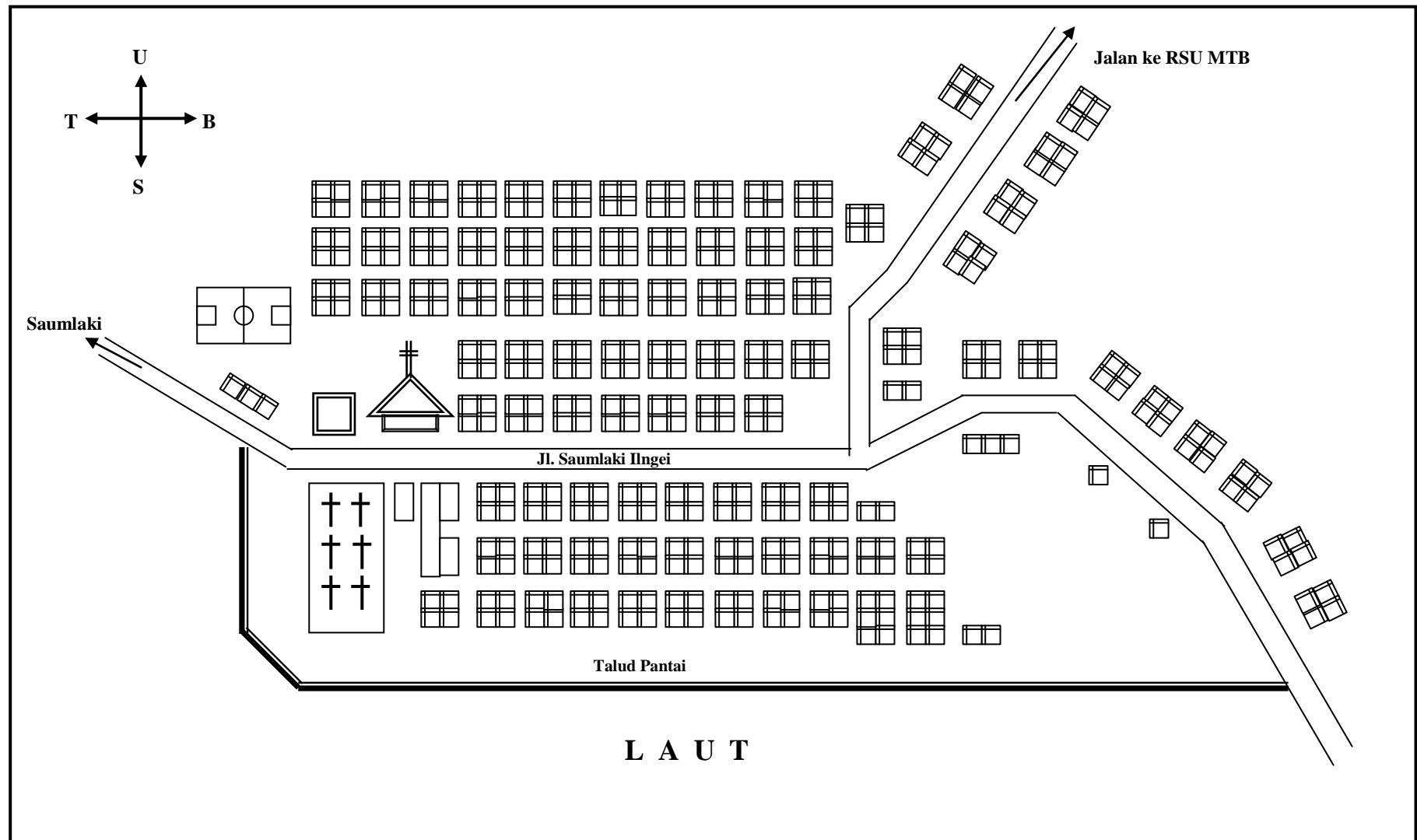
Dibandingkan dengan Lermatang, rumah Lauran lebih banyak dilengkapi dengan WC (63,23%), walaupun banyak juga yang tidak memiliki jamban (30,10%). Sisanya memakai WC di pantai/laut dan WC umum di dalam desa

Kebutuhan listrik masyarakat sudah dilayani oleh PLN, namun tidak semua penduduk memakai layanan ini. Persentase yang memakai PLN sebanyak 76%, sedangkan sisanya memakai pelita (21%) dan lampu gas. Pemenuhan kebutuhan air minum dilayani melalui instalasi pipanisasi (83,2%), sisanya dari air *abad* (air dari hutan), sumur pribadi, dan sumur umum di desa.

Walaupun dekat dengan kota, tetapi sekitar 50,9% rumah masih memakai bahan bakar kayu untuk memasak. Mengingat hampir tidak tersisa lagi areal hutan di desa Lauran, maka hutan bakau di pesisir pantai mengalami beban eksploitasi untuk kebutuhan masak sehari-hari. Rumahtangga yang memakai minyak tanah sebagai bahan bakar juga tergolong banyak, yaitu 47,5%. Sisanya memakai sabut kelapa.

Desa Lauran terletak di jalan poros Yamdena, sehingga untuk mencapai desa-desa lain yang sejalur orang harus melintasi desa Lauran. Rumah-rumah penduduk terletak sebelah-menyebelah dengan jalan raya beraspal, sisanya berada di jalan-jalan desa yang semuanya sudah dibeton. Karena terpaan ombak, terutama pada musim timur, maka di sepanjang pantai wilayah pemukiman dibangun talud penahan ombak.

Gambar 24. Denah Desa Lauran



Sumber : Pemerintah Desa Lauran



**Gambar 25.**  
**Jalan aspal membelah desa Lauran**

[Photo: H.L. Soselisa, Aug.2011]

Fasilitas pendidikan yang ada di desa Lauran adalah 2 buah PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), 1 dikelola oleh PKK desa Lauran, dan satunya lagi dikelola oleh Organisasi WKRI Lauran. Terdapat sebuah Taman Kanak-Kanak yang dibangun melalui program PNPM Mandiri dan kini dikelola PKK, 2 buah SD Katolik, yaitu SD I and SD II Naskat Santo Yoseph, serta 1 buah SMP, yaitu SMP Andreas. Karena kedekatan dengan kota, maka banyak siswa yang melanjutkan pendidikan di Saumlaki. Untuk perguruan tinggi, di poros jalan Yamdena di wilayah Lauran terdapat dua sekolah tinggi, yaitu STIESA (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Saumlaki) dan STIAS (Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Saumlaki) yang sementara menempati gedung pemerintah yang belum difungsikan. Banyak anak Lauran yang melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi di Saumlaki dan di luar MTB, seperti di Ambon, Malang, dan Bandung. Tabel 21 menunjukkan tingkat pendidikan masyarakat Lauran. Dari data pemerintah desa Lauran (LPPD Desa Lauran 2010) tercatat bahwa jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki pada jenjang pendidik SD sampai SLTA.

**Tabel 21. Tingkat Pendidikan Penduduk Lauran**

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
Pasca Sarjana (S2)	2
Sarjana (S1)	61
SLTA	445
SLTP	387
SD	540
	<b>1435</b>

Sumber : Kantor Desa Lauran 2010

Fasilitas kesehatan di Lauran adalah sebuah Pustu (Puskesmas Pembantu), dengan 1 mantri dan 1 bidan. Di situ setiap bulan dilakukan kegiatan posyandu (pos pelayanan terpadu) untuk melayani 100 lebih balita. Penyakit yang sering diderita masyarakat adalah malaria (daerah rawa sehingga endemik malaria). Rabies menyerang penduduk Lauran tahun 2011, tercatat 378 orang digigit anjing rabies, 13 di antaranya meninggal dunia. Untuk mencegah penyebaran penyakit ini, anjing-anjing piaraan dibunuh.

Masyarakat desa Lauran mayoritas beragama Kristen Katolik, dengan sedikit penduduk beragama Protestan. Sarana peribadatan di desa adalah sebuah gedung gereja Katolik yang terletak di jalan utama desa. Terdapat pula penduduk beragama Islam yang merupakan penduduk pendatang, yaitu para pedagang dari asal Sulawesi Selatan yang membuka toko di Lauran.

Mata pencaharian penduduk Lauran bervariasi dengan didominasi oleh pekerjaan petani, pedagang, dan pegawai negeri sipil. Pada sore dan malam hari di sepanjang jalan raja yang membelah desa Lauran, para penjual makanan menjajakan dagangannya untuk konsumen dalam desa maupun luar desa yang melintasi jalan ini. Terdapat juga banyak kios di desa ini, dan beberapa toko. Walaupun demikian, pekerjaan ini tidak tercatat dalam kategori pedagang (lihat Tabel 22). Jenis pekerjaan yang nampak berbeda dengan Lermatang karena kedekatan dengan kota serta akses jalan raya adalah pekerjaan ojek/supir dan buruh pelabuhan serta montir.

**Tabel 22. Mata Pencaharian Penduduk Desa Lauran**

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Petani	459
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	115
Pegawai honor	60
Pensiunan	20
Pedagang	1
Peternak	305
Tukang	30
Ojek/supir	30
Buruh pelabuhan	1
Montir	1

Sumber : Kantor Desa Lauran 2010

Walaupun masyarakat Lauran juga melakukan aktivitas di laut, tetapi mata pencaharian nelayan tidak ditemukan tercatat secara statistik, kemungkinan tergabung dalam pekerjaan petani sebagai suatu karakter mata pencaharian masyarakat pesisir di Maluku. Dari hasil wawancara, diperoleh gambaran bahwa sekitar 300-400 orang mencari di laut

Umumnya struktur adat masyarakat Tanimbar adalah struktur masyarakat perahu (lihat de Jonge & van Dijk 1995), dimana posisi dan fungsi anggota-anggotanya adalah posisi dan fungsi di perahu dalam menjalankan perahu. Secara adat, desa Lauran memiliki dua “perahu”, yaitu perahu Lauran dan satu perahu Taborat, dengan masing-masing 12 “kursi”. Ke-12 kedudukan atau posisi dalam perahu dan peranannya adalah: *soriluri* (posisi di muka perahu, sebagai penunjuk arah), *pnue duan* (pemimpin, di tengah perahu), *mangafwayak* (juru penyiar di posisi bagian kiri), *mangsombe* (pembawa doa/kurban, di posisi bagian kanan), *ribunrenya* (pendamping *pnue duan*, posisi di samping *mangsombe*), *manganuk silai* (juru bicara pertama, posisi di sebelah *ribunrenya*), *manganuk marumat* (juru bicara kedua), *mangalaborpau* (panglima perang), *mangaswat* (pelayan I dan II), *wilingfian* (bagian kemudi kanan), dan *wilimbayal* (bagian kemudi kiri).



**Gambar 26. Nelayan Lauran memperbaiki jaring** [Photo: H.L. Soselisa, Aug.2011]

Masyarakat Lauran terdiri dari 5 *soa*, yaitu (1) *Soa* Taborat, (2) *Soa* Ulmasembun, (3) *Soa* Arwalembun, (4) *Soa* Besembun, dan (5) *Soa* Madedembun. Satu kelompok *soa* yang dikepalai oleh satu kepala *soa*, terdiri dari beberapa matarumah atau *fam*.

Setiap *pnue* (desa) memiliki pusat desa yang disebut *inarut*. Pusat desa merupakan tempat pelaksanaan upacara-upacara adat desa, atau tempat pertemuan acara-acara adat. Di pusat desa Lauran, terdapat sebuah meriam yang diperoleh dari hasil rampasan kapal Portugis yang lewat di *petuanan* laut Lauran pada masa penjajahan (tahun 1819). Meriam itu dipasang dengan moncong menghadap timur, ke arah kampung lama.

Organisasi pemerintahan desa memberlakukan sistem nasional, yaitu aparat pemerintah desa terdiri dari kepala desa, memiliki sekretaris desa, kaur (kepala urusan) pemerintahan, kaur pembangunan, dan kaur umum. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beranggotakan 7 orang (ketua, sekretaris, bendahara, dan 4 anggota). Masyarakat juga dibagi ke dalam 4 RW (Rukun Warga) yang kemudian terbagi menjadi 8 RT (Rukun Tetangga). Ketua-ketua RT/RW membantu aparat pemerintah desa dalam pelayanan untuk masyarakat. Selain itu, organisasi kemasyarakatan yang ada, antara lain PKK, LKMD, serta kelompok Pemuda. Dalam melaksanakan pemerintahan, Pemerintah desa juga menerbitkan beberapa aturan (Perdes), misalnya aturan yang berkaitan dengan keamanan di desa: orang mabuk dan membuat onar dikenakan denda.

### **8.3. Aktivitas Ekonomi**

Data kependudukan menunjukkan bahwa pekerjaan petani dan nelayan mendominasi aktivitas ekonomi masyarakat Lermatang, sedangkan untuk Lauran petani dan peternak. Sumberdaya alam pada desa Lermatang dan Lauran pada umumnya memiliki kesamaan dengan desa-desa lain yang terdapat di Kecamatan Tanimbar Selatan, yaitu sumberdaya alam darat dan laut. Aktivitas di wilayah darat maupun laut sangat bergantung pada keadaan

musim dan pasar, ditemukan bahwa penyesuaian aktivitas masyarakat dengan keadaan musim dan pasar merupakan strategi dalam memanfaatkan sumberdaya alam, sehingga membentuk pola-pola pengelolaan sumberdaya. Dikenal dua musim, yaitu musim timur dan musim barat. Musim timur berlangsung dari bulan April sampai September, dan musim barat berlangsung dari bulan Oktober sampai Maret. Musim pancaroba terjadi di peralihan kedua musim ini.

Pemanfaatan wilayah darat yang dilakukan oleh masyarakat Lermatang, meliputi aktivitas kultivasi pertanian, beternak, meramu dan berburu hasil hutan, serta menangkap ikan di sungai pada waktu-waktu tertentu. Sedangkan pada masyarakat Lauran, karena ketiadaan lahan hutan akibat konversi ke penggunaan lain, maka aktivitas di darat meliputi kultivasi pertanian dan beternak. Seperti umumnya sistem pembukaan dan pengolahan kebun yang dilakukan di Kepulauan Tanimbar, maka orang Lermatang dan Lauran juga menerapkan pengelolaan kebun dalam bentuk *let beberi*, *let lolobar* dan *let wasi* dengan sistem dan teknologi tradisional. Dengan keterbatasan lahan hutan seperti di Lauran, maka masa bero bekas kebun akan cepat. Bahkan petani memberlakukan *rotation system* di satu lahan saja, dimana hanya sebagian dari lahan yang dibuka itu diolah lebih dahulu. Setelah 3 tahun, mereka berpindah ke bagian berikutnya, dan seterusnya akan kembali ke bagian pertama. Dengan demikian, ukuran kebun menjadi kecil pada tahun-tahun belakangan ini (sekitar 0,25ha – 0,50ha) karena pertambahan penduduk dan lahan menyempit, juga karena berkurangnya tenaga kerja keluarga di aktivitas berkebun (misalnya karena anak keluar desa untuk bersekolah atau minat anak muda sekarang untuk menjadi petani ladang menurun). Dengan ukuran kebun yang demikian, maka produksi sangat bersifat subsistensi. Bila kebun-kebun di Lermatang jaraknya dari pemukiman antara 1 km sampai 4 km, maka kebun-kebun di Lauran berjarak lebih dekat, bahkan ada yang dapat diperpendek jarak tempuhnya dengan memakai kendaraan umum (mobil atau ojek) yang lebih sering melewati jalur mereka.

**Gambar 27.**  
Petani Lauran sedang menunggu angkutan



[Photo: H.L.Soselisa, Aug.2011]



**Gambar 28.**  
Petani Lermatang pulang bersama

Tanaman kebun adalah umbi-umbian (ubi, kembili, ubi jalar, ubi kayu, keladi), kacang-kacangan (kacang tanah, kacang hijau), sayur-sayuran (daun singkong, bunga pepaya, daun pepaya, sawi putih, terong, labu, *papari*, *ganemo*, tomat, cabai, dll), buah-buahan (pisang, pepaya, mangga, nangka, dll), jagung, dan padi. Pepaya, terong, tomat, cabai biasanya ditanam di sela-sela tanaman utama, sedangkan pisang dan ubi kayu biasanya difungsikan sebagai tanaman pembatas kebun atau pagar, ditanam di pinggiran kebun.

Kalender musim berkebun meliputi: bulan Oktober membersihkan lahan kebun, November bakar lahan untuk kebun, Desember adalah musim tanam karena hujan musim barat mulai turun. Tanaman kebun pertama yang ditanam dalam bulan Desember adalah jagung. Musim tanam berlangsung sampai Januari. Bulan Juni, Juli, Agustus panen umbi-umbian.



**Gambar 29. Membersihkan kembili di samping rumah kebun** [Photo: H.L.Soselisa, Aug.2011]

Hasil kebun diperuntukkan bagi konsumsi keluarga dan dijual. Tujuan pasar adalah Kota Saumlaki. Untuk Luran, karena banyaknya penduduk yang bekerja sebagai pegawai negeri, maka desa sendiri juga menjadi tujuan pasar.

Bantuan pemerintah untuk usaha pertanian juga diperoleh kedua desa ini. Misalnya, kelompok petani desa Lermatang tahun 2011 memperoleh bantuan dana dari Dinas Pertanian kabupaten untuk membuka kebun umbi-umbian. Tahun 2010 kelompok tani desa Luran mendapat bantuan bibit padi dari instansi yang sama.

Tanaman perkebunan di kedua desa didominasi oleh kelapa. Tanaman perkebunan lainnya adalah kemiri (di Lermatang) dan jambu mete di Luran. Selain ditanam, kemiri juga diambil dari dalam hutan. Jambu mete diusahakan petani Luran sejak akhir tahun 1980an. Pemasaran kelapa dalam bentuk kopra, buah kemiri, dan jambu mete adalah ke pedagang pengumpul di Saumlaki. Permasalahan yang dihadapi petani perkebunan di Luran dewasa ini adalah seringnya kebun mereka dibakar orang, sehingga sangat mempengaruhi turunnya produksi.

Seperti disebutkan di bagian terdahulu, masyarakat Lauran mengalihkan produksi kelapa menjadi kopra ke produksi kelapa menjadi tuak (*sopi*). Sekitar 100 keluarga menekuni pekerjaan ini. Konversi kopra ke tuak ini selain disebabkan oleh turunnya harga kopra dan seringnya pembakaran kebun, juga disebabkan oleh beberapa keuntungan yang diberikan oleh tuak. Tidak diperlukan lahan kebun yang luas untuk memproduksi minuman ini. Bahkan orang bisa menggunakan halaman rumah di desa untuk menanam kelapa, terutama kelapa hibrida. Selain menghemat waktu, kedekatan dengan tempat tinggal juga memudahkan pengawasan terhadap tanaman ini dari oknum-oknum yang hendak merusak. Berkaitan dengan produksi tuak, penerimaan kelapa hibrida menjadi meluas di masyarakat produsen. Dalam waktu 3 tahun, kelapa ini sudah bisa diproduksi untuk tuak; ukurannya yang tidak setinggi kelapa lokal juga memudahkan untuk dipanjat dan disadap.



**Gambar 30. Proses penyadapan dan rumah masak tuak di Lauran**

[Photo: H.L.Soselisa, Aug.2011]

Pengolahan tuak lebih mudah dan cepat dengan tenaga kerja yang sedikit dibandingkan kopra. Harga tuak cukup mahal, yaitu Rp.10.000 – Rp.15.000/botol; hasil sulingan pertama seharga Rp.50.000/botol (dalam satu kali proses sulingan hanya menghasilkan satu botol sulingan pertama). Satu kali masak (satu kali proses penyulingan) menghasilkan 30 botol tuak. Dalam satu minggu, orang bisa memasak 2 atau 3 kali, sehingga dalam 1 minggu kerja dapat menghasilkan 60 atau 90 botol (Rp.600.000 atau Rp.900.000). Tuak (*sopi*) dipasarkan di dalam maupun di luar desa dan banyak diminati.





**Gambar 31. Penyulingan tuak di desa Lauran**

[Photo: H.L.Soselisa, Aug.2011]

Ternak utama yang dipelihara pada kedua desa adalah babi dan ayam. Selain itu ada juga sapi dan bebek, tetapi tidak dalam jumlah yang besar. Seperti disebutkan di bagian terdahulu, babi merupakan material penting dalam acara-acara adat masyarakat Tanimbar, sehingga harganya cukup tinggi karena permintaan pasar pun stabil, bahkan tinggi pada waktu-waktu tertentu.

Produksi kehutanan berupa kayu di Lermatang adalah kayu besi (*Intsia bijuga*), *lenggua* (*Pterocarpus indicus*), *torem* (*Manilkara kanosiensis*), *gofasa* (*Vitex gofusus*), *kanawa*, *weman*, *suriang*, kayu jati, kayu putih, dan kayu kuning. Namun seperti disebutkan di bagian sebelumnya di antara jenis-jenis kayu ini, lima jenis (kayu *torem*, kayu besi, *gupasa*, *kanawa*, dan *weman*) dilarang untuk dijual keluar desa, hanya diperbolehkan untuk penggunaan dalam desa. Produksi non-kayu dari Lermatang yang dominan adalah babi hutan.

Dengan penambahan penduduk, pembukaan hutan untuk kebutuhan pertanian dan infrastruktur jalan menyebabkan areal hutan menjadi berkurang, bahkan di Lauran hutan sudah hampir tidak ditemukan lagi. Yang tersisa hanya hutan mangrove yang juga sedang menghadapi eksploitasi untuk kebutuhan rumahtangga sebagai kayu bakar. Awal tahun ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan melakukan program penanaman mangrove di pantai Lauran. Sedangkan di hutan Lermatang, Pemerintah Daerah menetapkan areal hutan lindung sebesar 2 hektar.

Aktivitas masyarakat Lermatang dan Lauran di wilayah laut dilakukan berdasarkan pengetahuan dan pembagian zonasi di laut. Secara umum laut dibagi menjadi tiga bagian, yaitu daerah pasang-surut (*meti*), daerah batas antara *meti* dan laut dalam (*tubir*), dan daerah

laut dalam. Pemahaman tentang bagian-bagian laut secara fisik ini kemudian diintegrasikan dengan pengetahuan tentang aspek biologi dan sosio-budaya, sehingga jenis-jenis biota laut yang ditangkap atau diambil berdasarkan zonasi, arus, musim, teknologi, serta oleh nelayan berdasarkan jenis kelamin dan umur (bandingkan dengan masyarakat Garogos di Seram bagian timur, Soselisa 2004).

Menurut para informan, relief laut Lermatang menggambarkan wilayah *meti* sepanjang 300-500 meter dari pantai, dengan kedalaman 0-9 meter. Setelah itu wilayah *tubir* atau *kepala meti* selebar kira-kira 12 meter dengan kedalaman 9-12 meter, dilanjutkan ke wilayah *air dalam* atau *air biru* dengan kedalaman di atas 12 meter. Wilayah *meti* Lauran lebih panjang dari Lermatang, yaitu sepanjang kira-kira 800-900 meter dengan kedalaman 0-9 meter, wilayah *tubir* atau *ujung meti* selebar kurang lebih 10 meter dengan kedalaman 8-10 meter, serta *air biru* memiliki kedalaman di atas 10 meter. Istilah untuk bagian-bagian tertentu di dalam zona-zona itu, termasuk: *loke* atau *tifur* (kolam-kolam kecil dalam wilayah *meti*), *kalorang* (*uli*) yaitu bagian-bagian air berwarna biru tua (air dalam) di wilayah *meti*, dan *skar* yaitu karang atau *reef* yang muncul di wilayah *meti* atau *tubir*. Untuk menandainya, bagian-bagian ini juga diberi nama. Masyarakat juga menamai tempat atau titik-titik tertentu di laut berdasarkan sumberdaya tertentu yang banyak ditemui di situ, obyek tertentu yang ditemukan di situ, kejadian yang pernah terjadi di situ, atau *landmark* tertentu yang nampak dari tempat itu.



**Gambar 32. Kegiatan perempuan di wilayah *meti*.** [Photo: H.L.Soselisa, Aug.2011]

Wilayah pasang-surut (*meti*) merupakan wilayah untuk lelaki, perempuan dan anak-anak. Di wilayah ini, perempuan dan anak-anak mencari berbagai jenis siput (*bia*) dan menangkap ikan, gurita pada waktu surut dengan berjalan kaki atau membawa perahu, memakai parang, *kalawai* dan *katabat* (*spear*). Laki-laki membawa jaring dan tombak serta pancing, dan menangkap berbagai jenis ikan, kepiting, teripang, gurita, dan lainnya. Istilah umum di Maluku untuk mencari ikan di waktu air surut kering ( di *meti*) pada siang hari adalah *bameti*, dan pada malam hari disebut *balobe* (istilah Tanimbar Selatan: *nasul*) karena pada waktu dahulu dipakai *lobe* (obor dari lilitan daun kelapa). *Meti* siang terbesar dialami pada

musim barat, terutama bulan Oktober, dan *meti* malam ada di bulan Mei-Juli. Alat atau teknologi tradisional yang juga dipakai di wilayah *meti* adalah *silabat* (sejenis *bubu*, perangkap ikan dari bambu), *ikat tali lontar* yang kini sudah tidak dilakukan lagi, dan penggunaan *bore* atau akar tuba (*ufar*) pada waktu-waktu tertentu untuk memperoleh ikan dalam jumlah besar bagi keperluan suatu acara desa. Pemakaian *bore* biasanya dilakukan di wilayah sungai berhutan bakau untuk menangkap ikan-ikan yang masuk ke wilayah bakau, seperti *bulana tongke*, *kapas-kapas*, dan *bubara* serta ikan pari.



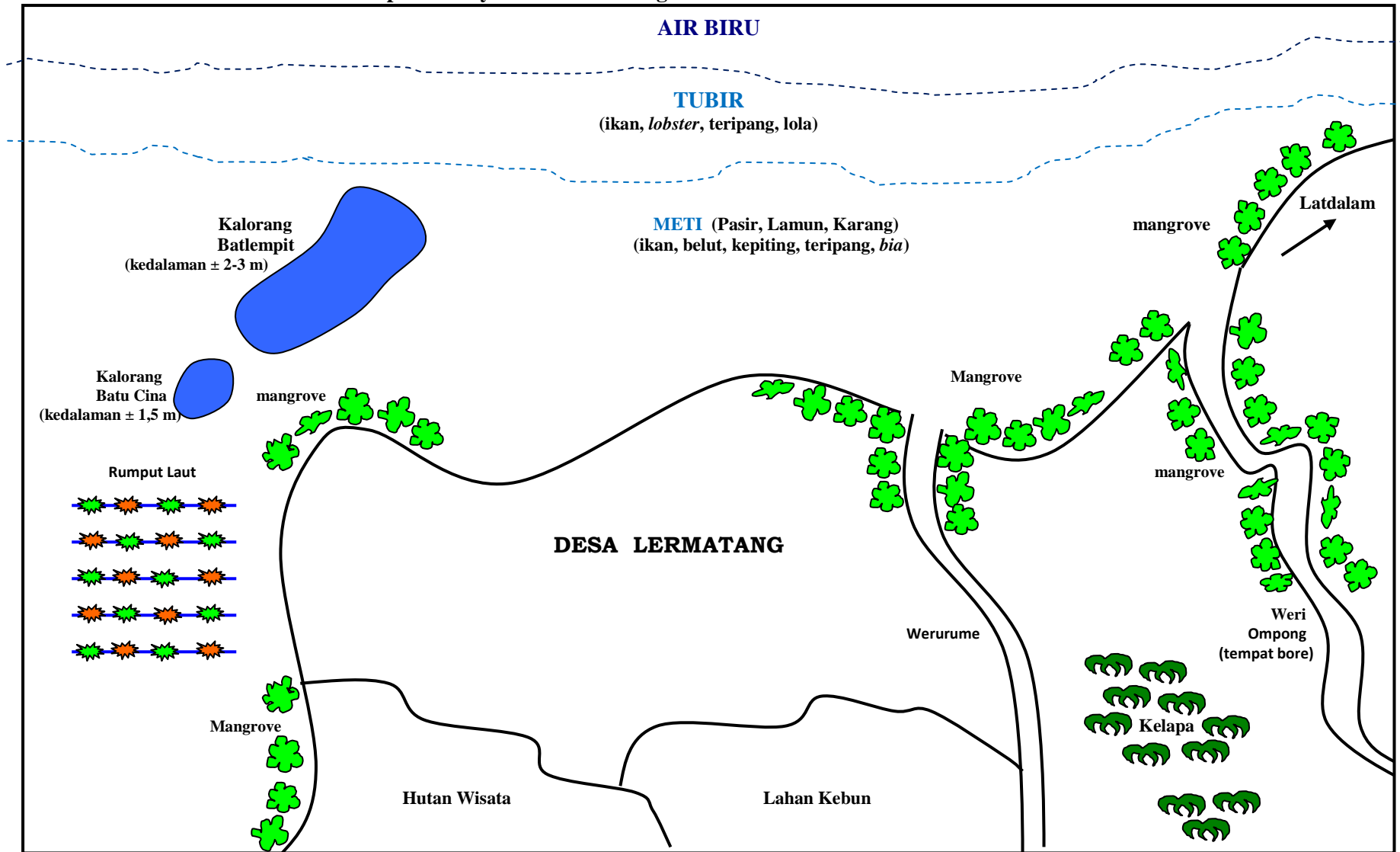
**Gambar 33. Ikan pari tertangkap di sungai**

[Photo: H.L. Sospelisa, Aug.2011]

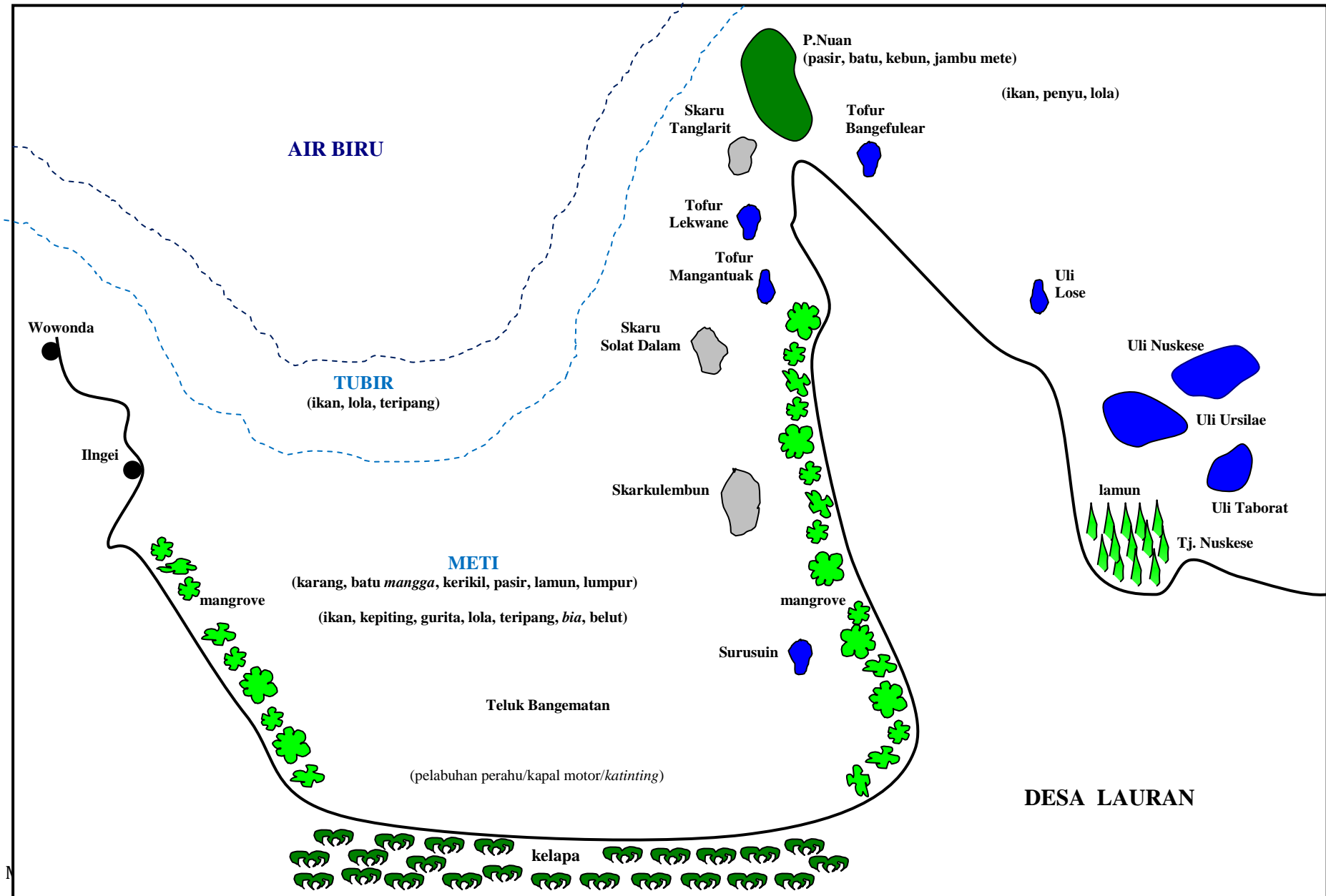
Di wilayah bakau, nelayan juga mencari siput, seperti *bia lafesi*, *bia payal*, dan mencari kepiting bakau yang biasanya juga dijual ke restaurant atau hotel di Saumlaki. Di daerah *skar* seperti di Luran, penduduk memakai *silabat*.

Wilayah *tubir* dan laut dalam merupakan wilayah eksploitasi laki-laki. Berbagai jenis ikan ditangkap di wilayah ini, memakai kail, jaring, panah ikan, *spear* dan *harpoon (oran)*.

Gambar 34. Sketsa Zonasi Laut pada Masyarakat Lerमतang



Gambar 35. Sketsa Zonasi Laut pada Masyarakat Lauran



Masyarakat Lermatang mengalami musim laut tenang pada musim barat, yaitu dari bulan Oktober sampai bulan Februari, dimana mereka melaut sampai di laut dalam. Bulan Maret sampai September, mereka hanya sampai pada batas *tubir*, walaupun pada periode itu ada masa-masa laut tenang dimana mereka bisa ke laut dalam. Sesungguhnya, musim mencari ikan yang ramai di Lermatang terjadi di bulan Juli sampai Oktober. Transportasi yang digunakan untuk mencari ikan umumnya perahu bercadik. Adapun masyarakat Lauran mengalami musim laut tenang kurang dari Lermatang, yaitu dari bulan Oktober sampai Januari. Namun demikian, karena posisi laut di bagian pemukiman berteluk, maka walaupun ombak mereka dapat tetap melaut dalam jarak yang tidak terlalu jauh. Biasanya pada bulan Januari – Maret aktivitas di laut adalah memancing dan membuang jaring.

Pola musim yang mempengaruhi produksi hasil laut ini pada gilirannya memunculkan beberapa strategi nelayan berkaitan dengan pemasaran. Mengikuti strategi ekonomi, nelayan Lermatang membatasi produksi untuk pasar pada musim ikan melimpah (yaitu ketika laut tenang dan aktivitas melaut secara umum tinggi), dan ketika musim paceklik karena angin kencang dan laut berombak, mereka mempertinggi aktivitas penangkapan di laut untuk produksi ke pasar. Walaupun produksi pada musim ini juga tidak setinggi yang diharapkan karena keterbatasan teknologi penangkapan, namun harga komoditi dua kali lipat bahkan lebih dari harga biasa serta permintaan meningkat sehingga tidak ada produksi yang tersisa untuk dibawa pulang atau dibiarkan rusak.

Pengelolaan sumberdaya laut juga diterapkan melalui sistem *sasi* untuk sumberdaya tertentu, seperti untuk teripang dan lola (*trochus*). Mengingat harga kedua komoditi ini cukup tinggi dan permintaan pasar juga tinggi, maka alasan ekonomi menjadi tujuan utama pemberlakuan *sasi*. Karena selama beberapa dekade kedua komoditi ini penting secara ekonomi sehingga dikenakan *sasi*, maka bagi masyarakat Lermatang istilah “hasil laut” mengacu pada kedua komoditi ini.

Lama periode tutup *sasi* bervariasi dari desa satu dengan desa lainnya. Di Lermatang, karena alasan ekonomi, maka periode tutup *sasi* untuk teripang dan lola untuk tahun ini sesuai kesepakatan bersama, adalah satu tahun. Periode tutup *sasi* biasanya bervariasi antara 2 tahun, 3 tahun sampai 5 tahun pada masa-masa sebelumnya. Semakin lama tentu semakin baik, tetapi konsekuensinya harus terus diawasi karena pencurian dapat terjadi oleh orang luar (misalnya oleh warga desa tetangga). Pengawasan selama tutup *sasi* dilakukan oleh anggota masyarakat.

Waktu buka *sasi* dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Misalnya buka *sasi* terakhir di Lermatang dilakukan bulan Mei 2011 untuk keperluan anak masuk sekolah (tahun ajaran baru). Periode buka *sasi* adalah selama dua *meti* (satu bulan). Seperti halnya tutup *sasi*, buka *sasi* juga dilakukan melalui suatu acara adat yang dikombinasikan dengan acara gereja, sehingga upacara adat yang berpusat di *inarut* melibatkan pimpinan desa, tua-tua adat, dan pendeta. “Tuan air” yang bertugas mengawasi wilayah air/laut akan melakukan penyelaman (*molo*) pertama. Dia akan mencari teripang gosok (sebagai teripang yang paling bernilai karena memiliki harga tertinggi), menikamnya, mengangkatnya dan berseru “*o tampuro*”, yang menandakan bahwa masyarakat boleh mulai turun ke laut untuk memanen.

Pembagian wilayah buka *sasi* juga diatur. Di Lermatang, pada tiga hari pertama, wilayah buka *sasi* dibagi atas 3 bagian, yaitu: hari pertama dari Lanit Lean sampai Muka Pintu, hari

kedua dari Muka Pintu – Retmiri, dan hari ketiga dari Lanit Lean – Werbatsire. Hari-hari selanjutnya dapat dimana saja. Panen pertama dibawa ke gereja, yaitu biasanya berupa dua ekor teripang gosok kering berukuran  $\pm 7$  cm per KK.

Hasil panen teripang pada buka *sasi* tergantung pada keadaan angin dan tingkat pencurian yang dilakukan oleh orang luar. Panen semakin berkurang pada masa-masa kini. Bila pada masa-masa sebelumnya seseorang masih bisa memanen 10 kg, kini hanya memperoleh  $\pm 3$  kg, bahkan kurang dari itu, hanya 1-2 kg/keluarga, malah ada yang tidak mencapai 1 kg. Demikian juga hasil lola menurun. Mereka dengan kepandaian menyelam (*molo*) akan menemukan lebih banyak, sebab tidak ada bantuan alat penyelaman, kecuali *goggles* yang dipakai. *Lola* ditemukan pada kedalaman lebih dari 3 meter, ukuran besar banyak ditemukan di wilayah tubir. *Lola* yang dipanen berukuran diameter 7 cm ke atas sesuai aturan pembeli. Harga *lola* kini Rp.35.000/kg.

Pada saat buka *sasi* pedagang pembeli dari luar akan datang ke desa. Menjelang itu, setiap pembeli harus melaporkan kepada kepala desa dan timbangan-timbangan mereka akan diuji oleh pimpinan desa melalui penggunaan sebuah gelas berisi air. Di Lermatang, setiap pembeli harus membayar uang “*sirih-pinang*” ke desa sebesar Rp.3 juta (besarnya ditentukan melalui keputusan musyawarah desa), sebagai syarat pemberian ijin desa untuk membeli hasil panen *sasi*. Pembeli dapat tunggal atau lebih dari satu sesuai siapa yang berminat. Pembeli bisa pedagang lokal Cina, orang Buton, orang Jawa, atau pun orang desa yang merupakan “tangan dagang” pedagang di kota. Produsen bebas memilih kepada pembeli mana ia akan menjual hasilnya, sesuai dengan tingkat hubungannya dengan si pembeli, ataupun sesuai dengan strategi yang diterapkan oleh si pembeli, misalnya menawarkan harga yang lebih tinggi. Ada pembeli juga yang menerapkan sistem “kredit” kepada nelayan untuk satu barang tertentu dan akan dibayar oleh nelayan dengan hasil panen yang diperoleh. Misalnya, pembeli memberikan lampu gas (seharga Rp.600.000; harga normal Rp.400.000) kepada nelayan, dan ketika penimbangan hasil akan dipotong dengan harga lampu. Sistem “kredit” seperti ini lazim dilakukan antara pembeli dan produsen nelayan/petani untuk hasil-hasil komoditi, seperti teripang, lola, dan kopra. Dalam sistem ini, sering tidak nampak uang berpindah tangan dalam transaksi pembelian/penjualan; yang nampak hanya sebuah buku catatan di tangan pedagang.

Teripang yang diambil dan dipasarkan terdiri dari berbagai jenis, antara lain teripang gosok, susu, gama, nenas, sepatu, batu, kulit kapur, *tongtonga*, dan lain sebagainya. Berbagai nama lokal untuk teripang bercampur dengan nama-nama yang dikenal secara umum. Kami tidak melakukan identifikasi untuk mencocokkan *vernacular names* dengan *scientific names*. Beberapa jenis teripang sering ditemukan pada wilayah atau zona tertentu, seperti di wilayah *tubir* sering ditemukan teripang *namat*, *kulur*, *wangap*, susu, batu, nenas. Di laut dalam teripang *lelempit*, *bule kapur*, *bule cita*, *bule merah*, anjing, *lulusir*, kunyit, gosok, nenas, gajah, susu. Harga jual teripang sesuai dengan jenis dan ukurannya, mulai dari Rp.25.000 sampai Rp.1.100.000/kg kering. Yang termahal adalah teripang gosok.

Di samping pemberlakuan *sasi* yang dimaksudkan untuk mendapatkan panen yang optimal, baik dalam kualitas maupun kuantitas, terdapat pula jenis tabu tertentu di dalam pelaksanaan pengambilan hasil. Misalnya, di dalam praktek pengambilan hasil ikan di sungai melalui teknologi bore, wanita yang sedang hamil dilarang ikut serta atau datang ke wilayah itu, termasuk suaminya juga. Pelanggaran tabu ini akan menyebabkan panen yang

buruk. Aturan budaya semacam ini secara ekologis penting karena berfungsi mengontrol pengeksploitasian sumberdaya (lihat Soselisa 2005).

Selain pengaturan pengambilan teripang dan *trochus* melalui sistem *sasi*, beberapa aturan Pemerintah juga melarang pengambilan sumberdaya laut tertentu. Masyarakat Lermatang mengetahui melalui Pemerintah Desa bahwa *teteruga kerang* (*hawksbill turtle*) dan *teteruga ikan* (*green turtle*) serta lumba-lumba dilarang penangkapannya melalui surat keputusan Pemerintah Pusat sejak tahun lalu (2010). Nampaknya sosialisasi beberapa peraturan Pemerintah di pedesaan berjalan lambat. Walaupun *trochus* dan *giant clam* telah dinyatakan sebagai *endangered species* oleh Pemerintah, tetapi dalam pengelolaan lokal larangan itu tidak berlaku atau mungkin tidak diketahui. *Bia garu* (*giant clam*) dijual di pasar ikan Saumlaki dengan harga Rp.25.000/ikat untuk konsumsi lokal. Masyarakat juga berpendapat bahwa larangan terhadap penyu dan lumba-lumba hanya sebatas larangan pengambilan untuk dijual. Selama itu hanya untuk kebutuhan konsumsi rumahtangga, maka tidak menjadi masalah. Kadang-kadang, bila seekor penyu tertangkap ketika mereka sedang mencari ikan, mereka juga dapat membawa penyu itu ke Saumlaki untuk dijual kepada konsumen langganan mereka langsung ke rumahnya.

Selain teripang dan *lola*, rumput laut merupakan salah satu komoditi yang diunggulkan saat ini oleh penduduk desa Lermatang karena cepat menghasilkan uang. Budidaya rumput laut diperkenalkan sekitar tahun 2007-2008. Kini lebih dari 50 keluarga melakukan budidaya rumput laut. Karena tergantung modal usaha per keluarga, maka jumlah unit rumput laut yang dibudidaya juga berbeda, ada yang banyak dan ada yang hanya beberapa tali.



**Gambar 36. Pemanfaatan *marine debris***

[Photo: H.L.Soselisa, Aug.2011]

Beberapa strategi untuk mengurangi pengeluaran (ongkos produksi), meliputi meminta bibit dari teman (biasanya dengan menyerahkan *sopi* dan sekedar uang sebagai syarat), dan memanfaatkan penggalan-penggalan jaring/tali yang hanyut (*gost net*) yang mereka temukan di perairan mereka, terbawa arus masuk ketika air pasang, yang berasal dari kapal-kapal ikan besar, misalnya dari kapal Taiwan yang beroperasi di wilayah Laut Arafura.

Sebagian keluarga Lermatang mengerjakan 20-30 *long-line*, bahkan ada yang lebih, namun sebagian rata-rata hanya 10 *long line*. Proses panen tidak dilakukan sekaligus tergantung dari tenaga kerja keluarga yang tersedia. Jika rata-rata 1 keluarga memiliki 20 *long line*, dengan kemampuan sekali panen 2,5 *long line*, lamanya waktu penjemuran 3 hari (bila panas terik) maka untuk menyelesaikan 20 *long line*, diperlukan 8 kali panen. Apabila 20 *long line* menghasilkan 200 kg kering rumput laut (1 tali berukuran panjang  $\pm$  100m menghasilkan antara 10-15 kg kering) dengan harga Rp 8000/kg, maka rata-rata pendapatan satu periode panen dari rumput laut adalah Rp 1.600.000.

Aktivitas budidaya rumput laut dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan, anak-anak pada usia tertentu juga ikut menolong pada tahap-tahap tertentu, seperti mengikat bibit.



Kegiatan di laut umumnya dilakukan oleh laki-laki, walaupun kadang-kadang istri juga ikut di perahu.

Areal rumput laut di desa Lermatang terdapat di wilayah timur desa, dan dapat diusahakan sepanjang tahun dengan memilih lokasi yang tidak bergelombang, tetapi dengan mempertimbangkan curah hujan. Hujan dapat memperlambat pasca panen mengingat teknologi pengeringan hanya melalui penyinaran matahari. Tempat menjemur (*para-para*) dibuat dari bambu, dengan ukuran bervariasi. Areal penjemuran dilakukan di luar desa, walaupun ada terlihat 1-2 rak penjemuran di dalam desa. Hal ini dikarenakan menurut para informan bau jemuran rumput laut menyebabkan muntaber, sehingga pemerintah desa melarang pengerjaannya di dalam desa. Demikian juga dengan teripang. Proses pasca panen teripang, yaitu ketika merebusnya, uap rebusan teripang dan airnya dapat menyebabkan penyakit yang sama. Mereka memasak teripang di Tanjung Tual, yaitu sebuah pulau kecil di depan desa milik desa Lermatang.



**Gambar 37. Menangkap ikan di sungai**

[Photo: H.L.Soselisa, Aug.2011]

Hasil laut dari Lermatang dan Luran adalah untuk memenuhi kebutuhan pasar desa dan pasar Saumlaki. Kebutuhan pasar lokal di desa terbatas untuk bahan pangan. Di Lermatang tidak terdapat *marketplace*, hanya beberapa kios. Orang biasanya menunggu nelayan pulang dari laut dengan ikan dan mencegatnya bila ingin membeli ikannya. Harga ikan di desa tentu saja jauh lebih murah dibandingkan bila sudah tiba di pasar Saumlaki. Setali ikan *samandar* [*Siganus* sp.] yang berisi 20 ekor berharga Rp.15.000 di desa akan dijual di pasar Saumlaki dengan harga Rp.35.000-Rp.40.000/ikat tetapi dengan jumlah ikan yang lebih sedikit (harga bulan Agustus 2011). Pasar lokal di desa Luran bukan saja dalam bentuk mentah/segar, tetapi juga dalam bentuk masakan, sebab pada malam hari penjual- penjual makanan berjejer di tepi jalan utama Luran menjajakan dagangannya ke penduduk desa dan juga ke penduduk desa-desa tetangga yang melintasi jalan itu. Terdapat pula tempat-tempat jualan di pinggir jalan atau di depan rumah penduduk yang menjual bahan mentah (sayur-sayuran dan bumbu masak) pada siang hari. Di samping itu, orang juga berjalan keliling desa menjajakan jualanannya.

Untuk tujuan pasar pangan Saumlaki, hasil pertanian yang dipasok oleh kedua desa adalah umbi-umbian, sayur-sayuran, bumbu masak, serta buah-buahan. Sedangkan hasil laut

berupa berbagai jenis ikan (antara lain *garopa (grouper)*, mamin, *bobara*, *tangiri*, cakalang, *momar [Decaptherus sp.]*, *samandar [Siganus sp.]*, *sapumpu (Naso sp.)*, sontong, udang, kepiting, *bia garu (giant clam)*, beberapa jenis siput. Adapun komoditi yang akan dikirim keluar MTB, -melalui pedagang Saumlaki- adalah antara lain teripang, lola, dan rumput laut.

Sumberdaya laut dan pantai yang juga dimanfaatkan desa Lermatang dan Lauran adalah pengambilan batu dan pasir. Di Lauran, aktivitas penambangan batu, kerikil dan pasir dilakukan di pulau tidak berpenghuni milik desa, yaitu Pulau Nuan. Hasil ini dijual di dalam desa maupun ke luar desa, baik untuk kebutuhan individu membangun rumah maupun untuk pembangunan infrastruktur umum, seperti jalan dan kantor-kantor pemerintah. Harga batu dan pasir bervariasi, misalnya batu atau pasir Rp.300.000/*ret* (1 *ret* sekitar 2 m<sup>3</sup>), batu berukuran lebih besar (*batu mangga*) Rp.400.000/*ret*, kerikil Rp.500.000/*ret*. Pasir dan batu diangkut dengan memakai perahu bermotor tempel dari pulau. Untuk pengambilan bahan galian C ini dikenakan pembayaran *ngase* (pajak) kepada desa. Perdes (Peraturan Desa) yang baru menetapkan Rp.20.000/*ret*, tetapi peraturan ini belum diterapkan. Dengan pembangunan fisik yang meningkat di wilayah-wilayah pemekaran, maka eksploitasi untuk bahan galian ini perlu mendapat perhatian pula. Merespons permintaan akan bahan galian ini, desa Lermatang mulai mengontrol eksploitasinya melalui pengeluaran larangan pengambilan batu dan pasir yang berlebihan, terutama di lokasi-lokasi tertentu. Di Lermatang harga batu berukuran besar Rp.400.000/kubik, sedangkan *batu mangga* Rp.600.000/kubik. Untuk menjawab permintaan untuk kebutuhan pembuatan jalan raya, petani-petani yang mengolah/membuka lahan kebun di pinggir jalan raya yang sedang dibangun juga mengumpulkan dan menimbun batu-batu karang yang diperoleh di areal kebunnya untuk dijual. Bila hal ini terus terjadi, maka pengumpulan dan pengerukan batu di tanah pertanian dapat berakibat pada perubahan komposisi tanah yang akan berpengaruh pada hasil panen. Tanah berongga karena terdiri dari bebatuan karang mungkin sangat cocok dengan tanaman-tanaman tertentu yang sudah diusahakan sejak lama oleh petani lokal, seperti umbi-umbian dan pepaya (lihat Soselisa and Ellen 2009).



**Gambar 38. Pepaya dan kambing di sebuah kebun Lermatang**  
[Photo: H.L.Soselisa, Aug.2011]

#### 8.4. Pekerjaan Petani dan Nelayan

Walaupun masyarakat pesisir mengkombinasi pekerjaan petani dan nelayan, namun tidak semua orang menjalani aktivitas ganda ini. Sebagian kecil ada yang hanya mengkhususkan di darat dan ada yang lebih berkonsentrasi di laut. Mengulangi apa yang telah didiskusikan di bagian terdahulu, maka menjawab pertanyaan tentang perbandingan pekerjaan di darat dan di laut, beberapa informan di Lermatang berpendapat sebagai berikut. Harga hasil laut lebih tinggi dari hasil kebun, sehingga pekerjaan di laut memberikan pendapatan yang lebih besar daripada di pertanian. Namun petani cenderung konsumtif (boros), mungkin karena tidak ada investasi tenaga di laut sebelumnya, tidak seperti halnya di pertanian. Sebelum mendapatkan panen, orang harus memulai dengan membuka lahan, membersihkan, menanam, memelihara dan menunggu tanaman tumbuh untuk tiba waktu memanen. Dengan demikian, pekerjaan ini mengajar orang untuk sabar, dan untuk menghasilkan sesuatu harus bekerja keras dahulu. Seorang informan menekankan bahwa prinsip dalam pekerjaan petani adalah harus kerja keras di kebun agar diperoleh hasil untuk makan secara kontinu: “kerja adalah *“gali lobang, kasi maso makanan, baru bisa makan”*”; kerja petani adalah “*kerja poro*”, kerja untuk makan. Dalam pengertian ini dimaksudkan bahwa kerja di kebun menjamin ketahanan pangan keluarga, tetapi juga dapat dipergunakan untuk sumber *cash* bagi kebutuhan anak-anak. Hal ini terdengar pada nasihat orangtua pada anaknya: “*hidop par bakabong, bakabong par makan dan par urus anak-anak*”. Modal seorang anak lelaki sebelum menikah adalah parang dan *mancadu* (kapak) karena tanah di *petuanan* masih tersedia untuk berkebun, dan modal seorang anak perempuan adalah pisau dan belanga. Dengan karakter sebagai penyedia makanan, darat dikorespondensikan dengan *duan* (pihak pemberi wanita) dan laut dikorespondensikan dengan *lolat* (pihak penerima wanita) dalam konsep budaya orang MTB.



Gambar 39. Kerja Nelayan

[Photo: H.L.Soselisa, Aug.2011]

Karena pekerjaan di laut menghasilkan uang lebih cepat dan lebih banyak, maka nelayan cenderung boros, sehingga menurut informan keluarga petani lebih banyak yang bisa menyekolahkan anak. Dalam musim paceklik, nelayan sering datang meminta makanan (isi kebun) dari petani. Mengerjakan kebun membuat badan sehat karena banyak bergerak, peredaran darah lancar, sehingga jarang diserang penyakit. Orang laut lebih cepat sakit karena udara laut yang panas membuat mereka sering bertelanjang dada dan masuk angin. Tambahan lagi, pekerjaan di laut dimana pergerakan sumberdaya laut tergantung pada musim, arus, pasang-surut, bulan, sehingga jam kerja nelayan bukan saja siang, tetapi bisa malam sampai subuh; mereka sering tidak tidur malam sebab mengobservasi bulan untuk turun ke laut.



**Gambar 40. Menunggu pergerakan ikan**

[Photo: H.L.Soselisa, Aug.2011]

### **8.5. Prioritas Penggunaan Uang**

Penggunaan uang bukan saja untuk kebutuhan makan. Prioritas penggunaan uang menurut beberapa informan di kedua desa, terutama informan perempuan, adalah untuk:

a. Membeli bahan makanan

Bahan makanan di sini bukan hanya bahan makanan pokok, gula, kopi, dan teh, tetapi juga termasuk rokok. Sekitar sepertiga dari pendapatan per minggu dapat dialokasikan untuk kebutuhan rokok kepala keluarga (ayah) yang mengkonsumsi rokok.

b. Keperluan anak sekolah

Bagi keluarga yang memiliki anak usia sekolah, maka kebutuhan anak sekolah menjadi prioritas. Dari survai keluarga yang dilakukan oleh Pemda MTB (2011) diperoleh angka bahwa hampir 100 persen keluarga mengongkosi sekolah anaknya dari sumber

pendapatan sendiri, hanya sebagian (0,7% di Lermatang, dan 3,1% di Luran) yang mendapat bantuan pihak keluarga.

c. Keperluan adat

Pengeluaran untuk keperluan adat walaupun cukup tinggi, namun harus dipenuhi karena berkaitan dengan kewajiban-kewajiban sosial-budaya dalam sistem kekerabatan orang Tanimbar. Dalam acara-acara adat tertentu, misalnya perkawinan atau kematian, ada kewajiban kerabat untuk menyediakan kain tenun, babi, beras, perkakas rumahtangga, sopi, dan uang. Kain tenun (*tais fian*) berharga berkisar antara Rp.500.000 –Rp.900.000, demikian juga babi.

d. Membangun rumah

Penampilan fisik rumah merupakan salah satu ukuran keberhasilan seseorang di kedua desa ini. Orang membangun rumah secara bertahap; uang akan disisihkan untuk membeli bahan bangunan secara bertahap dan mengerjakannya juga secara bertahap (misalnya membeli semen, kemudian mencetak *batako* sendiri).

e. Membeli pakaian.

Pembelian pakaian kebanyakan diprioritaskan ke baju anak, terutama menjelang hari-hari besar seperti Natal dan Tahun Baru. Dari survai keluarga yang dilakukan oleh Pemda MTB (2011) diketahui bahwa frekuensi membeli baju baru 1 kali setahun menduduki persentase terbesar, yaitu 86,7% untuk Lermatang dan 80,4% untuk Luran, kemudian frekuensi membeli pakaian 2-4 kali setahun (12,4% untuk Lermatang, 18,6% untuk Luran), dan sisanya 5 kali atau lebih dalam setahun.

Dari prioritas di atas, nampak bahwa peralatan produksi (pertanian dan perikanan) bukan menjadi ranking utama. Hal ini mengindikasikan bahwa teknologi untuk produksi pertanian dan perikanan masih terbatas pada teknologi tradisional. Demikian juga menabung tidak menjadi prioritas. Hal ini mungkin berkaitan dengan tingkat ketersediaan *cash* yang rendah. Bila membandingkan dengan penduduk Matakus di Pulau Matakus (terletak di depan Saumlaki), maka di hampir semua rumah di Matakus tersedia “*panta peti*”, yaitu celengan yang terbuat dari kayu/*triplex* dan ditempelkan di dinding lemari pakaian. Celengan ini biasanya dibuat oleh bapa keluarga. Informan Matakus menempatkan menabung sebagai prioritas keempat penggunaan uang (setelah untuk makan, ongkos anak-anak sekolah, dan bangun rumah). Kegunaan celengan ini adalah untuk kebutuhan mendadak, seperti bila ada anggota keluarga sakit.



**Gambar 41.**  
**Nelayan Matakus**  
[Photo: P.S.Soselisa, Aug.2011]

## 9. Beberapa Isu dalam Pengembangan Ekonomi Pesisir di Yamdena bagian Selatan

Berdasarkan temuan di desa sampel, Lermatang dan Lauran, maka tabel berikut menggambarkan beberapa isu terkait dengan potensi, kendala atau masalah, strategi lokal, dan implikasinya yang dapat dipertimbangkan dalam usaha pengembangan ekonomi pesisir di Yamdena bagian selatan. Strategi lokal yang dijalankan belum merespons semua masalah atau belum dapat mengatasi masalah.

**Tabel 23. Beberapa Isu terkait Pengembangan Ekonomi Pesisir di Yamdena bagian Selatan**

Potensi	Masalah	Strategi lokal	Implikasi
Berbagai jenis ikan udang, dll	Kendala transportasi pengaruhi kualitas pasca panen: jarak tempuh & biaya; tidak ada pembeli penampung di desa; teknologi pasca panen tidak memadai	Membatasi produksi [terutama pada musim melimpah]  Hanya untuk subsistence	<i>Income</i> sedikit/konstan Tidak ada surplus Hasil terbatas, pendapatan terbatas, ekonomi keluarga tetap di bawah
Rumput laut	Modal untuk peralatan terbatas. Penyakit (baru 1 jenis yang diusahakan)  Tenaga kerja terbatas  Teknologi budidaya dari luar; tidak ada pendampingan Merupakan trend pasar global [yang dimanfaatkan Pemerintah sebagai peluang pengembangan ekonomi masyarakat tradisional]	Mengumpulkan tali atau jaring hanyut di laut Minta bibit di teman  Panen bertahap  Proses pasca panen di luar kampung untuk menghindari wabah penyakit	Mutu pasca panen belum baik; produksi masih dalam bentuk <i>raw material</i> Pengurangan/penyempitan zona produksi Beban zona ' <i>meti</i> ' makin berat Konflik di laut lepas berkurang, tetapi di zona " <i>meti</i> " dapat bertambah
Beberapa jenis teripang  <i>Trochus (lola)</i>	Produksi terbatas; pencurian  Pedagang kontrol harga Terikat sistem 'kredit'	Jalankan <i>sasi</i>	<i>Income</i> terbatas dan menunggu buka <i>sasi</i>
Aktivitas nelayan	Karakter meramu masih tinggi pada masyarakat pesisir; tidak mengoptimalkan usaha ekonomi  Konsep meramu dan konsep individu masih kuat, sehingga pandangan ke depan terbatas Produksi individu [kekuatan kelompok belum ditingkatkan] Pengembangan teknologi dan kelembagaan kelompok kurang berjalan Pendekatan penguatan ekonomi desa lebih bertumpu pada individu	Mengurangi daya dan wilayah eksploitasi	Hasil tangkapan sedikit/terbatas

	Management tradisional terhadap waktu tidak dijalankan secara optimal  Teknologi terbatas	Menjawab permintaan pasar pada masa paceklik [karena membaca situasi pasar]  Eksplorasi wilayah <i>meti</i> tinggi	Teknologi terbatas, produksi terbatas, <i>income</i> terbatas  Beban <i>meti</i> tinggi
Umbi-umbian Sayur-sayuran	Ukuran kebun kecil Multi- <i>crop</i> Pasca panen masih terbatas sebagai bahan baku; hanya memenuhi pasar lokal	Untuk <i>food security</i> rumah tangga  Untuk subsistensi saja	<i>Income</i> terbatas
kopra	Pasar kontrol harga; harga turun Teknologi pasca panen terbatas	Konversi ke produksi tuak Kelapa hibrida bertambah	Produksi lokal minuman keras bertambah; konsumen bertambah; masalah sosial akibat mabuk muncul

Dari isu-isu ini, beberapa point yang menjadi catatan terkait dengan aspek perikanan adalah:

- Aktivitas masyarakat di zona *meti* (daerah pasang-surut) tinggi, melibatkan laki-laki dan perempuan, orang dewasa dan anak-anak. *Meti* beresiko melalui penggunaan beberapa teknologi (termasuk *bore*).
- Aktivitas di zona *meti* semakin tinggi dengan kebijakan-kebijakan budidaya, sehingga mempengaruhi pandangan tentang laut sebagai suatu totalitas, menjadi tidak utuh dengan hanya meneropong bagian wilayah pasang-surut. Beban *meti* menjadi tinggi.
- Aktivitas di laut dalam terbatas dan cenderung menurun karena kendala teknologi; tidak ada pengembangan teknologi laut dalam. Dengan demikian, ketika aktivitas lokal terkonsentrasi di wilayah pasang-surut, kontrol lokal atas wilayah laut dalam berkurang; *illegal fishing* dari nelayan luar bebas beroperasi sehingga masalah klasik Laut Arafura tetap berlangsung (kaya sumberdaya laut tetapi masyarakat lokal miskin karena lebih banyak dieksploitasi oleh nelayan luar).
- Kebijakan rumput laut -sebagai respons dari pasar global- adalah kebijakan '*instant*' untuk mensiasati keadaan ekonomi yang sudah berlangsung lama di masyarakat pesisir, terutama kebutuhan akan *cash*. Kebijakan untuk mendapatkan uang dengan segera juga membawa dorongan untuk menghabiskan uang dengan cepat, sehingga bersifat konsumtif. Institusi ekonomi seperti Bank juga berkontribusi di dalam hal ini melalui pelayanan kredit. Konsumeristik juga mendorong terganggunya keseimbangan (aktivitas) laut-darat masyarakat pesisir MTB yang bertujuan menjaga kontinuitas dan sustainabilitas. Akibatnya orang mencari uang untuk membeli bahan makanan pokok. Di sisi lain, masyarakat lokal sangat tergantung pada pasar luar yang mengontrol harga dan mekanisme.
- Dengan komoditi baru, seperti rumput laut, konsep lokal yang menjamin ekonomi jangka panjang kini menjadi jangka pendek. Tata pengelolaan laut lokal (misalnya *sasi*) dibangun melalui komoditi lokal, termasuk strategi-strategi pengelolaannya dalam konsep perikanan tangkap. Dengan demikian diharapkan intervensi rumput laut dapat berlaku sebagai intervensi antara untuk menggiring masyarakat pesisir ke konsep

pengelolaan perikanan budidaya melalui pengembangan budidaya komoditi lama (teripang, lola, ikan). Untuk itu pemikiran-pemikiran untuk meng-*hybridized* pola baru dengan pola (mekanisme) lama untuk komoditi lokal perlu dibangun.

- Pengenalan komoditi rumput laut di wilayah kepulauan (pulau kecil) masuk dengan konsep kontinental, dimana pembudidaya rumput laut dikategorikan sebagai ‘petani’, sehingga konsep ini akan mempengaruhi konsep lokal.

## 10. Rekomendasi

Rekomendasi dari studi ini untuk stakeholder terkait menyangkut beberapa aspek.

- Data statistik (Kabupaten dan Kecamatan dalam Angka) menyangkut kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masyarakat perlu dianalisa lebih jauh. Statistik di tingkat desa dalam mata pencaharian (pertanian dan perikanan), kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur sangat minim bahkan ada yang tidak tersedia. Kekuatan data ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan program-program pembangunan di daerah target.
- Perlu pengembangan infrastruktur dan pelayanan untuk peningkatan derajat kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Akses untuk pasar dan jaringannya perlu dikembangkan, demikian juga informasi dan pengetahuan.
- Meningkatkan pengelolaan dan sistem kontrol terhadap lingkungan lokal melalui kebijakan-kebijakan yang melibatkan masyarakat lokal dan berasas sustainabilitas.
- Peningkatan ketahanan pangan rumah tangga berbasis pada pangan lokal melalui kebijakan-kebijakan dan program yang mengutamakan masyarakat.
- Pengembangan program budidaya perikanan berbasis komoditi unggulan lokal dalam rangka meningkatkan daya saing.
- Pengembangan teknologi pasca panen baik untuk hasil perikanan maupun hasil pertanian.
- Perlu peningkatan teknologi laut dalam untuk mengurangi beban terhadap wilayah pasang-surut serta untuk memperkuat *local control* dan *local law enforcement* atas wilayah laut dalam di Laut Arafura.
- Konsep budaya lokal sangat perlu dipertimbangkan dalam penerapan kebijakan-kebijakan pembangunan masyarakat.
- Meningkatkan studi-studi lanjut tentang masyarakat pesisir di Laut Arafura dan Laut Timor dalam rangka pencapaian pemahaman dalam aspek sosial-ekonomi dan budaya dari region ini.





[Photo: H.L. Sospelisa, Aug.2011]

## Kepustakaan

Badan Pusat Statistik. 2010. "Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2010". *Berita Resmi Statistik*. No.45/07/Th.XIII, 1 Juli 2010.

BPS Kabupaten MTB. 2010a. *Maluku Tenggara Barat Dalam Angka 2010*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

BPS Kabupaten MTB. 2010b. *Tanimbar Selatan Dalam Angka 2010*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

BPS Provinsi Maluku. 2010. *Maluku Dalam Angka 2010*. Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku.

*Data Potensi Desa Lermatang* 2003. Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten MTB, Provinsi Maluku.

de Jonge, Nico dan Toos van Dijk. 1995. *Forgotten Islands of Indonesia: The Art and Culture of the Southeast Moluccas*. Singapore: Periplus Editions.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten MTB. 2010. *Database Kelautan dan Perikanan Kabupaten MTB 2010*.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten MTB. 2010. "Kepulauan Tanimbar dalam Konsep Pengembangan Kearifan Lokal sebagai Pendukung Ketahanan Hayati". Makalah dipresentasikan pada Australia-Indonesia Seminar and Workshop on Small Islands Biosecurity Studies. Ambon, 6-7 Agustus 2010.

Kabupaten Maluku Tenggara Barat. 2009. *Data Dasar Kabupaten MTB 2009*

*Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun 2010*. Desa Lermatang Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten MTB.

*Laporan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun 2010*. Desa Lauran Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten MTB.

McKinnon, Susan Mary. 1983. *Hierarchy, Alliance, and Exchange in the Tanimbar Islands*. PhD Dissertation. Chicago: The University of Chicago.

Pemerintah Daerah Kabupaten MTB. 2011. *Profil Daerah: Potensi dan Peluang Investasi*. Saumlaki: Bagian Kerjasama & Investasi Sekretariat Daerah Kab.MTB.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Maluku, Universitas Pattimura & Summer Institute of Linguistics. 1996. *Atlas Bahasa Tanah Maluku*. Ambon: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Maluku, Universitas Pattimura & Summer Institute of Linguistics.

Shantiko, Bayuni, Yan Andries, Brampi Morialkosu, dan Daniel Amarduan. 2004. *Socio Economic Analysis of Rural Tanimbar*. Jakarta: TLUP Tech. Ser. N<sup>o</sup> 3.

Soselisa, Hermien. 2001. "Sasi Laut di Maluku: Pemilikan Komunal dan Hak-hak Komunitas dalam Manajemen Sumber Daya Kelautan", dalam F & K von Benda-Beckmann and Juliette Koning (eds.), *Sumber Daya Alam dan Jaminan Sosial*, pp.227-260. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Soselisa, Hermien L. 2004. *Fishers of Garogos: Livelihood and Resource Management in a Maluku Island*. Darwin: Charles Darwin University Press.

Soselisa, Hermien L. 2005. "Pengelolaan Lingkungan Dalam Budaya Maluku", dalam Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku, *Maluku Menyambut Masa Depan*, pp.198-214.

Soselisa, Hermien and Roy Ellen. 2009. "Cassava Management in the Kei islands". Fieldnotes August 2009.

Tao, Aloysius, I Made Budi Astawa, dan Saverius Huninhatu. 2005. *Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Guna Lahan Yamdena: Kaji Tindak Partisipatif di Desa-Desa Pilot Makatian, Tutukembong, Arui Bab, Dusun Bomaki*. Jakarta: TLUP Tech. Ser. N<sup>o</sup> 5.